

**KONDISI SOSIAL-EKONOMI
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II :
KASUS KABUPATEN BUTON**

KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II : KASUS KABUPATEN BUTON

**LAILA NAGIB
DEVI ASIATI
ARI WAHYONO
ANDY AHMAD ZAELANY**



**COREMAP-LIPI
PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK-LIPI), 2008**



© 2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus
Kabupaten Buton/Laila Nagib, Devi Asiati, Ari Wahyono, Andy
Ahmad Zaelany. – Jakarta: LIPI Press, 2008.
xvii + 196 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-430-3

1. Terumbu karang
2. Potensi sosial-ekonomi
3. Sumber daya laut

333.955 3

Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp. : (021) 5221687, 5251542 psw. 720
Fax. : (021) 5207205, 5221687
E-mail : ppk-lipi@rad.net.id

KATA PENGANTAR

Kerusakan terumbu karang di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan suatu program penyelamatan terumbu karang yang disebut COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). COREMAP bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaan COREMAP diperlukan pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang, yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program dilaksanakan. Pemahaman mengenai kondisi masyarakat juga merupakan dasar untuk merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi, permasalahan dan aspirasi masyarakat setempat, dan untuk mendapatkan pemahaman tersebut dilakukan baseline studi atas kerjasama COREMAP – LIPI dengan Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK – LIPI).

Buku ini merupakan salah satu hasil baseline studi yang berisi data dasar dan kajian tentang kondisi demografi dan sosial – ekonomi masyarakat di lokasi COREMAP, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Kajian ini merupakan bahan masukan yang dapat dipakai oleh para perancang, pengelola dan pelaksana COREMAP untuk merancang, melaksanakan dan memantau program tersebut.

Kegiatan penelitian dan penulisan buku ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur NPIU CRITC

COREMAP II-LIPI yang telah memberikan kepercayaan pada peneliti PPK – LIPI untuk melakukan baseline studi. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur: pemerintah daerah Kabupaten Sikka, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Unit pelaksana Coremap di Kabupaten Sikka, dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian serta memberikan data dan informasi. Kepada para informan: masyarakat nelayan, para pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat Desa Kojadoi dan Namangkewa kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kepada tim teknisi komputer PPK-LIPI yang terdiri dari Puji Hartana S.Sos, Nova Hendarto BSt, Sutarno, BSc dan Suparman yang telah melakukan pengolahan data, mengerjakan *lay-out* isi buku dan membuat desain cover juga kami ucapkan terima kasih.

Tim peneliti telah berusaha untuk melakukan kajian dan penulisan secara maksimal, tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Agustus 2008
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
(PPK-LIPI)

Dr. Ir Aswatini, MA.

KATA PENGANTAR

Coremap fase II yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2009 bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumberdaya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan Coremap dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan akan tercapai peningkatan tutupan karang sebesar 5 persen per tahun, sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan terjadi peningkatan pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang mempunyai kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar 10 persen pada akhir program.

Keberhasilan Coremap, salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu sangat penting pada masa persiapan melakukan perencanaan program yang didukung oleh data dasar aspek sosial-ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya terumbu karang. Selain dipergunakan sebagai masukan-masukan dalam merancang program, data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang ini juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Untuk mendapatkan data dasar tersebut perlu dilakukan *baseline* studi sosial ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial-ekonomi, budaya masyarakat di lokasi Coremap sebelum program berjalan. Hasil *baseline* studi sosial-ekonomi ini merupakan titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program/intervensi Coremap dilakukan.

Buku ini merupakan hasil dari *baseline* studi sosial-ekonomi yang dilaksanakan di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia bagian Timur (lokasi World Bank). *Baseline* studi sosial-ekonomi dilakukan

oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari Kedeputusan IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan baseline studi ini. Kepada para informan: masyarakat, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat Desa Terapung dan Desa Mangumbangura (Kecamatan Mawasangka) serta Desa Wauno dan Desa Kapoa (Kecamatan Kadatua), kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur, dari Pemerintah Kabupaten Buton, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Buton, serta berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Agustus 2008

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadiharga, MSc.

RANGKUMAN

Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang, dengan penekanan studi di daerah binaan COREMAP, yaitu Kecamatan Mawasangka (pesisir) dan Kadatua (kepulauan), Kabupaten Buton. Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh terutama melalui survei, wawancara mendalam dan FGD yang dilakukan di 4 desa sampel binaan Coremap pada kedua kecamatan terpilih. Sumber data sekunder terutama dari BPS, kantor statistik daerah, Bappeda dan kantor DKP di daerah untuk mendapat gambaran makro tentang kondisi sosial ekonomi penduduk dalam kaitannya dengan pengelolaan SDL di wilayahnya.

Temuan pokok studi adalah tingginya ketergantungan penduduk di wilayah pesisir dan pantai terhadap SDL, khususnya perikanan tangkap dan budi daya (terutama rumput laut) baik dilihat dari sumber utama mata pencaharian penduduk maupun penghasilannya. Meskipun terdapat kesamaan pola dalam pemanfaatan SDL namun intensitasnya sangat berbeda, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduknya. Beberapa faktor seperti potensi dan keragaman SDL, perubahan musim, nilai ekonomi hasil produksi, akses untuk pemasaran hasil produksi serta alternatif kesempatan kerja sangat penting perannya dalam menentukan kegiatan dan pemanfaatan SDL dan penyelamatan terumbu karang di wilayahnya. Faktor kemiskinan dan tekanan permintaan dari luar dapat mendorong nelayan (termasuk nelayan luar) melakukan segala cara untuk mengeksploitasi SDL tanpa peduli keberlanjutannya. Sebaliknya tersedianya alternatif mata pencaharian dan akses pasar untuk hasil produksi, akan mengurangi *over fishing* dan mendorong pemanfaatan SDL yang ramah lingkungan. Peran pemerintah daerah

sangat diperlukan dalam menyediakan akses untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik dalam hal menyediakan kesempatan kerja alternatif maupun pemasaran. Di samping itu, diperlukan kemauan politik dan aksi yang serius dalam membantu masyarakat untuk mengelola SDL, sekaligus menjaga dan melindungi wilayahnya dari praktek yang merugikan semua pihak terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
KATA PENGANTAR	v	
RANGKUMAN	vii	
DAFTAR ISI	ix	
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GAMBAR	xv	
DAFTAR BAGAN	xvii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan dan Sasaran	5
	1.3. Metodologi	6
BAB II	PROFIL LOKASI COREMAP	
	KABUPATEN BUTON	11
	2.1. Kondisi Geografis	11
	2.2. Kondisi Sumber Daya Alam	23
	2.2.1. Kabupaten Buton	23
	2.2.2. Kecamatan Mawasangka	27
	2.2.3. Kecamatan Kadatua	29
	2.3. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi	34
	2.3.1. Kabupaten Buton	34
	2.3.2. Kecamatan Mawasangka	35
	2.3.3. Kecamatan Kadatua	41
	2.4. Pengelolaan Sumber Daya Laut	43
	2.4.1. Kabupaten Buton	43
	2.4.2. Kecamatan Mawasangka	48
BAB III	PROFIL SOSIAL DEMOGRAFI PENDUDUK	73
	3.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	73
	3.2. Pendidikan	81

3.3.	Pekerjaan	88
3.4.	Kesejahteraan Penduduk	104
3.4.1.	Pemilikan dan Penguasaan Aset Produksi	104
3.4.2.	Kondisi Tempat Tinggal	111
BAB IV	PENDAPATAN PENDUDUK	119
4.1.	Pendapatan Penduduk di Kabupaten Buton	119
4.2.	Pendapatan Penduduk Tingkat Kecamatan	123
4.2.1.	Pendapatan rumah tangga di Kecamatan Mawasangka	123
4.2.2.	Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Kadatua	153
4.2.3.	Pendapatan nelayan menurut musim	161
4.3.	Sintesa Pendapatan	174
BAB V	PENUTUP	177
5.1.	Kesimpulan	177
5.2.	Rekomendasi	182
5.3.	Agenda	184
DAFTAR PUSTAKA		187
LAMPIRAN 1.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan RT (Rp 3,5 juta/lebih) dan Musim, Kawasan Darat (Desa Terapung dan Mangubangura), Kec. Mawasangka, Kab. Buton, 2006 (N= 44)	191
LAMPIRAN 2.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan RT (kurang dari Rp500.000), Menurut Musim, Kawasan Darat (Desa Terapung dan Mangumbangura), Kec. Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (N = 44)	191
LAMPIRAN 3.	Konsep dan Definisi	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Kerusakan Karang Nasional	1
Tabel 2.1.	Daftar Nama Kecamatan dan Desa Binaan COREMAP II di Kabupaten Buton	14
Tabel 2.2.	Tingkat Pendidikan Tertinggi Responden yang Ditamatkan di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua Tahun 2006	42
Tabel 2.3.	Status Usaha Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Kabupaten Buton.	46
Tabel 2.4.	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Beberapa Jenis Ikan*), Kecamatan Mawasangka Tahun 2005	52
Tabel 2.5.	Harga Ikan Karang Hidup di Tingkat Nelayan dan Pengumpul di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka Tahun 2006	62
Tabel 2.6.	Harga Rumput Laut di Tingkat Pengumpul, Agen dan Konsumen di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka, 2006	65
Tabel 2.7.	Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Buton dan Kecamatan Kadatua	72
Tabel 3.1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2004	74
Tabel 3.2.	Jumlah ART Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006	79
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kadatua Menurut Jenis Kelamin dan Desa Tahun 2004	81

Tabel 3.4.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Buton (Tahun 2004)	82
Tabel 3.5.	ART (10 tahun ke atas) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton (2003)	83
Tabel 3.6.	ART (7 tahun ke atas), Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin , Kecamatan Mawasangka Tahun 2006	85
Tabel 3.7.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kadatua	86
Tabel 3.8.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ART Responden di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006	87
Tabel 3.9.	Penduduk Usia Kerja (10 tahun ke atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Kab. Buton, 2004	89
Tabel 3.10.	Responden Menurut Lapangan Pekerjaan (Utama dan Tambahan), menurut Desa, Kecamatan Mawasangka, 2006	94
Tabel 3.11.	Distribusi ART Menurut Lapangan Pekerjaan dan Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006	96
Tabel 3.13.	Rumah Tangga dengan Pemilikan Alat Tangkap di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006	106
Tabel 3.14.	Perbandingan Pemilikan Sarana Penangkapan Ikan RT Nelayan di Kecamatan Kadatua (Tahun 2005 dan 2003)	108
Tabel 3.15.	Perbandingan Alat Penangkapan Ikan RT Nelayan di Kecamatan Kadatua (2005 dan 2003)	109

Tabel 3.16.	Perbandingan Keadaan Ekonomi RT Nelayan di Kecamatan Kadatua tahun 2002 dan 2003	109
Tabel 3.17.	Pemilikan Sarana Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006	110
Tabel 3.18.	Jumlah Pemilikan Asset RT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006	111
Tabel 3.19.	Jumlah RT Nelayan Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Jenis Atap dan Dinding Rumah, Kabupaten Buton Tahun 2003	112
Tabel 4.1.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan RT di Desa Terapung dan Desa Mangumbangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (Persen)	125
Tabel 4.2.	Statistik Pendapatan RT di Desa Terapung dan Wakambangura, Kec.Mawasangka, Kab. Buton,Tahun 2006 (Rupiah)	126
Tabel 4.3.	Statistik Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan KRT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006	128
Tabel 4.4.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan RT dan Lapangan Pekerjaan KRT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, 2006	130
Tabel 4.5.	Distribusi RT Nelayan Menurut Pendapatan, Musim di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (N= 44)	132
Tabel 4.6.	Statistik Pendapatan RT Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Terapung dan Wakambangura, Kec. Mawasangka, 2006 (N = 44)	134

Tabel 4.7.	Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan dan Pendidikan KRT di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka, 2006	135
Tabel 4.8.	Distribusi Responden Menurut Kelompok Pendapatan RT dan Pendidikan ART di Lokasi Penelitian, Kec. Mawasangka, 2006 (Persen)	136
Tabel 4.9.	Statistik Pendapatan di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2006 (Rupiah)	154
Tabel 4.10.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Jenis Pekerjaan KRT, Kecamatan Kadatua, Tahun 2007	155
Tabel 4.11.	Statistik Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan RT di Lokasi Penelitian Kec. Kadatua, Kab. Buton 2006	156
Tabel 4.12.	Statistik Pendapatan RT Nelayan Menurut Musim di Lokasi Penelitian Kec. Kadatua, Kab. Buton, 2006 (Rupiah)	162
Tabel 4.13.	Distribusi RT Menurut Pendapatan RT (Kegiatan Kenelayanan) dan Musim di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, 2006 (persen)	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Lokasi penelitian COREMAP di Kabupaten Buton	18
Gambar 2.2.	Produksi Budi Daya Laut Kabupaten Buton, 2005	47
Gambar 2.3.	Lokasi Terumbu Karang di Kecamatan Mawasangka	49
Gambar 2.4.	Kalender Musim Kegiatan Kenelayanan di Kecamatan Mawasangka	53
Gambar 2.5.	Peta Lokasi Penangkapan Ikan Karang Nelayan Kecamatan Mawasangka	67
Gambar 3.1.	Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2004	75
Gambar 3.2.	Piramida Penduduk Kecamatan Mawasangka Tahun 2004	75
Gambar 4.1.	Struktur PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2004	121

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.	Rantai Pemasaran Ikan Teri	55
Bagan 2.2.	Rantai Pemasaran Kepiting	58
Bagan 2.3.	Rantai Pemasaran Rumput Laut	63
Bagan 5.1.	Struktur Prosedur Pelaksanaan Program COREMAP	185

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kerusakan sumber daya kelautan di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk, telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Beberapa fakta diantaranya adalah semakin menipisnya hutan mangrove, bertambahnya jumlah wilayah perairan yang mengalami *over fishing* dan meningkatnya *destructive fishing* seperti penggunaan bom ikan dan sianida. Studi yang telah dilakukan oleh LIPI (Suharsono) menyebutkan bahwa hanya sekitar 5,5 persen terumbu karang di wilayah barat Indonesia yang termasuk dalam kondisi sangat bagus, dan sekitar 41 persen terumbu karang dalam kondisi rusak dengan berbagai variasi tingkat kerusakan. (Coremap- LIPI, 2005). Deskripsi kerusakan karang secara lengkap di tingkat nasional dan daerah/ kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data Kerusakan Karang Nasional

Wilayah Indonesia	Lokasi Stasiun	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	278	5,40	24,10	34,17	36,33
Tengah	213	6,10	31,92	45,07	16,30
Timur	195	6,15	21,03	30,77	42,05
Indonesia	686	5,83	25,66	36,59	31,92

Sumber: Suharsono, 2005 (www.coremap.or.id)

Catatan: Sangat baik = 75 - 100% Cukup = 25 - 49,9%
Baik = 50 - 74,9% Kurang = 0 - 24,9%

Hasil pengamatan RRI (Tim Ekologi P20 LIPI, 2006) menunjukkan kondisi karang di Kabupaten Buton tergolong dalam kategori sedang. Menurut hasil pengamatan RRI di 32 stasiun,

persentasi rata-rata tutupan karang hidup sekitar 29,8 persen. Tutupan karang hidup berupa jenis terumbu karang non-Acropora sebesar 22,3 persen lebih besar dibandingkan jenis terumbu karang Acropora (sekitar 7,5 %). Adapun tutupan karang berupa komponen biotik yang terlihat cukup besar adalah *soft coral* sekitar 10,7 persen, sedangkan sponge hanya sekitar 3,5 persen. Persentase tutupan dari komponen abiotik terlihat cukup besar, yaitu pasir sekitar 20,2 persen, rubble 11,2 persen dan DCA sekitar 9,4 persen.

Kondisi karang di lokasi survei, yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua menunjukkan kondisi yang hampir sama, yaitu dalam kategori 'sedang'. Kondisi terumbu karang di Mawasangka lebih memprihatinkan, dengan persentase tutupan karang hidup hanya sekitar 26 persen. Sebaliknya di perairan Kecamatan Kadatua kondisi terumbu karangnya lebih bagus, khususnya di bagian selatan Pulau Kadatua dan bagian utara Pulau Siompu (sebagian wilayahnya masuk Kecamatan Kadatua), dengan tutupan karang hidup relatif tinggi berkisar antara 50 – 75 persen, dan kondisi DCA mencapai 39 persen. Namun demikian di area stasiun BT 12 dan BT 13 dari Kecamatan Kadatua, terjadi pemutihan karang (*bleaching*), sebagai akibat serangan dari *Anchataster plancir* (Bintang Laut, hama terumbu karang). Berdasarkan data tentang kondisi tutupan karang hidup tersebut, tampaknya sudah mendesak untuk dilakukan program rehabilitasi terumbu karang secara terencana untuk memperbaiki kondisi ekosistem terumbu karang yang sudah memprihatinkan.

Kini, banyak orang berpendapat bahwa penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah faktor manusia (*anthropogenic impact*) (lihat Zaelany, 2007), misalnya melalui *over exploitation* terhadap hasil laut, penggunaan teknologi yang merusak terumbu karang (*potassium cyanide*, bom ikan, bagan tancap, racun, trawl, bubu, muro ami dan lain-lain), penebangan pohon di daratan secara besar-besaran, polusi industri, dan mismanajemen dari kegiatan penambangan. Semua praktek ini terbukti telah merusak terumbu karang dan mematikan anak-anak ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya kelautan dipicu oleh motivasi para aktornya (Hidayati, dkk, 2002, Muchtar, 2002 dan Zaelany, 2007). Motivasi tersebut dapat dikategorikan dalam 2 hal, yakni, i) keserakahan dan atau kemiskinan ii) pengetahuan, sikap serta praktek-praktek pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya kelautan yang masih kurang dari masyarakat. Kerusakan karang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena keserakahan maupun karena kemiskinan,

Sebagian masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, melakukan eksploitasi sumber daya kelautan tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan (*feeding frenzy*). Sedangkan kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses ekonomi dan hidup dalam kemiskinan, juga melakukan praktek yang tidak ramah lingkungan, agar tetap survival. Faktor lainnya berkaitan dengan keterbatasan informasi, data dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

Untuk memperbaiki sumber daya kelautan, khususnya terumbu karang, dilakukan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak pemberi dana melalui program COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). Program nasional ini dilaksanakan secara bertahap, Tahap I sudah hampir berakhir dan kini memasuki persiapan untuk Tahap II. Belajar dari pelaksanaan Coremap Tahap I, diperlukan data yang lebih terukur untuk menyusun desain Tahap II, sehingga penerapan program dalam mencapai tujuan akan lebih lancar. Tujuan COREMAP Tahap II lebih ditekankan pada terciptanya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan, agar sumber daya ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ekosistem terumbu karang didesentralisasikan pada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan. Desentralisasi dilakukan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat pantai melalui pelibatan

masyarakat local secara kolaboratif, sehingga kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk keperluan tersebut dilakukan serangkaian studi pendahuluan (*preliminary*) pada beberapa wilayah terpilih, yakni Kabupaten Biak, Raja Empat, Selayar, Pangkajene Kepulauan, Wakatobi, Buton dan Sikka. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program COREMAP sebelumnya, terdapat beberapa factor yang berpengaruh antara lain kesesuaian desain program dengan permasalahan serta potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat, diperlukan data dasar sosial ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Selain dipergunakan sebagai masukan-masukan dalam merancang program, data dasar aspek sosial ekonomi terumbu karang ini penting juga untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data dasar sosial-ekonomi dari hasil *baseline* ini merupakan titik awal (TO) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program/intervensi COREMAP dilakukan.

Parameter yang akan digunakan dalam evaluasi program Coremap Tahap II di 7 kabupaten adalah :

- i) Penutupan karang hidup dalam program tingkat kecamatan bertambah 5 % per tahun sampai tingkat perbandingan yang dicapai dan dipelihara pada karang-karang yang dikelola dengan baik (*pristine area*);
- ii) Total pendapatan (begitu juga jumlah orangnya) yang diperoleh dari aktivitas pengganti untuk menjaga sustainabilitas karang pada program tingkat kecamatan bertambah 10 % pada akhir program (2009); dan sedikitnya 70 % dari masyarakat nelayan di kabupaten program merasakan dampak positif COREMAP, terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, Project Appraisal Document, 2004 Appendix 3:39).

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan studi ini terutama untuk mengumpulkan data-data dasar mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang, di daerah binaan Coremap, di Kabupaten Buton.

Secara rinci tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP yang meliputi kondisi geografi, sarana dan prasarana, potensi sumber daya alam khususnya sumber daya laut dan pola pemanfaatannya.
- Menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dilihat dari pendidikan dan kegiatan ekonominya, khususnya kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.
- Memotret tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan antara lain dari kepemilikan asset rumah tangga (produksi dan non-produksi), dan kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan.
- Mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat

Sasaran :

- Tersedianya data dasar tentang aspek sosial-ekonomi terumbu karang yang dapat dipakai oleh para perencana, pengelola dan pelaksana untuk merancang, melaksanakan dan memantau program COREMAP.
- Tersedianya data pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya pada awal program (TO) yang dapat dipakai untuk memantau dampak COREMAP terhadap kesejahteraan penduduk.

1.3. METODOLOGI

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan beberapa pendekatan studi yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisa data primer melalui survei lapangan maupun penggunaan data sekunder. Sedangkan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui beberapa cara seperti wawancara mendalam, kelompok diskusi terfokus (FGD) serta pengamatan aspek terkait di lapangan.

Program COREMAP Tahap II di Indonesia Timur meliputi 7 kabupaten dengan jumlah desa binaan sekitar 456 buah. Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah binaan COREMAP yang meliputi 7 kecamatan dan 28 desa binaan (masing-masing kecamatan memiliki 4 desa binaan). Kreteria daerah binaan COREMAP yang menekankan pada daerah pesisir dan kepulauan yang relatif tertinggal dan miskin, menyebabkan kondisi alam dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah binaan relatif homogen, dalam arti mayoritas penduduk mempunyai tingkat ketergantungan tinggi pada pengelolaan sumber daya laut, serta pemanfaatan terumbu karang di wilayahnya. Untuk keperluan survei diperlukan pemilihan beberapa lokasi sebagai sampel dengan memperhatikan keragaman kondisi wilayah.

Studi ini mengambil dua kecamatan sebagai sampel yang meliputi daerah pesisir (darat) yaitu Kecamatan Mawasangka dan daerah kepulauan yaitu Kecamatan Kadatua. Pertimbangan lainnya adalah kedua daerah ini relatif mudah dicapai dari Kota Bau-Bau, baik karena faktor jarak maupun akses transportasi. Pertimbangan lainnya wilayah ini merupakan rekomendasi dari pemerintah kabupaten (DKP) dan COREMAP setempat. Untuk masing-masing kecamatan dipilih 2 desa binaan COREMAP, dengan menekankan pada keragaman potensi dan kondisi ekonomi dan kegiatan ekonomi penduduk di wilayah tersebut. Di Kecamatan Kadatua dipilih Desa Wauno dan Desa Kapoa. Sedangkan untuk Kecamatan Mawasangka dipilih Desa Terapung dan Desa Wakambangura. Kondisi social ekonomi di keempat desa terpilih relatif tertinggal dan memiliki

ketergantungan tinggi pada pengelolaan SDL, Akses untuk mencapai keempat desa sampel juga relatif tersedia. Selain memusatkan survei pada keempat desa, data/informasi terkait juga diperoleh di tingkat kecamatan dan kabupaten, untuk melengkapi analisa yang lebih makro.

Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan teknik interview semi struktural menggunakan instrumen kuesioner. Pada setiap lokasi kecamatan (2 desa) dipilih 100 rumah tangga sebagai responden. Pemilihan 100 rumah tangga responden pada masing-masing lokasi kecamatan dilakukan dengan *systematic random sampling*, dengan memperhatikan proporsi penduduk pada masing-masing lokasi studi. Data/ informasi yang dikumpulkan melalui survei meliputi : profil rumah tangga (jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin, umur, pendidikan, status kerja) dan pendapatan rumah tangga dengan memperhatikan perubahan musim dan lapangan kerja yang tersedia. Wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan oleh 10 pewawancara yang berasal dari masyarakat setempat.

Data primer juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan FGD (*focus group discussion*). Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan/*stakeholder* seperti aparat dari instansi terkait (DKP), Bappeda kabupaten, staf COREMAP di kabupaten dan lokasi, tokoh formal di tingkat kecamatan dan desa, tokoh informal masyarakat, pimpinan/staf kantor kecamatan dan desa/kelurahan, nelayan, pengusaha budi daya, industri pengolahan, pedagang/pengumpul ikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan petugas koperasi

Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan menggunakan pedoman interview yang sudah disiapkan sebelumnya, dan dikembangkan di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan analisa. Panduan wawancara terdiri dari daftar data/informasi yang

penting untuk dikumpulkan berkaitan dengan topik studi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu terkait dengan topik studi, peneliti menggunakan teknik *probing* dan *snow balling* dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

Sumber utama data sekunder yang dipergunakan dalam studi ini adalah: Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2003/2004, Supas (Survei Penduduk Antar Sensus) 2005, Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan berbagai dokumen terkait yang tersedia baik di lokasi penelitian maupun lainnya. Problem utama yang ditemui di lapangan, sehubungan dengan pengumpulan data, baik di tingkat kecamatan maupun desa/ kelurahan adalah sangat minimnya data statistik terkini yang berkaitan dengan aspek yang dikaji. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kesibukan di lokasi terkait dengan pemilihan Kepala Desa, dan/atau Pilkada yang berdekatan waktunya dengan kegiatan penelitian, sehingga beberapa daerah mengalami kevakuman pimpinan pemerintahan desa dan kekacauan penyimpanan arsip.

Analisa data sekunder terutama untuk menggambarkan secara makro karakteristik sosio demografi penduduk dan juga menilai tingkat kesejahteraan penduduk, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Analisa data/informasi meliputi: profil penduduk (jumlah dan komposisi penduduk, distribusi penduduk, tingkat pendidikan, aktivitas dan status kerja penduduk), pendapatan rumah tangga, pendapatan per kapita, aset rumah tangga, kondisi perumahan, dan jumlah orang miskin.

Masalah yang dihadapi

Tidak semua responden bersedia untuk diwawancarai. Pada saat penelitian dilakukan, sering terjadi penolakan dari responden untuk diwawancarai, terutama di Kecamatan Kadatua. Pada umumnya mereka kuatir apabila hasil wawancara tersebut berdampak buruk terhadap kehidupan mereka. Bahkan Kepala Desa sempat was-was akan terjadi kerusuhan dengan berlangsungnya penelitian ini. Alasan

utama penolakan responden, karena sebelumnya bantuan-bantuan pemerintah seperti BLT (subsidi BBM), yang seharusnya diberikan pada penduduk miskin, banyak yang salah sasaran. Mereka khawatir, penelitian ini juga akan memberi dampak yang sama apabila kepala desa juga menjadi responden. Kecurigaan tersebut dapat dimengerti, karena pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dianggap mirip dengan isi kuesioner untuk pendataan sebelumnya yang digunakan untuk pemberian subsidi. Kekhawatiran lainnya adalah kekhawatiran adanya pemaksaan pada responden untuk menjadi saksi pelaksanaan program COREMAP berupa DPL (Daerah Perlindungan Laut). Hal ini dipicu oleh ketidakjelasan manfaat dari pembentukan DPL di wilayahnya, karena terbatasnya sosialisasi pada masyarakat. Isu yang beredar justru keberadaan DPL dianggap akan menyulitkan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Protes juga dilakukan beberapa orang secara langsung terhadap pewawancara dan pemandu lokal, sehingga sempat mengganggu kelancaran penelitian. Kendala di lapangan ini dapat diatasi, setelah masyarakat mendapat penjelasan bahwa penentuan DPL kelak akan dilakukan secara musyawarah sejalan dengan kepentingan masyarakat sendiri.

Penghasilan rumah tangga nelayan merupakan sentral isu dari penelitian ini. Penghasilan nelayan seperti halnya petani pada umumnya tidak menentu, tergantung musim, peralatan tangkap dan intensitas pengelolaannya. Hal ini seringkali menyulitkan para peneliti dalam memperoleh data yang akurat, baik karena sifat pekerjaannya yang non formal, maupun minimnya pengertian tentang konsep perhitungan penghasilan untuk komoditi yang non komersial, atau bersifat subsisten (hanya untuk dikonsumsi). Perbedaan persepsi dalam perhitungan penghasilan akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, sehingga menyulitkan pembuat kebijakan dalam menyusun agenda maupun berbagai program bagi komunitas nelayan tersebut.

Dalam penelitian ini, pendapatan rumah tangga merupakan kumpulan dari penghasilan semua anggota rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (kenelayanan dan non-nelayan). Secara sederhana pendapatan dihitung dari perkalian antara jumlah produksi

yang diperoleh dengan harga jual produksi tersebut, kemudian dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Permasalahan timbul karena pendapatan dari nelayan atau petani lain, tidak sama waktu/musimnya sehingga untuk memperoleh data tentang pendapatan sebulan/setahun, perlu ketelitian dalam menghitung hasil produksi dari masing-masing komoditi yang berbeda dalam periode panennya. Demikian pula persepsi sebagian nelayan yang beranggapan bahwa pendapatan merupakan hasil produksi yang dijual. Bagi masyarakat subsisten, yang hasil produksinya hanya untuk dikonsumsi sendiri, perhitungan pendapatan cenderung *under reporting*. Untuk mendapatkan perkiraan pendapatan rumah tangga yang lebih akurat, perlu ada persamaan persepsi diantara peneliti dan pewawancara yang membantu di lapangan baik dalam konsep dan cara perhitungan pendapatan terutama untuk sektor informal.

BAB II

PROFIL LOKASI COREMAP KABUPATEN BUTON

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Buton

Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Buton dan Pulau Muna, serta pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah Kabupaten Buton meliputi sebagian wilayah Pulau Muna, sebagian wilayah Pulau Buton dan sebagian lainnya berada di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Sampai dengan tahun 2003, Kabupaten Buton meliputi Pulau Wakatobi dan Pulau Buton. Sejak tahun 2004 wilayah ini mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-Bau. Setelah pemekaran wilayah, ibukota Kabupaten Buton juga dipindahkan dari Bau-Bau ke Pasar Wajo yang berjarak sekitar 50 km dari Kota Bau-Bau. Meskipun secara administrasi ibu kota Kabupaten Buton sekarang adalah Pasar Wajo, namun sebagian kantor instansi pemerintah masih berada di Kota Bau-Bau. Berdasarkan laporan Bappeda tahun 2006, setelah pemekaran wilayah, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Buton meningkat dari 14 menjadi 21 kecamatan.

Secara geografis, Kabupaten Buton terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan pada $4,96^{\circ} - 6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur antara $120,00^{\circ} - 123,34^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Buton berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Topografi Kabupaten Buton memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan 40°. Permukaan wilayah pada umumnya berbatu-batu dengan profil tanah yang agak dangkal. Wilayah pegunungan dan perbukitan terdiri dari batu kapur dan batubatuan. Apabila dilihat dari struktur batu yang berpori seperti halnya batu karang, kemungkinan daerah ini dulu merupakan dasar laut yang mengalami pergeseran permukaan bumi, sehingga dasar laut naik ke atas menjadi daratan. Jenis tanah yang berbatu, menyebabkan tumbuhan yang bisa hidup terbatas, seperti jambu mete, kelapa dalam dan kelapa hibrida. Diantara gunung dan bukit terbentang daratan yang potensial untuk pertanian pangan seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Kabupaten Buton dapat dicapai dari Kota Kendari (ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara), dengan menggunakan sarana transportasi laut, yaitu kapal motor feri atau *speed boat*. Lama perjalanan sekitar 4-5 jam dan biaya kapal atau *speed boat* sebesar Rp75.000 –100.000 (sekali jalan). Akses ke Kota Bau-Bau relatif mudah, karena setiap hari tersedia kapal feri atau *speed boat* sebanyak 2 kali (pagi dan siang). Selanjutnya dari Kota Bau-Bau ke ibukota Kabupaten Buton yaitu Pasar Wajo dapat ditempuh dengan transportasi darat sekitar satu jam, karena jaraknya yang relatif dekat (sekitar 50 km). Pada saat ini, kondisi jalan dari Kota Bau-Bau ke Pasar Wajo agak rusak sehingga dibutuhkan waktu relatif lama untuk sampai ke Pasar Wajo. Meskipun Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal, namun banyak jalan di wilayah ini yang belum tersentuh oleh aspal. Selama ini masyarakat lebih mengandalkan sarana transportasi laut daripada darat. Perbaikan infrastruktur jalan darat baru menjadi program pembangunan Kabupaten Buton pada tahun 2007, setelah pemekaran wilayah.

Kabupaten Buton merupakan daerah dengan iklim tropis karena terletak di sekitar garis khatulistiwa. Kondisi iklim ditandai dengan suhu sangat panas di siang hari dan curah hujan yang cukup tinggi. Iklim ini dipengaruhi oleh angin Barat yang terjadi pada bulan

Desember sampai April, dengan curah hujan tinggi (musim hujan), ombak besar disertai angin kencang. Pada musim ini angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik yang banyak mengandung uap air. Sementara musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai September, di mana angin Timur bertiup dari Benua Australia, sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Pada bulan April-Mei arah angin dan curah hujan tidak menentu, sehingga dikenal sebagai musim Pancaroba. Perbedaan musim berpengaruh pada kegiatan kenelayanan yaitu adanya perubahan wilayah tangkap. Pada musim Barat nelayan menangkap di bagian Timur Pulau Buton dan pada musim Timur nelayan menangkap ikan di sebelah Barat pulau Muna. Pola penangkapan seperti ini kemungkinan dilakukan oleh nelayan yang memiliki armada tangkap dengan kapasitas besar, seperti kapal motor 20 GT ke atas.

Sejak tahun 2004 Kabupaten Buton merupakan salah satu dari wilayah binaan COREMAP Tahap II, yang pendanaannya dilakukan oleh World Bank. Program COREMAP Tahap 1 untuk Kabupaten Buton dilakukan pada tahun 2003, oleh ADB-MCRMP dengan daerah binaan adalah Kecamatan Lakudo. Sejalan dengan kondisi geografis Kabupaten Buton yang terdiri dari Kawasan Barat dan Kawasan Timur, penentuan daerah binaan COREMAP II juga mencakup kedua kawasan tersebut, yaitu 7 kecamatan yang terdiri dari 5 kecamatan di Kawasan Barat dan 2 kecamatan di Kawasan Timur. Untuk setiap kecamatan ditentukan empat desa binaan COREMAP, sehingga jumlah semua daerah binaan menjadi 28 desa. Daerah binaan ditentukan dengan menekankan pada daerah tertinggal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Kondisi daerah kepulauan pada umumnya lebih tertinggal dibandingkan daerah pesisir. Daerah binaan COREMAP II di Kabupaten Buton mencakup 5 kecamatan di daerah pesisir (daratan) dan 2 kecamatan di daerah kepulauan. Daftar nama ketujuh wilayah kecamatan dan 28 desa binaan COREMAP II seperti dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar Nama Kecamatan dan Desa Binaan COREMAP II di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
A	Kawasan Barat:		
1.	Kecamatan Mawasangka	1. Terapung 2. wakambangura 3. Kacebung 4. Gumanano	Daerah pesisir
2.	Kecamatan Talaga Raya	5. Talaga Besar 6 Talaga I 7. Talaga II 8. Kokoe	Daerah Kepulauan
3	Kecamatan Kadatua	9 Waonu 10. Kapoa 11. Uwemasi 12. Kaofe	Daerah Kepulauan
4	Kecamatan Siompu	13. Tongali 14. Wakinamboro 15. Biwinapada 16. Kaimbulawa	Daerah Kepulauan
5	Kecamatan Batu Atas	17. Batu Atas Timur 18. Batu Atas Barat 19. Tolanda Jaya 20. Wacoala	Daerah Kepulauan
B	Kawasan Timur		
6	Kecamatan Wabula	21. Wabula 22. Wasampela 23. Holimombo 24. Wasuemba	Daerah pesisir
7	Kec. Lasalimu Selatan	25. Umalaogi 26 Kumbewaha 27. Sampuabalo 28. Lasalimu Pantai	Daerah Pesisir

Sebelum dilaksanakannya program COREMAP di wilayah tersebut, biasa dilakukan praktek penangkapan ikan karang yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan redi di Desa Kacebungi dan Gumanano di Kecamatan Mawasangka (salah satu lokasi kajian). Namun kini banyak informan yang mengungkapkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sudah jarang terjadi di kedua desa tersebut. Namun demikian praktek pemboman karang masih terjadi di daerah yang bukan binaan COREMAP yaitu Kelurahan Watolo. Kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang masih relatif kuat di Kecamatan Wabula (salah satu daerah binaan) yang lokasinya sekitar 50 km dari Bau-Bau.

Pelaksanaan program COREMAP II di daerah binaan Kabupaten Buton baru dilakukan pada tahun 2005, sehingga masih dalam tahap pengembangan kelembagaan, dan belum banyak dilakukan untuk masyarakat. Namun sejak 2003, DKP telah membentuk SISWASMAS (Sistim Pengawasan Masyarakat), dengan melibatkan masyarakat yang mempunyai usaha budi daya dalam pengawasan terumbu karang. Untuk keperluan operasional pengawasan, SISWASMAS memperoleh bantuan motor. Masyarakat yang memiliki usaha budi daya berkepentingan untuk ikut mengawasi keselamatan ikan-ikan yang dipelihara dari praktek penangkapan ikan dengan pembiusan dan pengeboman. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut, sekaligus untuk menjaga terumbu karang dari pengrusakan yang berkelanjutan. Menurunnya potensi ikan karang, disebabkan banyak karang di daerah ini yang sudah rusak. Usaha budi daya diharapkan mampu melindungi terumbu karang secara langsung maupun tidak dari praktek penangkapan iakn yang merusak. Praktek yang merusak terumbu karang banyak dilakukan oleh kapal-kapal besar yang menangkap ikan karang dalam jumlah besar, untuk mencapai target ekspor. Praktek yang merusak karang ini dilakukan oleh nelayan yang sudah terlatih melakukan pembiusan dengan dukungan sponsor potasium.

Pada saat penelitian tahun 2006, program COREMAP di lokasi binaan antara lain membantu masyarakat menyiapkan zona larangan penangkapan ikan yang kemudian diperkuat oleh Peraturan

Desa (Perdes). Hal ini disebabkan kearifan lokal seperti *sasi* yang dikelola oleh *parabela* (tokoh adat) sudah mulai pudar di banyak daerah. Mobilisasi masyarakat yang tinggi, menyebabkan kesepakatan tersebut sulit dilakukan dan mudah dianulir. Banyak kegiatan telah dilakukan COREMAP di lokasi binaan, antara lain membantu masyarakat untuk menyiapkan zona konservasi dan Perdes pendukung (1tahun). Pelaksanaan program banyak menghadapi kendala, antar lain: banyaknya program COREMAP yang tumpang tindih dan sistim birokrasi yang kurang fleksibel. Akibatnya tingkat penyerapan dana untuk melakukan aksi relatif rendah (baru mencapai 13 %).

Banyak program yang menggunakan dana bergulir untuk masyarakat di Kabupaten Buton cenderung gagal, karena tidak selamanya penerima dana bergulir tinggal di desa binaan, sehingga pengembalian uang sulit diperoleh. Banyak nelayan yang mobilitasnya tinggi, dan tinggal berbulan-bulan di rantau, sehingga sulit untuk terlibat dalam berbagai program COREMAP. Untuk mengatasi masalah tersebut, para pengurus COREMAP Tahap II umumnya dipilih dari Pegawai Negeri (PNS), sehingga diharapkan dapat lebih fokus dalam mengelola program COREMAP di wilayah binaan.

Struktur organisasi COREMAP di Kabupaten Buton di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari PNS yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Bappeda
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Tata Ruang
6. Perguruan Tinggi
7. LSM

Hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan oleh COREMAP untuk semua desa binaan pada tahun 2005, menyimpulkan adanya isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan SDL antara lain:

- Penangkapan ikan karang dengan pemboman masih banyak dipraktikkan oleh nelayan.
- Praktek pembiusan tetap dilakukan nelayan dengan sponsor dari perusahaan penampung ikan besar di luar lokasi.
- Zone larangan penangkapan ikan dilakukan dengan zone menurut Perdes dan zone provinsi
- Ketergantungan nelayan pada penampung ikan lokal tinggi, karena mata rantai pemasaran yang dianggap sering merugikan nelayan
- Adanya potensi konflik antara nelayan lokal dan andon (nelayan pendatang)
- Mobilitas nelayan ke luar daerah/luar negeri tinggi karena tersedianya alternatif pekerjaan.(berdagang, buruh) di luar daerahnya sendiri.
- Program COREMAP yang menyediakan dana bergulir banyak mengalami kegagalan, karena nelayan di lokasi tempat tinggalnya sering absen di lokasi.

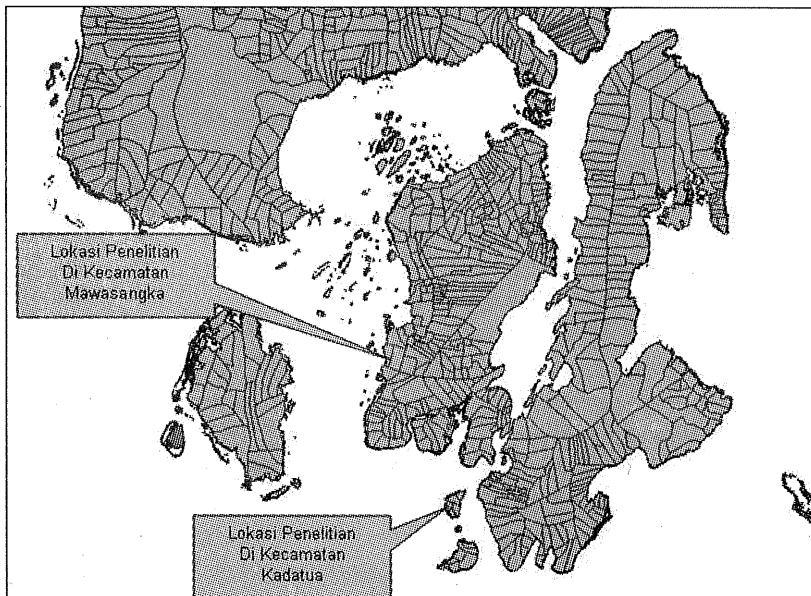
Survei Data Dasar Sosial Ekonomi Terumbu Karang untuk wilayah Kabupaten Buton ini dilakukan oleh PPK-LIPI di dua kecamatan binaan COREMAP, yaitu Kecamatan Mawasangka (wilayah daratan) dan Kecamatan Kadatua (wilayah kepulauan). Untuk masing-masing kecamatan, survei lapangan difokuskan pada dua desa binaan.yaitu: Desa Terapung dan Wakambangura di Kecamatan Mawasangka, Desa Wauno dan Desa Kapoa di Kecamatan Kadatua. Di Kecamatan Mawasangka terdapat 4 desa binaan dari 13, sedangkan di Kecamatan Kadatua, terdapat 4 dari 6 desa binaan.

Kecamatan Kadatua terletak sekitar 40 mil dari Bau-Bau, atau sekitar 15 menit perjalanan dengan transportasi laut. Wilayah Kecamatan Kadatua merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Batauga pada tahun 2000. Namun pengaturan wilayah laut baru

dilakukan setelah otonomi daerah, dengan dukungan peraturan desa (perdes). Para nelayan di Kadatua mempunyai kebiasaan merantau untuk berdagang, sehingga aktivitas kenelayanan hanya dilakukan apabila sedang berada di lokasi. Antara Pulau Kadatua dan Pulau Siampu terdapat pulau kecil yang tidak berpenghuni yaitu Pulau Liwotokidi (Pulau Ular) yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata.

Gambar 2.1.

**LOKASI PENELITIAN COREMAP
DI KABUPATEN BUTON**



Sumber: Survei Data Dasar Ekologi Terumbu Karang, COREMAP, 2005.

Kecamatan Mawasangka

Kecamatan Mawasangka terletak di Kawasan Barat Kabupaten Buton, tepatnya berada di sebelah barat daya Pulau Muna. Secara geografis terletak diantara $5^{\circ}29'$ - $5^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ}14'$ - $122^{\circ}38'$ Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Selat Spelman di sebelah selatan, Kabupaten Muna di sebelah utara, Kecamatan Lakudo di sebelah timur dan Laut Flores di sebelah barat. Luas wilayah Kecamatan Mawasangka sekitar 421,77 km² dan sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan beberapa pulau kecil yang berada di sepanjang garis pantai.

Secara administratif, Kecamatan Mawasangka terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Mawasangka dan Watolo, serta 14 desa yaitu Desa Balobone, Napa, Wakambangura, Kancebumi, Gumanano, Oengkolali, Banga, Tanailandu, Polindu, Kanapa Napa, Terapung, Wasilomata I, Wasilomata II dan Desa Matara. Sebagian besar desa tersebut terletak di sepanjang garis pantai membujur dari utara (Desa Terapung) ke selatan (Desa Gumanano). Diantara desa-desa tersebut terdapat 4 desa yang menjadi daerah binaan COREMAP II, yaitu Desa Terapung, Kancebumi, Wakambangura dan Gumanano.

Topografi kecamatan terdiri dari daratan berpasir, dataran tinggi dan bukit berbatu. Jenis tanah yang kurang subur menyebabkan hanya terdapat jenis tanaman tertentu seperti jambu mete, coklat, kelapa, jagung, kacang, ubi. Selain hasil utama dari laut, jenis tanaman tersebut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat lainnya.

Sejak tahun 2003, Kecamatan Mawasangka mengalami pemekaran menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Timur dan Mawasangka Tengah. Akses ke lokasi kecamatan relatif mudah, karena tersedia sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar yaitu transportasi darat dan laut. Kecamatan Mawasangka lebih mudah dicapai melalui Pelabuhan Batulo di Kota Bau-Bau ke Pelabuhan Wamengkoli selama 15 menit dengan kapal feri yang tersedia setiap setengah jam dan sampai jam 7 malam. Sedangkan perjalanan dari pelabuhan Wamengkoli ke

Kecamatan Mawasangka sekitar 2 jam dengan transportasi darat yang tersedia secara reguler setiap hari.

Perbedaan musim antara angin timur dan angin barat mempengaruhi kegiatan kenelayanan di daerah ini. Selain mempengaruhi wilayah tangkap, perbedaan musim juga berpengaruh pada jenis alat tangkap. Pada musim timur (musim gelombang lemah), nelayan menangkap ikan (dengan alat tangkap bagan, pancing atau bubu) ke wilayah yang agak jauh ke tengah laut, dan usaha budi daya rumput laut dilakukan di sekitar pantai. Pada musim barat (musim angin kencang), banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing. Biasanya pada musim barat, alat tangkap bagan dimasukkan ke 'dok' untuk perbaikan kerusakan jaring dan kapal. Nelayan biasanya beralih ke alat tangkap pancing atau bubu, atau beralih pekerjaan ke sektor pertanian. Begitu juga petani budi daya rumput laut pada musim Barat beralih untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat pancing atau bekerja di sektor pertanian.

Kecamatan Kadatua

Menurut sejarah lisan yang dituturkan turun temurun, orang pertama yang menghuni Pulau Kadatua ini adalah 'Ratu Pogo' yang merupakan istri dari Raja Buton yang *petilasannya* terdapat di Desa Uwemaasi, beserta sejumlah pengikutnya. Ketika berlayar dan menemukan pulau itu, seorang pengikutnya turun dan berjalan serta mengamati sekeliling. Dia melihat ada ubi kayu di mana-mana, yang menandakan bahwa wilayah tersebut dapat menyediakan makanan untuk keperluan hidup. Setelah kembali ke kapal dia mengabarkan kondisi ini pada ratu dan penumpang kapal lainnya, sehingga Ratu dan pengikutnya memutuskan untuk turun dan berdiam di pulau ini.

Di wilayah ini terdapat gua kecil yang menurut sejarahnya merupakan tempat bermukim sang Ratu dan kini masih terlihat bekas batu yang menjadi bantal tidurnya. Desa-desa lainnya juga mempunyai sejarah lokal yang diketahui penduduk secara turun

temurun. Misalnya Desa Waonu (salah satu desa sampel), yang menurut ceritanya merupakan penampakan seorang wanita unik, sedangkan Desa Uwemaasi berasal dari cerita tentang adanya air tanah yang terus memancar seperti emas dan tidak pernah kering sampai sekarang. Di wilayah ini, sebagaimana di daerah lainnya di Kabupaten Buton terdapat 2 musim, yakni musim penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan November-Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei – Oktober. Masa pancaroba terjadi sekitar bulan April. Periode ini juga mempengaruhi aktivitas di laut dengan musim timur, musim barat dan pancaroba yang datang bersamaan dengan musim-musim tersebut. Beberapa penduduk menyebutkan bahwa sekarang datangnya musim tidak menentu. Kadang musim hujan berlangsung lama dan tidak jarang pula musim kemarau berlangsung lebih panjang dari semestinya. Hal yang sama terjadi pada musim di laut, periode angin timur, pancaroba dan angin barat kini tidak menentu atau berubah-ubah baik waktu maupun lamanya.

Kondisi oseanografis desa-desa di kecamatan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan Laut Flores, yang saat musim barat perairannya dipenuhi oleh ombak dan arus yang cukup besar, sedangkan pada musim timur kondisi perairan relatif agak tenang. Pada masa pancaroba dan musim barat biasanya perairan tidak begitu ramah untuk penangkapan ikan, sehingga lokasi penangkapan ikan berada di dekat pantai.

Secara bioekologis perairan Kecamatan Kadatua didominasi oleh dua ekosistem, yakni ekosistem pasir dan terumbu karang, dan di sebagian perairan desa terdapat padang lamunnya. Pada kedua ekosistem ini hidup beragam jenis biota. Pada ekosistem pasir, didominasi oleh berbagai jenis *moluska*, *echinodermata* dan *bivalva* berukuran kecil (antara lain kepiting, teripang, udang-udangan, dan pari). Ekosistem terumbu karang sangat kaya dengan berbagai jenis ikan maupun biota laut lainnya. Terumbu karang yang terdapat di wilayah Kabupaten Buton berbeda dengan di Kaledupa, karena lokasi terumbu karang di lokasi ini relatif dekat (kurang dari 4 mil). Menurut beberapa informan kondisi terumbu karang di perairan ini

rusak berat, akibat penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan dan obat bius yang merusak terumbu karang (Brandt, 1984; LSM Prisma-COREMAP, 2006, Monintja, 2000 dan 2001, Pet-Saode,1998).

Wilayah daratan pulau ini terdiri dari dua area, yakni wilayah yang landai di dekat pantai dan wilayah perbukitan yang agak jauh dari pantai. Perumahan lebih banyak dijumpai di wilayah pantai, dan di wilayah perbukitan banyak dijumpai tanaman pertanian seperti ubi kayu, ubi jalar, pisang, jambu mete dan jagung. Jalan raya yang lokasinya di sepanjang daerah landai dekat pantai, setiap hari dilewati kendaraan roda dua dan roda empat. Jalan yang umumnya berpasir menyebabkan setiap kendaraan yang lewat banyak menghamburkan debu. Tanaman kelapa banyak terdapat di kedua wilayah pulau. Kepiting kenari banyak ditemukan di beberapa desa, biasa dikonsumsi karena rasanya gurih, dan sekaligus menangani hama kelapa.

Secara geografis Kecamatan Kadatua terletak di bagian barat Pulau Buton, antara 5,29⁰ Lintang Selatan – 5,59⁰ Lintang Selatan dan 122,14 Bujur Timur – 122,38 Bujur Timur. Kecamatan ini di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Siompu, di sebelah timurnya adalah Selat Masiri dan sebelah barat berbatasan juga dengan Laut Flores.

Kecamatan ini meliputi Pulau Kadatua dan sebagian Pulau Liwutongkidi, yang terdiri dari 6 desa. Desa terluas adalah Desa Lipu (7,08 km²), dan desa tersempit adalah Desa Kaofe (1,39 km²). Desa –desa lainnya adalah Desa Kapoa (seluas 4,91 km) Desa Banabungi (seluas 4,13 km²), Desa Waonu (seluas 3,26 km²) dan Desa Uwemaasi (seluas 2,9 km²) Desa yang paling dekat dengan Bau-bau (ibukota kabupaten) adalah Desa Banabungi (sekitar 43 km), sedangkan desa yang paling jauh adalah Desa Kapoa (56 km). Kedekatan jarak dengan kota kabupaten mempengaruhi aktivitas perekonomian, karena semakin jauh dari pusat perekonomian,

semakin subsisten kehidupan masyarakatnya, karena menghadapi kesulitan dalam pemasaran hasil produksi.

Desa-desanya di Kecamatan Kadatua dapat dijangkau dengan menumpang perahu motor dari Pelabuhan Topa di Kota Bau-bau, dengan jarak tempuh dari kota ke Desa Banabungi sekitar setengah jam. Perjalanan ke desa-desa lainnya dengan menggunakan angkutan desa atau Ojek (sepeda motor). Jalan yang membelah sepanjang Pulau Kadatua di mulai dari Desa Banabungi hingga desa terujung yaitu Desa Kapoa. Jalan tersebut berupa jalanan aspal, semen maupun sekadar pengerasan tanah bercampur bebatuan, yang kondisinya pada saat penelitian sudah banyak yang mengalami kerusakan. Angkutan desa juga harus menempuh tanjakan yang tinggi, sehingga diperlukan waktu sekitar satu jam untuk menempuh jalan dari Desa Banabungi ke Desa Kapoa. Tidak jarang angdes tidak kuat menanjak, sehingga harus dilakukan berkali-kali.

2.2. KONDISI SUMBER DAYA ALAM

2.2.1. Kabupaten Buton

Kabupaten Buton mengalami pemekaran tahun 2003 menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi. Direncanakan pada tahun 2007 daerah ini akan dikembangkan menjadi Provinsi Buton Raya yang meliputi 5 kabupaten, yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara dan Kotamadya Bau-bau. Diharapkan pada tahun 2011 provinsi ini sudah terwujud dan berfungsi dengan baik.

Lebih dari separuh penduduk Kabupaten Buton tinggal di daerah pesisir. Hal ini disebabkan wilayah pesisir relatif lebih kaya dengan sumber daya alam jika dibandingkan dengan areal perbukitan. Wilayah ini juga lebih mudah dicapai, sehingga banyak orang lebih suka tinggal di daerah pesisir. Ironisnya, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah itu cenderung dikategorikan miskin. Padahal

apabila sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, potensial dapat meningkatkan produksi, dan dapat berimplikasi meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pemanfaatan ini harus berkelanjutan sehingga tidak terjadi eksploitasi habis-habisan yang hanya memberi keuntungan banyak dalam waktu singkat, tetapi berakibat kerusakan SDA dalam jangka panjang (Hidayati, 2000).

Gambaran umum wilayah Kabupaten Buton yang baru adalah cenderung memiliki tanah yang gersang, miskin unsur hara, berkapur dan berbatu-batu. Dengan sumber air yang sangat sedikit, tanaman yang tumbuh juga sangat terbatas, sehingga sering dikatakan ‘bertani di atas batu’. Hasil pertanian kebun-kebun penduduk terbatas jenisnya, antara lain jambu mete, coklat, lada, jahe, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Daerah persawahan terdapat di wilayah Kapontori yang memiliki banyak sumber air.

Produksi tanaman jambu mete sebenarnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi produksinya masih terbatas dan penduduk masih kesulitan untuk pemasaran, karena transportasi dan permainan harga dari pedagang. Sampai sekarang hasil pertanian tidak bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan andalan dari daerah Buton. Rencananya kawasan timur kabupaten ini akan dikembangkan menjadi daerah pertanian, karena wilayahnya relatif lebih subur dibandingkan wilayah lainnya dan terdapat sumber mata air yang cukup. Hasil lain seperti bambu dan kayu sengon dimanfaatkan penduduk untuk bangunan rumah, khususnya rumah panggung. Sampai saat penelitian, hasil tanaman penduduk lebih banyak digunakan untuk keperluan sendiri (subsisten) atau dijual di dalam desa dengan harga yang relatif murah.

Potensi SDA andalan di Kabupaten Buton adalah pertambangan dan perikanan. Pertambangan masih terbatas pada aspal Buton yang dikenal berkualitas tinggi dan lebih baik mutunya dibandingkan aspal drum. Areal tambang aspal ini terletak di daerah selatan Pulau Buton yaitu di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Kecamatan Sampolawa. Sampai sekarang pengelolaan aspal baru mencapai 10 persen. Prioritas pembangunan Kabupaten Buton ke

depan adalah sektor Perikanan, pariwisata dan membuka isolasi daerah-daerah tertinggal.

Pembangunan sektor pariwisata dengan membuka lokasi wisata baru di Pulau Liwutongkidi (Kecamatan Kadatua) dan hutan Lambusango. Direncanakan Pulau Liwutongkidi sebagai andalan pariwisata bahari di wilayah ini, karena lautnya jernih, terumbu karangnya indah, kaya ikan-ikan hias dan terdapat sumber air tawar. Di pulau tersebut juga banyak dijumpai pohon kelapa dan tanaman bunga-bunga, meskipun banyak kebun bunga yang sudah dibakar penduduk lokal. Alasan pembakaran tersebut tidak jelas sampai sekarang, tetapi diduga rencana pembangunan pariwisata di pulau itu kurang disukai sebagian penduduk.

Secara geografis potensi ekonomi terbesar di Kabupaten Buton adalah sektor kelautan, karena sekitar 82 persen wilayah ini adalah lautan. Jika musim timur, angin dari Laut Banda sangat kencang dan mengganggu kegiatan nelayan mencari ikan, sehingga nelayan mencari ikan ke perairan sebelah barat Pulau Buton. Begitu pula sebaliknya, jika musim barat, nelayan mencari ikan di perairan sebelah timur Pulau Buton. Jenis ikan yang menjadi target (*fish-target*) pada kedua musim itu sama saja yakni ikan Tuna dan ikan-ikan karang.

Alat tangkap yang dipakai nelayan masih terbatas seperti pancing ulur, bubu, gillnet, panah, pukat cincin dengan tambahan rumpon untuk mengumpulkan ikan. Jenis-jenis ikan komersial yang ditangkap adalah ikan Layang, ikan Tongkol dan ikan Tuna. Adapun ikan karang yang menjadi sasaran adalah ikan Kerapu, ikan Sunu dan Lobster. Jenis ikan lainnya yang biasa ditangkap penduduk adalah ikan Cakalang, ikan Teri Nasi. Pusat penangkapan ikan Teri Nasi di Kecamatan Mawasangka, ikan Layang di Kecamatan Kadatua. Sedangkan jenis ikan ekspor yang masih gencar dicari adalah ikan Kayu dan ikan Teri Nasi. Hasilnya ditampung oleh PT Teriku di Pasar Wajo yang mempunyai fasilitas *cold storage*. Pengolahan ikan Kayu dilakukan di daerah Topa, Sulaa dan Bau-bau. Adapun fasilitas TPI di Kabupaten Buton masih terbatas di Pasar Wajo dan Kamaro.

Produksi ikan-ikan karang tahun-tahun terakhir ini menurun, akibat praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan selama bertahun-tahun khususnya penggunaan bom ikan dan bias.

Terumbu karang di perairan kabupaten ini sudah banyak yang rusak akibat pemakaian alat tangkap i perusak tersebut. Sebagian besar terumbu karang yang masih bagus berwarna putih, yang menurut penduduk akibat terserang 'penyakit putih'. Semenjak tahun 2003 sudah dibentuk sistim pengawasan masyarakat per desa, dengan bantuan perahu motor dan pengurusnya terdiri dari anggota masyarakat yang mempunyai usaha budi daya rumput laut. Terumbu karang di perairan Buton berada relatif dekat dari pantai yaitu sekitar 4 mil, berbeda dengan terumbu karang di perairan Kaledupa dan tempat lain di Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang letaknya agak jauh dari pantai.

Kini banyak desa binaan Coremap yang membentuk daerah perlindungan laut (DPL) dan didukung dengan Peraturan Desa (Perdes). Rata-rata satu desa binaan Coremap diharapkan memiliki 1 atau 2 DPL. Penyusunan DPL dan pembuatan Peraturan Desa dilakukan oleh masyarakat setempat dan disahkan oleh pihak kabupaten. Dari hasil penelitian ini diketahui pihak aparat desa yang melakukan pengukuran daerah perlindungan laut tanpa diiringi dengan sosialisasi yang cukup pada masyarakat, tidak jarang menimbulkan masalah kerentanan bahkan berpotensi terjadi konflik dalam masyarakat.

Menurut keterangan ketua Bappeda kabupaten Buton, sumber daya laut lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat dibandingkan pendatang. Nelayan pendatang, khususnya nelayan *andon* dengan kapal di atas 10 GT, hanya diizinkan mencari ikan di wilayah provinsi, namun pelanggaran masih sering terjadi. Usaha untuk mengurangi beban pemanfaatan sumber daya laut sudah dilakukan dengan mengembangkan budi daya rumput laut, mutiara, ikan Kerapu. Sekarang pengembangan secara intensif juga dilakukan di Teluk Lasongko yaitu untuk budi daya rumput laut dan kepiting.

2.2.2. Kecamatan Mawasangka

Sumber Daya Laut

Wilayah laut di sekitar Kecamatan Mawasangka memiliki potensi Sumber Daya Laut (SDL) yang cukup besar, meliputi berbagai jenis ikan, biota laut dan rumput laut. Hal ini didukung oleh adanya gugusan terumbu karang yang membujur di sepanjang garis pantai. Di Desa Wakambangur terumbu karang membujur di sepanjang pantai dan menurut masyarakat setempat merupakan karang terpanjang di Kabupaten Buton. Terumbu karang juga terdapat di sekitar pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perairan Kecamatan Mawasangka. Keberadaan terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan karang, seperti ikan kerapu, ikan sunu dan sebagainya, dapat menambah jumlah dan jenis ikan karang yang hidup di laut.

Potensi SDL dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharaan. Jenis-jenis ikan yang di hasilkan nelayan antara lain ikan tongkol, cakalang, baronang, bobara, teri, kakap. Jenis biota laut lainnya yang dimanfaatkan adalah kepiting, cumu-cumi, teripang, bulu babi, siput laut, bintang laut, dan kerang laut. Ikan teri adalah jenis ikan yang cukup menonjol dihasilkan wilayah Kecamatan Mawasangka. Pada tahun 2005, jumlah hasil tangkapan ikan teri di Kecamatan Mawasangka sekitar 6.037,20 ton atau 56 % dari hasil tangkapan laut lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2005). Hasil tangkapan Ikan teri oleh nelayan langsung diolah dengan cara pengasinan dan pengeringan. Sistem pemasaran yang cukup mapan menjadikan ikan teri sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Jenis ikan pelagis seperti ikan cakalang, ikan tongkol dan ikan karang mati juga merupakan hasil tangkapan nelayan yang banyak dijual di pasar lokal desa atau langsung ke masyarakat sekitar. Hasil tangkapan lainnya yang cukup banyak dihasilkan di wilayah ini adalah Kepiting, di samping ikan tongkol, tuna, dan cakalang.

Rumput laut adalah hasil laut yang cukup potensial di Kecamatan Mawasangka. Budi daya rumput laut di kecamatan ini paling besar dibandingkan kecamatan lainnya, dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting penduduk di wilayah ini . Pada tahun 2005, jumlah produksi rumput laut di Kecamatan Mawasangka sebesar 4.072,2 ton atau sekitar 27% dari total produksi rumput laut di Kabupaten Buton (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006). Hampir di semua desa di Kecamatan Mawasangka terdapat budi daya rumput laut, yaitu Desa Terapung, Kanapanapa, Tanailanda, Banga, Oengkolali, Mawasangka, Watolo, Napa, Wakambangura, Kancebumi dan Gumanano. Kondisi pantai dengan kemiringannya dan arus air di sekitar pantai sangat cocok untuk budi daya rumput laut. Desa Wakambangura merupakan wilayah yang paling luas memiliki areal budi daya rumput laut yaitu sekitar 145,9 Ha.. Potensi rumput laut ini didukung oleh pemasaran yang cukup bagus yang dilakukan oleh para pengumpul rumput laut di tingkat desa.

Sumber Daya Darat

Potensi sumber daya darat yang dapat dikembangkan di Kecamatan Mawasangka adalah perkebunan dan ladang dengan penggunaan lahan seluas 42.177 Ha. Kondisi lahan yang relatif kurang subur (sebagian lahan berbatu-batu) menyebabkan jenis tanaman yang dapat tumbuh terbatas, yaitu tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan masyarakat adalah tanaman keras, seperti: jambu mete, kelapa, coklat. Sedangkan jenis tanaman pangan yang ditanam petani antara lain ubi kayu, ubi jalar, jagung dan pisang. Ubi kayu merupakan hasil tanaman pangan yang paling besar, diikuti jagung. Sebagian besar hasil ubi kayu dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri yaitu sebagai bahan pembuat Kaswami sebagai makanan pokok orang Buton. Kaswami terdiri dari campuran ubi kayu dan kelapa yang berfungsi sebagai pengganti nasi. Hasil perkebunan seperti jambu mete, kelapa, coklat biasanya dijual sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Kabupaten Buton khususnya Kecamatan Mawasangka terkenal

sebagai penghasil jambu mete yang penjualannya telah meluas sampai keluar provinsi dengan harga yang cukup bersaing. Selain sebagai sumber pendapatan, potensi jambu mete juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, terutama perempuan.

2.2.3. Kecamatan Kadatua

Sumber Daya Laut

Kecamatan Kadatua merupakan wilayah di Kabupaten Buton yang dianggap miskin sumber daya alam. Kemiskinan SDA ini sering dikemukakan sebagai faktor utama penyebab pembangunan wilayah ini tertinggal, penduduknya miskin dan pendidikan tertinggal. Sebagian tanahnya berupa bebatuan dan berkapur, air bersih sulit diperoleh, dan hasil laut relatif kurang. Sumber daya alamnya (SDA) meliputi sumber daya laut (SDL) dan sumber daya darat. Sejak dulu menangkap ikan dilakukan oleh sebagian penduduk terutama untuk keperluan konsumsi, bukan sebagai usaha komersial. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dan akses pasar yang terbatas merupakan faktor yang menyebabkan hasil produksi ikan terbatas dan lebih merupakan komoditi subsistensi daripada untuk komoditi komersial. Jenis komoditi laut yang banyak ditangkap nelayan antara lain ikan lola, teripang, dan japing. Tahun 1980-an di perairan Desa Waonu pernah dilakukan 'sasi' untuk ketiga jenis produk kelautan, yakni teripang, lola dan japing-japing. Setelah diadakan sasi, nelayan dari luar yang mau menangkap ketiga jenis produk SDL tersebut harus membayar sejumlah uang, yang digunakan untuk pembangunan fasilitas desa seperti masjid dan balai desa. Sementara dari hasil wawancara dengan beberapa informan penggunaan uangnya tidak jelas. Hal ini menimbulkan kerentanan hubungan antara penduduk dengan aparat pemerintahan desa, dan Ketidakpercayaan masyarakat juga berdampak terhadap berbagai program pembangunan di wilayah ini.

Penggunaan bom ikan oleh sebagian nelayan dapat menghasilkan berbagai jenis ikan dalam jumlah banyak, tetapi mereka melakukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 'Penggunaan bom ikan lebih dimaksudkan sebagai suatu hiburan (*exciting*), 'serupa kalau kita menyulut mercon', ujar seorang nelayan dari Desa Waonu. Harga ikan relatif rendah di wilayah kecamatan ini, sehingga tidak menjadi target utama bagi nelayan.

Beberapa tahun terakhir usaha penangkapan ikan mulai berkembang, terutama dengan adanya *redi* (pukat cincin). Akan tetapi diperlukan investasi yang relatif besar (lebih dari Rp100 juta) untuk usaha kenelayanan ini, sehingga menyulitkan nelayan. Akibatnya usaha kenelayanan ini hanya berkembang di Desa Banabungi, yang lokasinya paling dekat dengan kota di Kabupaten Buton. Kendala utama adalah pemasaran ikan yang masih terbatas, dan memerlukan biaya yang relatif tinggi untuk dijual ke kota. Keberadaan pukat cincin (*redi*) memungkinkan nelayan menangkap ikan sebanyak-banyaknya, tetapi pemasaran merupakan kendala utama. Akibatnya banyak dijumpai ikan yang membusuk, terutama pada masa panen ikan di Desa Banabungi, karena tidak ada penampung lagi yang bersedia memasarkan.

Kini banyak penduduk terutama laki-laki yang memanfaatkan pantai untuk mencari bulu babi, gurita, kerang-kerangan serta usaha rumput laut yang kesemuanya merupakan usaha di area pantai. Sedangkan jenis Ikan yang menjadi target tangkapan utama adalah ikan pelagis, jenis ikan yang berada di area terumbu karang, khususnya ikan Layang dan ikan Tongkol. Banyak jenis ikan lainnya yang tertangkap dibuang begitu saja (*by-catch*), karena tidak ada nilai komersialnya.. Potensi hasil laut yang bernilai komersial cukup banyak, tetapi belum diupayakan oleh penduduk. Pada umumnya karena faktor ketidaktahuan, sehingga apabila ikan tersebut tertangkap, dibuang kembali ke laut (Monintja,2001). Sebagai contoh jenis ikan Pari yang banyak terdapat di perairan Kadatua, a Apabila ikan tersebut ikut tertangkap di jaring nelayan, biasanya dibuang, saat penyortiran ikan (*discards*). Saat penelitian dilakukan, beberapa bangkai ikan Pari dibiarkan membusuk di tepi pantai.

Pada saat ini kondisi SDL menurun, jumlah populasi ikan berkurang. Sejak tahun 1950-an kondisi terumbu karang semakin rusak akibat penggunaan alat tangkap yang destruktif dan berkurangnya mangrove yang melindungi pulau dari abrasi ombak. Contoh yang menarik adalah Pulau Liwutongkidi yang semakin mengecil areanya, akibat batas pantai pulau yang semakin masuk ke daratan pulau.. Jenis ikan komersial seperti ikan Kerapu semakin sulit diperoleh dan cenderung semakin langka. Pada tahun 1990-an ikan Kerapu masih menjadi primadona ikan komersial yang diburu nelayan, karena laku dipasaran. Permainan harga yang dilakukan pedagang pengumpul sangat merugikan nelayan. Akibatnya banyak praktek *over fishing* ikan Kerapu, sehingga dampaknya terasa sekarang yaitu ikan kerapu semakin sulit diperoleh.

Pada musim angin kencang dan gelombang kuat ikan sulit diperoleh. Pada musim ini hasil utama adalah ikan Pogo yang digunakan sebagai lauk pauk penduduk. Di samping kerang-kerangan dan Bulu Babi. Sebaliknya pada musim angin tenang merupakan musim panen ikan, karena banyak ikan yang dapat diperoleh nelayan. Musim pancaroba yaitu antara musim gelombang kuat dan gelombang tenang, hasil tangkapan ikan masih relatif banyak jumlahnya. Faktor utama berkurangnya ikan pada musim gelombang kuat adalah kebanyakan nelayan hanya memiliki sarana tangkap sederhana yaitu sampan tidak bermotor yang terbatas daya jangkanya di laut. Kebanyakan nelayan juga bekerja sendirian, sehingga terbatas kemampuannya untuk menangkap ikan.

Kondisi laut sekarang ini relatif lebih terjaga, karena intensitas penangkapan ikan yang rendah, penduduk lebih banyak mencurahkan waktu untuk berdagang. Pemenuhan kebutuhan hidup lebih banyak diperoleh dari hasil dagang, ketimbang dari usaha nelayan. Hasil usaha perikanan lebih sebagai pengisi waktu luang, karena laut dekat dengan tempat tinggal mereka, dan hasil ikan yang diperoleh lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (subsisten). Usaha budi daya non perikanan seperti budi daya rumput laut mulai dilihat sebagai usaha dengan prospek yang lebih menguntungkan dibandingkan usaha kenelayanan.

Sumber Daya Darat

Kondisi tanah di Pulau Kadatua umumnya gersang dan dipenuhi oleh batu-batu cadas berkapur yang berasal dari karang-karang mati. Kemungkinan besar pulau ini semula merupakan dasar laut yang kemudian terangkat naik. Pada umumnya petani bercocok tanam di sela-sela bebatuan atau di atas bebatuan yang ada tanahnya. Menurut informasi tanah-tanah tersebut berasal dari batu-batu yang sudah lapuk dan melunak menjadi tanah. Tanaman yang tumbuh dominan di atas bebatuan adalah alang-alang.

Tanaman yang biasa ditanam petani dengan kondisi tanah seperti itu adalah jagung, ketela pohon, pisang dan jambu mete. Hasil tanaman sangat minimal, misalnya jagung baru bisa panen setelah setahun ditanam, dengan ukuran kecil, sehingga biasa disebut jagung bonsai. Berbeda dengan jagung yang berasal dari daerah lain, meskipun ukurannya kecil rasanya sangat manis dan gurih. Kondisi yang sama juga terjadi pada tanaman ketela pohon, yang baru bisa dipanen setelah ditanam selama 2-3 tahun. Ukuran umbi ketela pohon juga kecil, tetapi rasanya manis. Ubi ini biasa juga disebut sebagai ubi racun, karena apabila tidak sempurna membersihkannya, bisa menyebabkan keracunan pada orang yang mengkonsumsinya. Penduduk biasa mengonsumsi jagung maupun ketela pohon dengan jalan dikeringkan dan disimpan di dapur atau para-para. Apabila mau dikonsumsi, ketela pohon biasanya diolah menjadi *kaswami*. Cara mengolahnya ubi yang sudah kering diparut, kemudian dikukus sehingga matang. Biasanya ketela pohon dan jagung dikonsumsi sebagai selingan makan, karena hasilnya yang terbatas. Pohon pisang juga banyak dijumpai di kebun milik penduduk, tapi jarang berbuah, atau kalau berbuah hanya sesekali saja, kemudian berhenti. Jantung pisang banyak dimanfaatkan penduduk untuk diolah sebagai sayur. Demikian pula daun kelor yang tumbuh liar di pulau ini juga banyak dimanfaatkan penduduk sebagai sayuran, sebagai lauk pauk makanan pokok *kaswami*. Sejak tahun 1980-an makanan pokok penduduk di pulau ini adalah beras, sedangkan jagung dan ubi kayu dikonsumsi sebagai makanan selingan.

Kondisi serupa terjadi pada tanaman jambu mete, sebelumnya orang enggan menanam karena pesimis dapat tumbuh dengan baik. Seseorang mencoba menanamnya dengan membuang sampah-sampah, khususnya rumput dan tanaman yang sudah dipangkas di tanah tempat jambu mete ditanam. Ternyata tanah bebatuan yang dipupuk dengan rumput dan tanaman yang membusuk (pupuk kompos) menjadi gembur dan pohon tersebut bisa berhasil tumbuh. Jambu mete semakin banyak ditanam di daerah ini, mengikuti petani yang telah berhasil menanam jambu mete. Kendala utama yang dihadapi adalah masalah pemasarannya, sehingga seringkali petani enggan untuk memetik hasilnya. Jumlah pohon mete yang relatif sedikit, menyebabkan terbatasnya hasil panen sehingga hasilnya hanya dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri, sebagai hadiah atau dijual di lingkungan yang terbatas. Di kedua desa survei, yakni Desa Waonu dan Kapoa, jumlah pohon mete masih sangat sedikit dan pemasarannya masih terbatas di lingkungan sendiri.

Potensi lain yang cukup bagus untuk dikembangkan adalah pohon kelapa. Meskipun cukup banyak pohon kelapa yang berhasil tumbuh di wilayah ini, tetapi sebagian saja yang berbuah. Namun demikian banyak bagian lain dari pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk membuat atap rumah panggung, batangnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun untuk kayu bakar. Hama kelapa yang dikenal sebagai 'Kepiting Kenari' sangat lezat sebagai bahan makanan. Apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh, Kepiting Kenari bisa menjadi salah satu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi relatif tinggi.

Masalah utama yang dihadapi penduduk adalah kesulitan air, sehingga penduduk berharap dapat memperoleh teknologi tepat guna yang bisa memproses air laut menjadi air tawar. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga maupun usaha pertanian. Masalah kesulitan air di daerah ini menyebabkan penduduk selalu berhadapan dengan kemiskinan. Banyak penduduk yang pergi merantau untuk mencari solusi dalam memperbaiki keadaan ekonomi

mereka. Usaha pertanian yang dilakukan di daerah ini hanya mengandalkan air hujan yang jarang diperoleh.

Keperluan air minum penduduk dipenuhi dari PAH (air hujan yang ditampung) atau dengan membeli air dari penjaja air yang mengambilnya dari mata air Pulau Siompu atau dari sumur. Sebagian penduduk mengambil air dari sumur yang terletak di tengah-tengah Pulau Liwutongkidi, dengan menggunakan sampan dan membawa derijen-derijen kecil (1 liter), atau derijen besar ukuran 5 liter. Sebagian penduduk juga memanfaatkan air sumur untuk dipakai sendiri dan dijual di Kadatua, dengan harga jual Rp20.000 per 10 liter.

2.3. SARANA DAN PRASARANA SOSIAL-EKONOMI

2.3.1. Kabupaten Buton

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buton dititikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan berintelektualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Perkembangan jumlah sarana sekolah maupun lembaga non formal dapat digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan dibidang pendidikan. Selama periode 2002-2004, jumlah sekolah SD di Kabupaten Buton meningkat dari 224 menjadi 246 buah sekolah, sekolah SMP meningkat dari 29 menjadi 35 dan SMA meningkat dari 14 menjadi 15 sekolah (Kabupaten Buton Dalam Angka, 2004). Sebagian besar fasilitas sekolah tersebut terdapat di Air Wajo (ibukota kabupaten), yaitu 39 buah sekolah SD, 6 sekolah SMP dan 3 sekolah SMA.

Kondisi kesehatan masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan sarana kesehatan, seperti Puskesmas, Polindes, dokter dan bidan. Di Kabupaten Buton, fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit masih terbatas. Pada tahun 2004 belum ada fasilitas Rumah Sakit Umum, fasilitas kesehatan yang ada hanya terbatas pada

puskesmas dan puskesmas pembantu. Minimnya fasilitas kesehatan ini disebabkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Buton dengan Kota Buton karena Rumah Sakit Umum yang ada di kota Bao-Bao menjadi aset Kota Buton.

2.3.2. Kecamatan Mawasangka

Pendidikan

Sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Mawasangka terdiri dari 27 sekolah SD, 2 SMP dan 1 sekolah SMA. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan tersebut relatif kecil dibandingkan luas wilayah kecamatan yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Buton. Akses masyarakat untuk mencapai sarana pendidikan agak sulit karena letak sekolah yang berjarak jauh dari pemukiman masyarakat. Fasilitas pendidikan di Desa Terapung hanya ada satu sekolah SD. Tingkat pendidikan anak di desa ini relatif rendah karena sebagian besar tingkat pendidikan anak hanya sampai SD dan SMP. Banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP karena sekolah SMP hanya ada di Kecamatan Banga berjarak sekitar 7 km dari desa. Jarak yang cukup jauh ditambah dengan keterbatasan sarana transportasi, karena belum ada sarana angkutan sampai ke desa, menyebabkan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Begitu juga dengan SMA, di desa Terapung hanya beberapa orang yang berpendidikan SMA atau yang masih sekolah SMA. Sekolah SMA ada di ibukota kecamatan berjarak 17 km dari desa sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk pergi sekolah. Anak yang berpendidikan SMA adalah mereka yang berasal dari keluarga yang cukup mampu karena dibutuhkan biaya transport yang cukup besar setiap hari dan kendaraan motor roda dua. Disamping adanya kendala transportasi, kurangnya aspirasi orang tua untuk menyekolahkan anak menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan. Faktor ekonomi menjadi alasan para orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Banyak anak usia sekolah yang bekerja baik di laut maupun pekerjaan lainnya, seperti dikebun, bekerja di pabrik pengolahan ikan dan kepiting (*basecamp*) di Desa

Terapung atau sebagai buruh agar/rumput laut di Desa Wakambangura. Faktor mudahnya mendapatkan pekerjaan untuk anak-anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak anak-anak malas untuk melanjutkan sekolah. Mereka sudah dapat mencari uang untuk jajan sendiri maupun untuk membantu orang tua.

Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Mawasangka adalah dua buah Puskesmas yang terletak di pusat kecamatan (Desa Mawasangka) dan Desa Lakuroa. Puskesmas ini dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dengan seorang dokter. Namun selama 3 bulan terakhir tidak ada dokter sehingga yang ada hanya bidan, perawat dan mantri. Sementara itu Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan seorang bidan ada 7 buah yang terdapat di Desa Wakambangura, Balobong, Napa, Wasilomata, Tanailand, Terapung dan Desa Gumanano. Fasilitas kesehatan lainnya adalah Puskesmas keliling yang datang sekali dalam seminggu bersamaan dengan kegiatan posyandu. Masyarakat dapat memanfaatkan puskesmas keliling untuk berobat.

Selain tenaga medis, masyarakat juga masih memanfaatkan tenaga dukun dalam upaya pengobatan. Keberadaan dukun sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pengobatan, baik karena keterbatasan tenaga medis, maupun tradisi masyarakat yang secara turun menurun sudah mempercayakan pengobatan penyakit dan pertolongan kelahiran melalui dukun desa. Apabila mengalami gangguan kesehatan, seperti panas, demam dan sebagainya, biasanya masyarakat pergi berobat ke dukun yang melayani pengobatan setiap saat atau ke Puskesmas Keliling yang datang sekali seminggu. Sedangkan untuk penyakit yang agak berat atau yang tidak dapat disembuhkan oleh dukun maka masyarakat berobat ke Puskesmas.

Jenis penyakit yang dialami masyarakat berkaitan dengan kegiatan kenelayanan hanya sebatas penyakit ringan, seperti demam, masuk angin. Kegiatan nelayan yang sering melaut pada malam hari terutama nelayan bagan, sangat mudah terkena penyakit yang

disebabkan oleh angin laut. Sedang penyakit kram yang diakibatkan oleh kegiatan penyelaman tidak banyak dialami oleh masyarakat nelayan, karena hanya sedikit nelayan yang melakukan penyelaman ke dasar laut (seperti nelayan bubu). Penyelaman ke dasar laut juga hanya dilakukan oleh nelayan yang benar-benar ahli menyelam. Hal ini terjadi karena umumnya fasilitas peralatan kompresor tidak memiliki peringatan dini, sehingga penyelam tidak mengetahui kedalaman penyelamandan yang sudah melampaui batas aman (30 m) dan waktu penyelaman yang lebih dari 1 jam. Mereka yang mengalami kram, umumnya masih dapat diobati, terutama apabila dibawa ke puskesmas.

Sarana Ekonomi

Di Kecamatan Mawasangka belum tersedia fasilitas ekonomi yang menunjang kegiatan kenelayanan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sarana ekonomi yang ada adalah pasar desa dan warung sembako. Tidak semua desa memiliki pasar desa hanya ada beberapa desa yang memiliki sarana pasar. Keberadaan pasar sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama tempat menjual hasil pertanian dan perikanan. Hasil pertanian yang dijual antara lain kacang mete, jagung, pisang, ubi kayu sedang hasil laut yang dijual adalah jenis ikan karang mati, ikan tongkol, layang dan jenis ikan tangkapan lainnya. Penjualan ikan di pasar dilakukan oleh para wanita atau istri nelayan dan ikan yang dijual adalah ikan yang masih tersisa dari penjualan pada pengumpul atau masyarakat setempat. Pasar desa juga berfungsi sebagai tempat membeli barang kebutuhan produksi, seperti bahan-bahan untuk membuat makanan untuk dijual dan kebutuhan konsumsi, seperti beras, sayur-sayuran dan barang pabrikan (minyak, tepung dan sebagainya). Selain pasar desa, di kota kecamatan juga terdapat pasar yang relatif lebih besar dilengkapi dengan toko-toko yang mendukung kegiatan perdagangan warung dan sembako di desa-desa. Di Kecamatan Mawasangka hari pasar biasanya dua kali dalam seminggu. Pedagang yang menjual di pasar juga berasal dari desa lain yang membawa barang dagangannya.

Selain sarana pasar desa, sarana ekonomi yang ada di desa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat adalah warung sembako. Warung sembako yang jumlahnya relatif sedikit hanya beberapa buah saja menyediakan bahan makanan yang tahan lama, seperti minyak gula, dan jenis makanan bahkan dan juga menjual bahan bakar solar dan minyak tanah untuk kebutuhan bahan bakar motor yang banyak dimiliki masyarakat.

Sarana ekonomi yang menunjang kegiatan kenelayan adalah tempat penjualan atau pengisian bahan bakar minyak (BBM) atau semacam SPBU kecil untuk kebutuhan kapal motor nelayan yang terdapat di Desa Terapung. SPBU kecil ini dimiliki oleh salah seorang pengumpul ikan dan rumput laut untuk Kecamatan Mawasangka. Kebutuhan bahan bakar solar sebagian besar nelayan diperoleh dari SPBU ini. Sejauh ini belum ada keluhan nelayan mengenai ketersediaan bahan bakar minyak.

Tempat pelelangan ikan belum ada di Kecamatan Mawasangka. Ikan hasil tangkapan nelayan langsung dijual pada masyarakat dan pedagang pengumpul yang ada pada masing-masing desa. Di Desa Terapung ada beberapa pedagang pengumpul ikan teri menjadi hasil tangkapan dominan nelayan di desa ini. Masing-masing pedagang pengumpul memiliki beberapa nelayan anggota yang rutin menjual hasil ikan teri pada pengumpul tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi nelayan untuk menjual ikan pada pedagang pengumpul lainnya. Begitu juga untuk hasil tangkapan kepiting, ada beberapa pedagang pengumpul yang membeli kepiting dari nelayan di Desa Terapung. Selanjutnya ditingkat pedagang pengumpul, ikan teri maupun kepiting diolah di desa sebelum dijual ke pedagang besar di luar kota. Ikan teri diolah menjadi ikan teri asin atau disebut juga teri medan dan teri tawar dalam kondisi kering. Sedang kepiting diolah menjadi kepiting rebusan yang sudah diambil dagingnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada rumput laut di Desa Wakambangura. Ada beberapa orang pedagang pengumpul rumput laut yang membeli rumput laut dari nelayan. Dengan demikian, meskipun belum ada TPI namun nelayan tidak mendapatkan masalah

dalam memasarkan hasil tangkapan ikan dan rumput laut yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan di Kecamatan Mawasangka.

Selain pengumpul ikan, di Kecamatan Mawasangka juga terdapat pedagang pengumpul jambu mete. Jambu mete adalah sumber pendapatan masyarakat selain hasil ikan. Penjualan jambu mete dilakukan pada pedagang pengumpul yang membeli jambu mete dengan cara menjemput langsung pada petani mete. Hal ini cukup memudahkan bagi petani karena mereka tidak mengeluarkan ongkos transport.

Sarana Transportasi dan Komunikasi

Kecamatan Mawasangka terletak di Pulau Muna yang dapat dicapai dari Kota Bau-Bau, ibukota Kabupaten Buton yang lama di Pulau Buton, menggunakan transportasi laut dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ke kecamatan. Penyeberangan dari Pulau Buton ke Pulau Muna menggunakan sarana transportasi laut dengan kapal feri cukup lancar dengan lama penyeberangan sekitar 15 menit. Prasarana jalan dari Pelabuhan Wamengkoli ke kecamatan sebagian dalam kondisi bagus dan sebagian masih jalan pasir berbatu namun dapat ditempuh dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Begitu juga kondisi prasarana jalan di Kecamatan Mawasangka, sebagian dalam kondisi bagus dan sebagian masih berupa jalan pasir dan batu.

Sarana transportasi dari pelabuhan ke kecamatan tersedia dan mudah diperoleh. Kendaraan roda empat yang menjadi sarana angkutan reguler selalu tersedia di terminal dekat pelabuhan membawa penumpang dari pelabuhan ke kecamatan maupun sebaliknya. Namun angkutan reguler ini hanya dapat melayani penumpang sampai di kecamatan. Di kecamatan tidak ada sarana transportasi reguler yang dapat membawa masyarakat dari desa ke kota kecamatan atau dari satu desa ke desa lainnya. Selama ini mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan motor milik sendiri atau motor ojek sewaan bagi yang tidak memiliki kendaraan motor.

Sarana dan prasarana komunikasi masih minim menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Belum tersedia sarana komunikasi, seperti jaringan telepon kabel atau telpon seluler di Kecamatan Mawasangka cukup menyulitkan masyarakat untuk berhubungan komunikasi jarak jauh. Telpon seluler hanya dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu yang dapat menangkap sinyal pesawat seluler. Namun ada beberapa Warung Telekomunikasi (Wartel) yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan luar. Komunikasi dan penyebaran informasi antar kecamatan maupun pemerintah kabupaten dilakukan melalui radio komunikasi milik kantor kecamatan. Sedangkan komunikasi antara kecamatan dan desa diwilayahnya untuk kepentingan dinas dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau menitipkan pada orang yang kebetulan akan menuju desa yang bersangkutan.

Kelembagaan Sosial Ekonomi

Kelembagaan sosial yang menonjol di Kecamatan Mawasangka hampir tidak ada. Kelembagaan yang umumnya ada disetiap desa, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) kegiatannya belum berjalan dengan semestinya. Kelembagaan yang berjalan di Desa Terapung adalah karang taruna. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak pada kegiatan olah raga seperti sepak bola. Aktifnya kegiatan olah raga ini dapat dilihat dari diadakannya perlombaan olah raga sepak bola antar desa atau kecamatan.

Koperasi tidak berjalan karena pengelolaan yang kurang maksimal. Disamping itu, adanya masalah permodalan karena macetnya pengembalian cicilan dari anggota. Kurang lancarnya pegembalian cicilan salah satunya disebabkan pola pengembalian uang pada koperasi yang rutin tidak sesuai dengan pola penerimaan pendapatan masyarakat nelayan yang bersifat musiman. Setiap bulan anggota koperasi harus mengembalikan cicilan sementara pada musim barat banyak nelayan tidak memiliki penghasilan atau penghasilan minim sehingga tidak mampu untuk membayar cicilan. Kelembagaan koperasi yang tidak jalan digantikan oleh koperasi

simpan pinjam oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul memberikan pinjaman pada nelayan yang menjual hasil laut padanya dan pengembaliannya disesuaikan dengan pendapatan nelayan. Biasanya cicilan diberikan setelah mendapat hasil penjualan ikan dari pengumpul.

2.3.3. Kecamatan Kadatua

Sarana Pendidikan

Sarana Sekolah Dasar di Pulau Kadatua terdapat di setiap desa, sedangkan SMP Negeri berada di Desa Lipoe, ibukota Kecamatan Kadatua. Untuk menampung lulusan SMP negeri di Pulau Kadatua, telah dibangun gedung SMA swasta di Desa Lipoe, yang sampai penelitian dilakukan, bangunan gedung SMA belum selesai. Pembangunan SMA di Kadatua diprakarsai oleh para guru-guru SMP Negeri Kadatua, sebagai jalan keluar untuk mengatasi problem pendidikan lanjutan di Kadatua. Keinginan masyarakat Pulau Kadatua memiliki SMA itu terkait dengan problem lulusan SMP yang semakin meningkat di Kadatua, sementara untuk melanjutkan sekolah ke SMA harus ke Kota Bau-bau, sehingga membutuhkan biaya yang relatif besar untuk transport dan sewa pondokan, karena untuk perjalanan ke kota membutuhkan waktu 1-2 jam. Survei terhadap 100 rumah tangga di lokasi COREMAP di Pulau Kadatua memperlihatkan penduduk yang menamatkan SMA sangat kecil dibandingkan lulusan SD dan SMP. Gambaran tentang pendidikan dapat dilihat pada hasil survei di Desa Kapoa dan Waonu di Pulau Kadatua sebagai berikut (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Responden yang Ditamatkan di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua Tahun 2006

Pendidikan Tertinggi	N	%
1. Belum/tidak sekolah	64	13,6
2. Belum/Tidak Tamat Sekolah Dasar	164	34,9
3. Tamat Sekolah Dasar	114	24,3
4. Tamat Sekolah Menengah Pertama	98	20,9
5. Tamat Sekolah Menengah Atas	30	6,4
Jumlah	470	100,0

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

Sarana Ekonomi

Di lokasi binaan COREMAP Kecamatan Kadatua terdapat pasar tradisional desa yang hanya aktif sekali dalam seminggu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, penduduk membeli kebutuhan dari pedagang sayuran atau warung yang terdapat di desa. Salah satu sarana perekonomian yang cukup penting adalah depot kecil untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi perahu-perahu nelayan dan kendaraan bermotor di Pulau Kadatua. Lokasi Desa binaan COREMAP ini dipilih untuk menghindari ombak besar pada saat musim barat, sehingga kapal perikanan mudah merapat ke pantai

Sarana Transportasi

Di Pulau Kadatua terdapat prasarana jalan sepanjang 60 km, yang menghubungkan desa-desa di Pulau Kadatua dan antara Pulau Kadatua dengan Kota Bau-Bau di Pulau Buton. Kondisi jalan di Pulau Kadatua sebagian besar masih berkerikil yaitu sepanjang 10 km, dan jalan semen sepanjang 7 km). Sedangkan jalan yang sudah beraspal baru sekitar 3 km. Sarana transportasi darat yang tersedia adalah angkutan desa dan ojek. Peranan angkutan desa sangat besar dalam memfasilitasi mobilitas penduduk antar desa maupun dari pulau ke kota, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun bagi penduduk

yang bekerja sebagai pedagang di Bau-bau. Selain angkutan darat, terdapat angkutan laut yaitu perahu “mesin dalam” (*inboard*) yang melayani penduduk menyeberang dari Pulau Kadatua ke Kota Bau-bau. Perjalanan dengan perahu dari Pulau Kadatua ke Pulau Buton (yaitu Desa Banabung) ditempuh sekitar seperempat jam.

2.4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

Bagian ini membahas pengelolaan Sumber Daya Laut (SDL) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya oleh nelayan di dua lokasi penelitian. Uraian tentang pengelolaan SDL pada bagian ini dimulai dengan membahas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDL (khususnya terumbu karang), selanjutnya pembahasan tentang pemanfaatan SDL, wilayah tangkap dan teknologi yang digunakan masyarakat nelayan. Pada bagian akhir akan dibahas permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut.

2.4.1. Kabupaten Buton

Kabupaten Buton memiliki potensi perikanan yang besar, dan merupakan sentra perikanan untuk Kawasan Sulawesi Tenggara. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Buton merupakan daerah penjaring ikan yang potensial. Perikanan laut terdapat di semua kecamatan dengan produksi ikan sekitar 43.439,9 ton (2004). Kini Buton telah memiliki pelabuhan internasional yang cukup besar di Kecamatan Pasar Wajo. Sampai tahun 2002, pelabuhan ini digunakan untuk pengangkutan aspal dan mampu untuk pendaratan kapal seberat 75.000 ton. Perusahaan perikanan terbesar di Buton berlokasi di Kecamatan Pasar Wajo, yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Buton. Sekalipun belum dapat menampung semua hasil tangkapan ikan para nelayan di Kabupaten Buton, namun perusahaan ini telah mampu mengeksport berbagai jenis hasil tangkapan ikan yang telah diawetkan ke luar negeri.

Potensi perikanan di Kabupaten Buton dapat dilihat dari: Pertama, alat tangkap yang dimiliki nelayan Buton. Data statistik perikanan tangkap Kabupaten Buton Tahun 2005 menunjukkan adanya keragaman alat tangkap yang berkembang mencapai sekitar 20 jenis. Berbagai jenis alat tangkap tersebut dapat dikelompokkan menjadi: **group pukot** (payang, pukot pantai, pukot cincin, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang tetap); **group pancing** (huhate, pancing rawai tuna, pancing rawai dasar, pancing tonda, pancing ulur dan jenis pancing lainnya); dan **group alat perangkap** (traps) seperti sero dan bubu. Selain itu terdapat pula bagan tancap dan bagan perahu.

Berdasarkan berbagai alat tangkap yang berkembang di Buton, dapat disimpulkan terdapat 5 jenis alat tangkap yang dapat ditemukan di sebagian besar kecamatan Kabupaten Buton yaitu: Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Net*), Jaring Insang Tetap (*Set Gill Net*), Pancing Tonda (*Roll Lines*), Pancing Ulur (*Others Pole and Lines*), dan Bubu (*Portable Traps*). Karakteristik yang menonjol pada ke 5 alat tangkap tersebut mengindikasikan bahwa nelayan Buton sebenarnya lebih bersifat individual atau berkelompok skala kecil dan cenderung pada penangkapan jenis-jenis ikan pelajik.

Jaring insang hanyut merupakan salah satu jenis gill-net yang digunakan untuk menangkap ikan pelajik (Martasuganda, 2002). Alat tangkap ini dioperasikan dengan menggunakan perahu bermotor oleh 1-2 nelayan, dijalankan dengan mengikuti arus dan salah satu ujungnya diikatkan dengan perahu. Alat tangkap ini cenderung banyak digunakan di setiap kecamatan, karena cara pengoperasiannya mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga. Wilayah yang paling banyak menggunakan jaring insang hanyut ini adalah Kecamatan Siompu, Mawasangka, Pasarwajo dan Lasalimu.

Jaring insang tetap cukup fleksibel pemakaiannya jika dibandingkan dengan jaring insang hanyut. Jenis jaring yang dipasang di dasar laut secara menetap dengan menggunakan jangkar, bertujuan untuk menangkap ikan-ikan dasar (demersal). Alat tangkap ini dipasang di permukaan atau di lapisan tengah perairan, sehingga jenis

ikan yang berhasil ditangkap tergantung pada tinggi-rendahnya pemasangan jaring. Jenis jaring insang tetap terdapat di sebagian besar kecamatan di Buton, meskipun tetap terkonsentrasi di Kecamatan Siompu, dan Kapontri.

Pancing Tonda adalah salah satu jenis pancing yang dalam pengoperasiannya ditarik oleh sebuah perahu di permukaan perairan, bertujuan untuk menangkap jenis-jenis ikan permukaan yang buas. Seperti halnya pada kedua jenis alat tangkap sebelumnya, pancing tonda terdapat di hampir semua kecamatan di Kabupaten Buton, namun cenderung paling banyak digunakan di Kecamatan Sampolawa. Kecenderungan ini kemungkinan terkait dengan produksi ikan cucut yang banyak dihasilkan di wilayah ini. Pancing ulur merupakan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tradisional, dalam arti pengoperasian alat tangkap ini bisa dilakukan dengan perahu tanpa mesin atau sampan. Pancing ulur dan sampan adalah sarana penangkapan ikan yang relatif sederhana dan terdapat hampir di setiap kecamatan di Buton, terutama Kecamatan Siompu dan Kadatua.

Bubu merupakan satu-satunya alat tangkap yang banyak digunakan untuk menangkap ikan karang. Bubu adalah alat perangkap (*trap*) yang mempunyai satu atau dua pintu masuk dan dapat diangkat dengan mudah (dengan atau tanpa perahu) ke lokasi-lokasi penangkapan, terutama di daerah terumbu karang. Bubu biasanya dipasang selama jangka waktu tertentu di dasar laut, yaitu di lokasi terumbu karang. Seperti alat tangkap lainnya, Bubu juga terdapat hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Buton, terutama di 5 kecamatan, yakni Siompu, Mawasangka, Mawasangka Timur, Lasalimu Selatan, dan Batu Atas.

Karakteristik pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 2.3. Usaha perikanan tangkap yang dominan bersifat perorangan (80%), dan sebaliknya usaha yang berkelompok terutama berskala besar, relatif kecil (12,6%), seperti kelompok usaha perikanan pukat cincin (*redi*). Dominannya usaha perikanan tangkap yang bersifat individual atau perorangan ini sejalan

dengan jenis alat tangkap yang digunakan di daerah ini, yakni alat tangkap yang dioperasikan secara perorangan, seperti pancing ulu dan jaring.

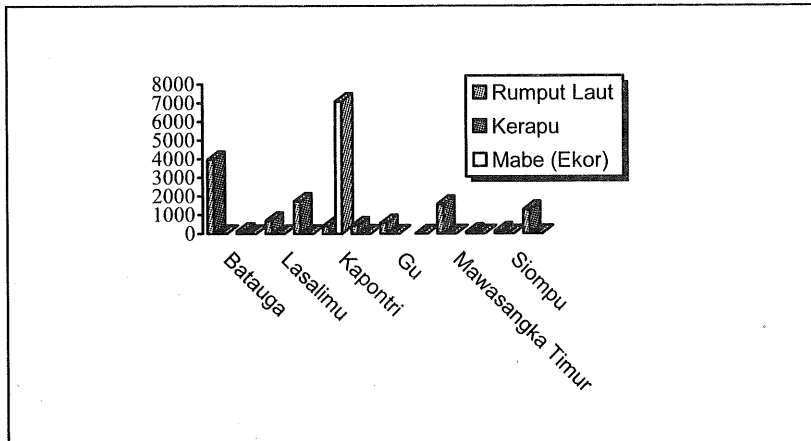
Tabel 2.3. Status Usaha Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Kabupaten Buton.

No.	Status usaha perikanan	N	%
1.	Perorangan	5.170	79,90
2.	Usaha bersama/kelompok		
	a. 2 orang	416	5,09
	b. 3 orang	68	1,05
	c. > 3 orang	816	12,6
	Jumlah	6.470	100,0

Sumber: Sensus Statistik, BPS 2003

Usaha budi daya perikanan yang berkembang di Kabupaten Buton adalah budi daya rumput laut, ikan kerapu dan mutiara. Dibandingkan dengan budi daya mutiara dan ikan kerapu, budi daya rumput laut lebih pesat dan lebih luas perkembangannya. Rumput laut terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, dan Siontapina. Laporan Statistik Tahunan Potensi dan Produksi Perikanan Tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecamatan yang mengusahakan budi daya rumput laut sejak 2 tahun terakhir, yaitu dari 8 kecamatan pada tahun 2003 menjadi 17 kecamatan pada tahun 2005.

Gambar 2.2. Produksi Budi Daya Laut Kabupaten Buton, 2005



Sumber: DKP Kabupaten Buton, Tahun 2006.

Perkembangan luas wilayah usaha budi daya rumput laut tidak sejalan dengan pertambahan jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan). Sebagai gambaran jumlah RTP justru mengalami penurunan dari 3.974 RTP pada tahun 2003 menjadi 3.867 RTP pada tahun 2005 dengan luas areal sekitar 3.191,8 Hektar. Penurunan jumlah RTP tersebut kemungkinan disebabkan perubahan administrasi wilayah, yaitu sejak tahun 2005 Kecamatan Wangi Wangi Selatan dan Kaledupa tidak lagi termasuk wilayah administrasi Kabupaten Buton. Areal budi daya rumput laut terluas terdapat di Kecamatan Lakudo (1.483,9 Ha) dan Mawasangka Timur (616,3 Ha). Dilihat dari hasil produksi rumput laut, wilayah penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Buton adalah Kecamatan Mawasangka (4.070,52 ton), kemudian Kecamatan Batauga (3.968,10 Ha), Lasalimu Selatan (1.726,5 Ha), dan Mawasangka Timur (1.570,50 Ha).

Budi daya ikan kerapu di Kabupaten Buton berkembang pesat di Kecamatan Lakudo (151,3 Ha), sebagian kecil di Kecamatan Siompu 2,5 Ha), dan Kecamatan Gu (0,2 Ha). Jumlah RTP yang

terlibat dalam budi daya ikan kerapu pada tahun 2005 sekitar 49 RTP dengan jumlah produksi sekitar 16,6 ton. Jumlah RTP ini mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan kondisi dua tahun sebelumnya (tahun 2003) yaitu sebanyak 102 RTP. Sedangkan budi daya mutiara/mabe hanya berkembang di Kecamatan Kapontri (1.194,9 Ha), yang melibatkan sekitar 110 RTP dengan hasil produksi sekitar 7.078 ekor mabe.

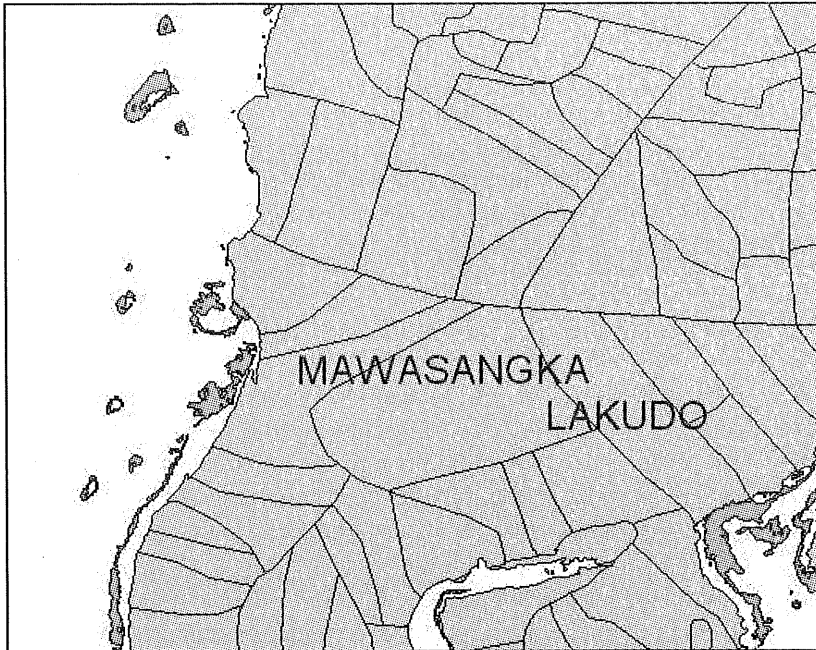
2.4.2. Kecamatan Mawasangka

Kebijakan

Pengelolaan Sumber Daya Laut (SDL) sangat berguna dalam melestarikan terumbu karang. Pengelolaan SDL dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam mengelola SDL pemerintah memberlakukan berbagai peraturan daerah, misalnya larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang merusak terumbu karang dan memberlakukan larangan wilayah tangkap. Program COREMAP merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan SDL oleh pemerintah daerah.

Kegiatan COREMAP di Kabupaten Buton dimulai sejak tahun 2004, dimulai dengan pembentukan kelembagaan, dan melakukan kegiatan pengelolaan SDL. Dalam rangka menjaga kelestarian SDL khususnya terumbu karang, sebagai langkah awal dibentuk wilayah dan batas desa termasuk batas wilayah laut. Kesepakatan tentang batas desa dibuat antara masyarakat dan aparat desa dan dalam pengawasan pemerintah kecamatan. Kesepakatan batas desa di wilayah laut berjarak 30 km dari terumbu karang. Adanya kesepakatan batas wilayah desa tersebut, pemerintah desa dan masyarakat memiliki wewenang dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan daerah konservasi terumbu karang sesuai dengan batas yang telah disepakati.

Gambar 2.3. Lokasi Terumbu Karang di Kecamatan Mawasangka



Sumber: Survei Data Dasar Ekologi Terumbu Karang, COREMAP, 2005.

Pemerintah desa bersama masyarakat membentuk aturan-aturan dan sanksi terhadap pelanggaran batas konservasi kelestarian SDL yang diatur dalam Perdes (Peraturan Desa). Pada saat penelitian, Perdes Desa Terapung dan Mawasangka masih dalam taraf pembuatan draft oleh masyarakat desa dibantu oleh Community Fasilitator dari COREMAP. Dalam Peraturan Desa dilampirkan RPTKD (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Dasar). Berdasarkan kesepakatan masyarakat Kecamatan Mawasangka, ditentukan lokasi konservasi terumbu karang, yaitu karang Manggarasang Besar yang berjarak sekitar 3 km dari pinggir pantai. Namun nelayan belum mengenal batas-batas wilayah pengelolaan SDL yang telah ditetapkan oleh COREMAP dan masyarakat di Kecamatan Mawasangka. Selama

ini nelayan masih bebas melakukan penangkapan ikan di karang-karang yang terdapat di perairan Mawasangka, meskipun daerah konservasi terumbu karang sudah ditentukan. Kemungkinan hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan sosialisasi wilayah konservasi terumbu karang pada masyarakat nelayan. Di samping itu, penetapan wilayah konservasi terumbu karang relatif masih baru, sehingga banyak nelayan yang belum menyadari tentang adanya aturan perlindungan wilayah terumbu karang di sekitar wilayah penangkapan ikan.

Pemanfaatan Sumber Daya Laut (Produksi dan Pemasaran)

Wilayah perairan di Kecamatan Mawasangka memiliki kekayaan SDL yang cukup besar. Hal ini didukung oleh adanya gugusan batu karang yang terhampar di sepanjang garis pantai dari utara sampai ke selatan. Akibatnya berbagai jenis ikan terdapat di wilayah perairan Kecamatan Mawasangka, ikan laut dalam maupun bermacam-macam jenis ikan karang. Berbagai jenis SDL ini meliputi : kelompok ikan karang (seperti ikan kerapu dan sunu,), kelompok ikan laut dalam (seperti: ikan teri, ikan tongkol, cakalang, tuna, kakap dan belanak), dan kelompok biota laut lain (seperti: kepiting, cumi, teripang) dan rumput laut. Potensi SDL dapat dilihat dari hasil produksi nelayan sepanjang tahun, meskipun hasil produksi mengalami naik turun sejalan dengan pergantian musim. Pada bulan-bulan tertentu hasil tangkapan mengalami penurunan dan sebaliknya pada bulan-bulan lainnya mengalami kenaikan hasil produksi sesuai dengan perbedaan musim yang terjadi di wilayah tersebut. Keragaman potensi SDL yang dapat dimanfaatkan nelayan, menyebabkan nelayan dapat beralih untuk usaha memanfaatkan SDL lainnya, terutama pada musim angin kencang, dimana mereka tidak dapat menangkap ikan ke laut.

Hasil produksi perikanan laut dari hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Mawasangka, biasanya langsung dijual dalam bentuk ikan segar ke pedagang pengumpul di desa dan/atau ke pasar lokal dan masyarakat setempat. Ikan karang hidup, ikan teri dan kepiting jarang

dikonsumsi masyarakat, karena nilai jualnya tinggi. Hasil penangkapan ikan karang hidup biasanya langsung dimasukkan ke dalam keramba sebelum dijual pada pedagang pengumpul. Sedangkan kepiting termasuk 'barang mewah' yang jarang dikonsumsi masyarakat nelayan di Desa Terapung, karena harganya yang relatif tinggi. Ikan teri dan kepiting pada umumnya dijual langsung ke penampung untuk diolah sebelum dijual ke konsumen. Berbagai jenis hasil tangkapan juga dijual langsung ke pasar lokal dan masyarakat setempat, antara lain ikan karang yang sudah mati, ikan tongkol, ikan kakap, cumi, dan udang. Usaha pengolahan ikan dilakukan terhadap ikan teri dan kepiting. Ikan teri diolah dengan pengasinan dan pengeringan sedang kepiting biasanya diolah setelah direbus menjadi olahan daging kepiting. Pengolahan ikan teri dan kepiting dilakukan di desa, oleh industri pengolahan yang juga berfungsi sebagai pedagang pengumpul yang terdapat di desa. Usaha pengolahan rumput laut juga dilakukan oleh nelayan di Desa Wakambangura dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari. Biasanya usaha budi daya rumput laut dilakukan oleh masing-masing nelayan dengan memperkerjakan keluarga dan tenaga kerja setempat, terutama para perempuan dan anak-anak.

Hasil produksi SDL yang dimanfaatkan nelayan di Kecamatan Mawasangka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok hasil tangkapan ikan (ikan karang, ikan laut dalam, ikan teri dan kepiting) dan kelompok budi daya rumput laut. Beberapa jenis ikan yang menonjol dari kawasan ini dilihat dari jumlah produksi dan nilai ekonominya adalah ikan teri, kepiting, tuna, tembang, belanak, tongkol dan cakalang, dan beberapa jenis ikan karang seperti kerapu, sunu, dan lobster (DKP Kab. Buton, 2006: 69). Berdasarkan data potensi perikanan tangkap tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Desa Terapung merupakan salah satu dari 12 desa yang paling menonjol kegiatan kenelayannya. Beberapa jenis ikan di Kecamatan Mawasangka yang menonjol dapat dilihat pada Tabel 2.4. Hal ini tampak dari besarnya proporsi RTP (Rumah Tangga Petani/nelayan) dan jumlah perahu yang dimiliki nelayan (DKP, 2006: 66). Daerah ini

juga merupakan penghasil ikan tangkap terbesar di Kecamatan Mawasangka, terutama jenis ikan teri, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan jaringan pemasaran yang cukup luas sampai ke luar daerah (Jakarta).

Tabel 2.4. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Beberapa Jenis Ikan*), Kecamatan Mawasangka Tahun 2005

No.	Jenis Ikan	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi Rp (000)
1.	Teri	6.037,20	36.223.200
2	Kepiting	421,90	8.438.000
3	Tuna Albakora	181,12	3.622.400
4.	Tembang	398,16	2.388.960
5	Tongkol Komo	343,36	1.201.760
6.	Belanak	327,43	1.146.012
7	Lencam	141,38	1.060.320
8.	Ikan-ikan lainnya	1.729,98	6.054.916
9	Kerapu Sunu	46,83	280.992
10	Kerapu Karang	13,48	202.140

Sumber: Survei Potensi dan Produksi Perikanan Kabupaten Buton, 2005 dikutip dari (DKP Kab. Buton, 2006: 69)

Catatan: *) 10 jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi (non karang dan karang)

Jumlah dan jenis produksi hasil tangkapan nelayan dipengaruhi oleh perbedaan musim dan alat tangkap. Masyarakat nelayan mengenal dua musim, yaitu Musim Barat (musim angin kencang) dan Musim Timur (musim tenang). Pergantian musim menyebabkan nelayan melakukan pergantian alat tangkap dan wilayah tangkap. Pada musim Timur (Juli-September), nelayan di Desa Terapung menggunakan alat tangkap bagan dan nelayan di Desa Wakambangura melakukan budidaya rumput laut. Kemudian pada musim Barat (November-Mei), maka nelayan bagan di Desa Terapung beralih menggunakan alat pancing dengan wilayah tangkap disekitar pantai, dan sebagian nelayan rumput laut di Desa

Wakambangura beralih ke alat tangkap pancing dan sebagian masih melakukan budidaya tetapi dengan jumlah terbatas. Dengan demikian, alat tangkap pancing digunakan oleh nelayan sepanjang tahun, hanya saja perbedaan musim berpengaruh pada wilayah tangkap. Nelayan pancing menangkap ikan karang hampir sepanjang tahun, namun pada musim angin Barat wilayah tangkap lebih dekat ke pantai. Nelayan pancing tidak menangkap ikan cakalang pada musim Barat, karena wilayah tangkap ikan cakalang cukup jauh ke laut dalam. Selain nelayan pancing ikan karang, nelayan kepiting dan pukat juga melakukan penangkapan sepanjang tahun. Nelayan bagan dan bubu hanya melakukan kegiatan penangkapan hasil laut pada musim angin Timur (Gambar 2.4).

Gambar 2.4. Kalender Musim Kegiatan Kenelayanan di Kecamatan Mawasangka

Kegiatan/Musim	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nelayan Pancing ikan karang												
Nelayan Pancing cakalang												
Bagan												
Budi daya rumput laut												
Kepiting												
Jaring pukat pantai												
Bubu												

Sumber: Monografi Desa.

Catatan: Musim Timur : Bulan 5-11. Musim Barat : Bulan 12-4

a. Ikan Teri

Ikan teri merupakan jenis SDL utama di Kecamatan Mawasangka dilihat dari jumlah produksi dan nilai ekonominya. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa hasil produksi ikan teri di Kecamatan Mawasangka sekitar 6.037 ton dengan nilai ekonomi lebih dari 36 milyar rupiah. Angka ini merupakan hasil produksi dan nilai ekonomi terbesar dibandingkan jenis ikan lainnya. Sebagai jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, hampir semua hasil tangkapan ikan teri di jual pada pedagang pengumpul (sekaligus

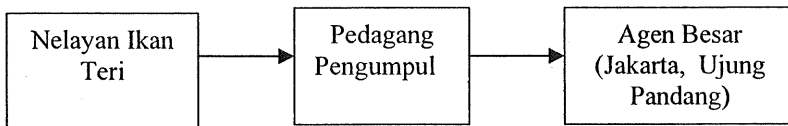
pengolah) yang ada di desa. Pada umumnya penangkapan ikan teri dilakukan pada musim Timur dengan menggunakan alat tangkap bagan drum yang berpindah-pindah tempat sesuai dengan lokasi yang banyak ikan. Menurut informasi dari nelayan, keberadaan ikan teri tergantung pada arus air, arus ikan dan penggunaan bom oleh nelayan.

Ikan teri merupakan jenis ikan utama bagi nelayan di Desa Terapung, hasil tangkapannya mencapai sekitar 80 persen dari total hasil tangkapan laut. Berdasarkan pemilikan bagan perahu (alat tangkap ikan teri) di Kecamatan Mawasangka, sebanyak 96 persen bagan dimiliki oleh nelayan Desa Terapung. Namun belum ada data yang pasti mengenai jumlah produksi ikan teri dari desa ini. Hasil tangkapan nelayan bagan bervariasi, berkisar antara 50 sampai 100 kg per malam pada musim ikan teri. Besarnya produksi ikan teri di Desa Terapung dapat diketahui dari banyaknya ikan teri yang diperoleh pedagang penampung. Jumlah pedagang penampung ikan teri di Desa Terapung sebanyak 11 orang. Produksi ikan teri di Desa Terapung dapat diketahui berdasarkan perkiraan pembelian ikan teri oleh masing-masing pedagang pengumpul, yang mencapai sekitar 20 ton per bulan per pedagang pengumpul. Diperkirakan jumlah ikan teri untuk 11 orang pedagang pengumpul mencapai sekitar 220 ton.

Penggunaan bom oleh nelayan dalam menangkap ikan berpengaruh pada banyaknya jumlah ikan teri di laut. Getaran bom dapat menyebabkan banyak bibit ikan teri mati. Menurut informasi, penangkapan ikan dengan bom sudah mulai berkurang sejak adanya program COREMAP, namun kenyataannya masih terdapat penggunaan bom dengan cara melemparkan bom dari tebing secara sembunyi-sembunyi, terutama banyak dilakukan oleh nelayan dari luar desa. Nelayan di kedua desa penelitian hampir tidak ada yang menangkap ikan dengan menggunakan bom karena mayoritas nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bagan. Bom ikan dapat berdampak negatif terhadap hasil bagan dan budi daya rumput laut, sehingga mereka sangat menjaga wilayah laut di sekitar desa, terutama dari penggunaan bom.

Rantai pemasaran ikan teri pada tahap pertama dilakukan dari nelayan ke pedagang pengumpul. Pada tahap ini, nelayan menjual ikan teri segar pada pedagang pengumpul yang ada di Desa Terapung. Pedagang pengumpul melakukan pengolahan ikan segar menjadi ikan teri olahan (ikan teri kering dan ikan teri asin). Pada tahap kedua, pedagang pengumpul menjual ikan teri pada agen besar di Kota Jakarta dan Ujung Pandang. Rantai pemasaran ikan teri dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut ini:

Bagan 2.1. Rantai Pemasaran Ikan Teri



Pedagang pengumpul memasarkan hasil tangkapan yang telah dikumpulkan ke kota-kota besar, sebanyak 4 kali dalam sebulan dengan angkutan Kapal Pelni. Transaksi dengan agen besar di Jakarta dan Ujung Pandang biasanya dilakukan melalui telpon. Apabila harga dan jumlah sudah disetujui maka barang dikemas dalam dos dan dikirim dengan menggunakan kapal. Untuk sekali pengiriman jumlah ikan teri kering mencapai sekitar 67 dos atau sekitar 8 ton, tergantung banyaknya hasil tangkapan nelayan.

Di Desa Terapung terdapat 11 orang pedagang pengumpul ikan teri, sehingga nelayan dapat memilih penampung sesuai keinginannya, kecuali bagi nelayan yang sudah terikat modal dengan bos/penampung tertentu. Biasanya para penampung bersaing untuk menarik nelayan agar mau menjual hasil tangkapannya pada mereka, misalnya dengan selalu menyiapkan uang *cash*, karena nelayan lebih suka menjual hasil tangkapannya pada penampung yang siap membayar tunai. Dalam hal ini, nelayan memiliki posisi kuat untuk memilih penampung yang paling disukainya. Biasanya para 'bos'/penampung juga memiliki strategi untuk mengikat nelayan agar

selalu menjual hasil tangkapan ikan terinya, yaitu dengan memberikan pinjaman uang atau alat tangkap bagan pada nelayan. Para bos/penampung biasanya menerima pembayaran (melalui bank) dari agen besar di Jakarta setelah barang sampai. Demikian pula para penampung juga dapat memperoleh pinjaman dari agen besar di Jakarta, untuk keperluan membayar tunai pada para nelayan.

Penentuan harga umumnya dilakukan oleh para pedagang pengumpul sesuai dengan harga standar yang berlaku di pasaran. Pada saat penelitian, harga teri rebus kering (teri Medan) Rp. 26.000 per Kg, sedangkan harga teri kering Rp. 35.000 per Kg. Sementara harga pembelian ikan teri basah dari nelayan Rp. 3.500-4.000 per kg untuk teri biasa, dan Rp. 5.500-6.000 per kg untuk teri super (teri Medan). Perbandingan jumlah ikan teri basah dan kering untuk teri rebus (dengan garam) adalah 1 berbanding 3, sementara untuk teri kering (tanpa rebus dan garam) adalah 1 berbanding 4. Rata-rata jumlah ikan teri segar yang diperoleh dari nelayan setiap bulan sekitar 20 ton (antara 6-30 ton) Pada umumnya nelayan tidak merasa dirugikan dengan harga yang berlaku dan ditentukan oleh penampung

b. Kepiting

Komoditi hasil perikanan laut terbesar kedua di Kecamatan Mawasangka adalah kepiting, dengan total produksi pada tahun 2005 sekitar 422 ton dan nilai ekonomi sekitar Rp 8,4 milyar (Tabel 2.4). Di Desa Terapung, kepiting juga merupakan hasil tangkapan nelayan kedua terbesar setelah ikan teri, yaitu sebanyak 15 persen dari total hasil tangkapan laut. Kepiting dapat diperoleh nelayan hampir sepanjang tahun, namun hasil yang lebih banyak biasanya diperoleh pada musim barat, karena terbawa ombak ke pantai, dan sebaliknya pada musim timur hasilnya relatif sedikit. Penangkapan kepiting dilakukan dengan menggunakan alat tangkap bubu (bubu kepiting) yang berbeda bentuk dan ukurannya. Beberapa jenis bubu yang digunakan oleh nelayan seperti bubu setengah lingkaran dan bubu kotak. Penggunaan bubu untuk menangkap kepiting dilakukan sepanjang hari, tidak mengenal musim. Biasanya bubu dipasang pada

sore hari dan diambil hasilnya keesokan paginya. Dari beberapa buah bubu yang dipasang, tidak semua bubu terisi kepiting, karena sebagian bubu tetap kosong. Sebagai contoh, seorang nelayan kepiting yang memiliki 75 buah bubu setengah lingkaran, pernah mendapat hasil hanya sebanyak 7,5 kg kepiting.

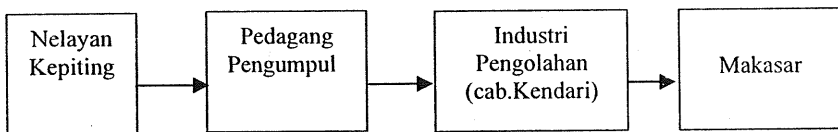
Produksi kepiting di Desa Terapung dapat diketahui dari hasil penjualan pada pedagang pengumpul kepiting. Rata-rata pedagang pengumpul kepiting dapat mengumpulkan sekitar 50 kg per hari. Pada musim Barat hasilnya lebih banyak yaitu sekitar 70 kg per hari, sedangkan pada musim Timur hanya sekitar 30- 50 kg. Di lokasi penelitian terdapat 4 orang pedagang pengumpul kepiting, apabila rata-rata dapat mengumpulkan 50 kg kepiting per hari, maka diperkirakan rata-rata hasil kepiting sekitar 200 kg per hari. Keberadaan 4 orang penampung kepiting dan satu industri pengolahan/pengepakan daging kepiting di desa ini, mencerminkan besarnya produksi dan nilai ekonomi kepiting. Kepiting memiliki nilai ekonomi tinggi, karena pemasarannya sampai ke luar daerah, bahkan kemungkinan sebagai komoditi ekspor setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut di daerah lain.



Rantai pemasaran kepiting hampir sama dengan pemasaran ikan teri, yaitu dari nelayan ke pedagang pengumpul di desa. Selanjutnya pedagang pengumpul menjual kepiting pada industri

pengolahan yang ada di desa. Biasanya nelayan mengambil kepiting dari bubu di pagi hari, kemudian langsung dibawa ke *base camp* dimana pedagang pengumpul sudah menunggu nelayan dari laut. Setelah ditimbang dan ditentukan harganya, maka kepiting dijual ke pabrik pengolahan kepiting yang berada pada *base camp* tersebut. Pengolahan kepiting di Desa Terapung merupakan cabang dari perusahaan pengolahan kepiting yang berpusat di Kendari. Hasil olahan kepiting berupa kepiting beku, diseleksi menurut beberapa kriteria, kemudian dijual ke Makasar melalui Kendari. Rantai pemasaran kepiting dapat dilihat pada Bagan 2.2 berikut ini:

Bagan 2.2. Rantai Pemasaran Kepiting



Hasil olahan kepiting dibedakan menurut ukuran yaitu A dan B dengan harga berbeda. Harga kepiting ukuran A (betina) relatif lebih mahal yaitu Rp. 20.000 per kg, sedangkan harga kepiting ukuran B (jantan) sekitar Rp. 10.000 per kg. Di Desa Terapung terdapat 4 orang pedagang pengumpul kepiting yang menampung hasil tangkapan kepiting dari nelayan. Biasanya strategi yang digunakan penampung untuk menarik nelayan menjual hasil tangkapannya, hampir sama dengan penampung ikan teri, yaitu memberi modal pada nelayan, terutama untuk membuat bubu sebagai alat penangkap kepiting. Biasanya pedagang pengumpul memperoleh pinjaman uang dari perusahaan pengolahan kepiting yang menampung kepiting dari pedagang pengumpul desa. Nelayan yang terikat pinjaman dengan pedagang pengumpul harus menjual kepiting pada penampung tersebut. Nelayan dalam upaya memperoleh harga lebih tinggi, biasanya secara sembunyi-sembunyi menjual pada pengumpul lain yang tidak ada ikatan hutang piutang. Biasanya perusahaan pengolahan kepiting menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang

pengumpul, yaitu dengan memberikan insentif/bonus sebesar Rp. 1.000 per kg untuk setiap tambahan 1 ton kepiting yang sudah dipasok ke perusahaan.

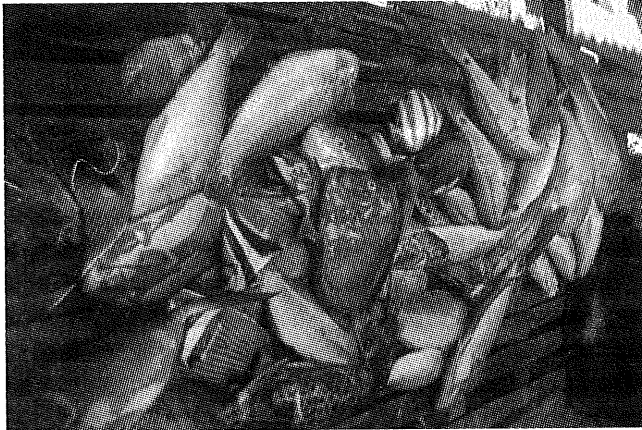
c. Ikan Karang

Produksi ikan karang di perairan laut Kecamatan Mawasangka relatif sedikit, meskipun potensinya cukup besar. Penangkapan ikan karang dilakukan oleh nelayan di Desa Wakambangura. Jenis ikan karang yang sering diperoleh adalah ikan kerapu (kerapu tikus, kerapu lumpur dan kerapu tiger), dan ikan sunu. Rantai pemasaran Ikan karang hidup dari nelayan ke pedagang pengumpul ikan karang. Penanmpung ikan karang biasanya merangkap sebagai 'bos' yang memberi pinjaman berupa peralatan tangkap dan modal, sebagai ikatan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Apabila nelayan hanya menggunakan peralatan tangkap milik bos (seperti kompresor atau keramba) maka pemilik mendapat satu bagian dari hasil tangkapan setiap melaut. Sistem bagi hasil ini dipakai oleh nelayan Desa Wakambangura, karena nelayan tidak berani hutang ke penampung atau bos.

Produksi ikan karang hidup dari Desa Wakambangura dapat diperkirakan dari jumlah ikan yang dijual pada penampung. Dalam waktu 1-2 bulan penampung dapat membeli ikan karang hidup sebanyak $\frac{1}{2}$ ton dari 5 orang nelayan ikan karang. Sementara hasil produksi ikan karang yang dijual ke penampung luar (selain bos) tidak bisa dikontrol, karena umumnya dijual secara sembunyi. Pengumpul ikan karang dari luar umumnya berani membeli dengan harga lebih tinggi, namun nelayan umumnya terikat penjualan dengan penampung lokal (tauke). Pelanggaran yang dilakukan nelayan, dapat berakibat disitanya perlengkapan tangkap milik tauke (seperti kapal, compressor dan bubu) yang selama ini digunakan nelayan.

Produksi ikan karang mati sulit diperkitakan karena penjualannya langsung pada masyarakat setempat. Sebaliknya dengan nilai ekonomi ikan karang hidup, harga ikan karang mati

sangat rendah. Jenis ikan karang hidup yang bernilai ekonomi tinggi adalah ikan kerapu, dan sunu khususnya jenis kerapu tikus super, yang harganya dapat mencapai \$30 atau sekitar Rp275.000 per kg. Sedangkan jenis ikan kerapu tikus *baby*, dihargai sekitar \$10. Kerapu lainnya (jenis lumpur dan tiger) harganya lebih murah yaitu \$4,- dan \$7,5.



Di Desa Terapung, meski potensi ikan karang besar, nelayan lebih memilih alternatif lain yang dianggap lebih menguntungkan yaitu menangkap ikan teri dan kepiting. Akibatnya nilai produksi ikan karang relatif rendah (hanya 5 % dari nilai produksi SDL). Dilihat dari upaya pelestarian terumbu karang, alternatif pekerjaan ini dinilai positif, karena nelayan jauh dari godaan mengeksploitasi ikan karang. Jumlah produksi ikan karang di Desa Terapung mengalami penurunan dibandingkan jumlah produksi dua tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi dari nelayan ikan karang, dalam dua tahun terakhir, produksi ikan karang di Desa Terapung menurun tajam dari rata-rata 300-400 kg per hari menjadi hanya 5 kg per hari/ per nelayan. Tidak tersedianya penampung ikan karang hidup di desa ini, menyebabkan nilai ekonomi ikan karang rendah, karena umumnya dijual murah di pasar setempat. Meskipun mata pencaharian sebagai nelayan sama-sama menonjol di kedua lokasi sampel, namun nelayan di Desa Terapung lebih fokus pada penangkapan ikan teri dan kepiting

sebagai andalan produksinya. Sedangkan nelayan di Desa Wakambangura lebih mengutamakan penangkapan ikan lain (seperti tuna, tongkol dan cakalang) dan ikan karang sebagai andalan produksinya. Meskipun nilai produksi ikan karang relatif kecil, namun jenis ikan karang hidup tertentu mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi.

Pemasaran ikan karang hidup (ikan kerapu dan sunu) pada dasarnya tidak berbeda dengan pemasaran ikan teri, yaitu dari nelayan ke pedagang pengumpul di kecamatan. Sebelum dijual, ikan karang hidup dipelihara di keramba milik nelayan sampai memenuhi ukuran dan berat ikan untuk layak jual. Jumlah pedagang pengumpul ikan karang hidup di Kecamatan Mawasangka hanya seorang, karena hasil tangkapannya relatif sedikit, khususnya dari nelayan di Desa Wakambangura. Biasanya nelayan memberitahu pedagang pengumpul melalui telpon sebelum transaksi penjualan ikan karang hidup dilakukan. Pedagang pengumpul menjemput ikan langsung dari keramba dengan perahu motor. Menurut informasi dari salah seorang nelayan, 2 tahun yang lalu terdapat pedagang pengumpul ke Desa Terapung untuk membeli ikan karang ke nelayan. Kemudian nelayan lebih suka menjual ke masyarakat langsung, karena harganya lebih menguntungkan. Sejak itu pedagang pengumpul tidak datang lagi untuk membeli ikan karang hidup dari nelayan di Desa Terapung.

Posisi tawar nelayan dalam penentuan harga relatif rendah. Selain karena pedagang pengumpul hanya seorang, kebanyakan nelayan ikan karang mempunyai ikatan hutang dengan tauke. Penentuan harga dilakukan oleh pedagang pengumpul, setelah ikan ditimbang, dan nelayan biasanya menerima hasil penjualan setelah dipotong hutang. Jenis ikan karang termahal adalah Kerapu Tikus yaitu 350.000/rupee per ekor (ukuran 1,3 kg), Kerapu Lumpur (7 kg ke atas) sekitar 30.000 rupee per/kg.

Tabel 2.5. Harga Ikan Karang Hidup di Tingkat Nelayan dan Pengumpul di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka Tahun 2006

Jenis Ikan	Nelayan (rupiah)	Pengumpul (\$US)
Kerapu Lumpur	30.0000 (per Kg)	4
Kerapu Tiger	55.000 (per Kg)	7,5
Kerapu Tikus (baby)	60.000 (per ekor)	10
Kerapu tikus (super)	200.000 (per Kg)	28

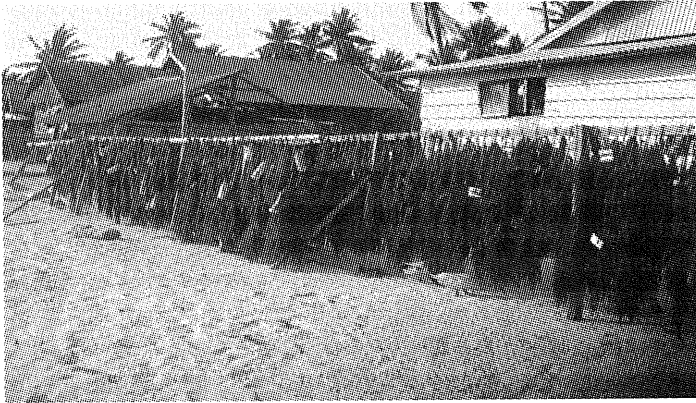
Sumber: Hasil wawancara dengan para nelayan di Kecamatan Mawasangka

d. Rumput laut

Rumput laut merupakan sumber daya laut yang banyak dihasilkan oleh nelayan di Kabupaten Buton. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian tahun 2003, produksi rumput laut di Kabupaten Buton sebanyak 7.435.526 kg per tahun, dengan rata-rata produksi rumah tangga sebanyak 16.237 kg per tahun. Budi daya rumput laut dilakukan hampir di semua kecamatan termasuk Kecamatan Mawasangka. Topografi pantai yang landai merupakan tempat yang cocok untuk budi daya rumput laut, sehingga usaha ini sangat menonjol di kawasan sepanjang pantai, dan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak penduduk/rumah tangga.

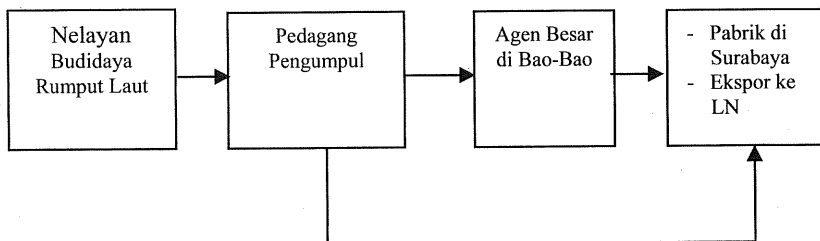
Luas area budi daya rumput laut di Kecamatan Mawasangka tahun 2006 mencapai sekitar 1086 Ha, terbesar kedua sesudah Kecamatan Lakudo (sekitar 1484 Ha), dan melibatkan sekitar 1676 RTP. Namun Kecamatan Mawasangka merupakan penghasil rumput laut tertinggi di Kabupaten Buton, yaitu 4.072 ton (27 %) (DKP Kab.Buton, 2006 : 7). Di Kecamatan Mawasangka usaha budi daya rumput laut tersebar hampir merata di setiap desa, dan potensi terbesar terdapat di Desa Mangumbangura. Luas area rumput laut di Kecamatan Mawasangka mengalami kenaikan pesat dalam setahun terakhir. Tahun 2005 luas area rumput laut baru mencapai sekitar 470

Ha, dan hampir sepertiganya (sekitar 31%) terdapat di Desa Wakambangura. (DKP, Kab. Buton, 2006: 70).



Pemasaran rumput laut hampir sama dengan pemasaran sumber daya laut lainnya, yaitu melalui pedagang penampung rumput laut setempat. Setiap pedagang pengumpul menampung hasil rumput laut kering dari beberapa nelayan, selanjutnya dari penampung dijual ke agen besar di Bau-Bau dan Surabaya. Di Desa Wakambangura terdapat tiga orang pedagang penampung rumput laut. Rantai pemasaran rumput laut dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2.3. Rantai Pemasaran Rumput Laut



Nelayan budi daya rumput laut bebas menjual hasilnya pada salah satu dari ketiga pengumpul tersebut, terutama bagi nelayan yang tidak terikat pinjaman modal dari pengumpul. Tingkat harga pada masing-masing pengumpul hampir sama yaitu sekitar 4.000 rupiah per kg pada saat penelitian dilakukan. Untuk mengikat nelayan biasanya pengumpul memberi pinjaman modal yang dibutuhkan nelayan. Sebagian besar nelayan memerlukan modal untuk membeli bibit pada musim tanam berikutnya. Untuk memulai usaha budi daya rumput laut, dibutuhkan biaya paling sedikit sebanyak 2 juta rupiah, yaitu untuk pembelian bibit dan peralatan lainnya. Menurut informasi, masih terdapat sekitar 25 persen nelayan yang membutuhkan modal untuk budi daya rumput laut, sekitar 15 persennya adalah nelayan pancing dan 85 persen buruh rumput laut. Hal ini mencerminkan budi daya rumput laut memiliki prospek yang cukup bagus, karena peminatnya semakin banyak. Nelayan yang terikat pinjaman modal dengan penampung, memiliki beban moral untuk selalu menjual hasilnya pada pemberi modal.

Penampung dapat menjual rumput laut langsung ke pabrik di Surabaya atau melalui agen besar di Bau-Bau, dan selanjutnya dijual ke pabrik di Surabaya. Harga rumput laut di tingkat pengumpul, 4.000 rupiah per kg, di tingkat agen Bau-Bau sekitar 4.300 rupiah. Sedangkan harga di pabrik Surabaya sekitar 5.000 rupiah per kg. Meskipun penjualan langsung ke pabrik lebih menguntungkan, tapi penjualan ke pabrik minimal harus mencapai 20 ton rumput laut per transaksi. Permasalahannya adalah keterbatasan pedagang pengumpul untuk mencapai target minimal 20 ton dari nelayan, sementara penjualan ke agen di Bau-Bau lebih fleksibel jumlahnya.

Tabel 2.6. Harga Rumput Laut di Tingkat Pengumpul, Agen dan Konsumen di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka, 2006

Keterangan	Harga Rumput Laut per kg (Rp)		
	Pengumpul	Agen Bau-Bau	Pabrik Surabaya
Harga	4.000	4.300	5.000
Biaya	-	100	250
Keuntungan		200	750

Sumber: Hasil wawancara dengan nelayan di Desa Wakambangura, 2006.

Pemasaran rumput laut ke Surabaya, sebagian untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan rumput laut, dan sebagian lainnya diekspor langsung ke Jerman, Amerika, Cina dan Jepang. Eksportir hanya mau menerima rumput laut yang berkualitas bagus (rumpul laut yang panjang dan besar). Biasanya kerjasama dilakukan antara pabrik dan pengusaha eksportir di Surabaya. Pada saat kurs dollar naik, pengusaha eksportir mengambil rumput laut dari agen di Bau-Bau, dan sebaliknya pengusaha eksportir menjual rumput laut ke pabrik apabila kurs dollar turun.

Hambatan utama untuk kelangsungan usaha adalah keterbatasan modal, yang biasa dialami oleh nelayan maupun pengumpul. Di satu sisi pembelian dari nelayan harus dibayar tunai, sementara pembayaran dari agen membutuhkan waktu. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengumpul adalah dengan membayar tunai kepada nelayan sebesar 50 persen dari setiap pembelian rumput laut dan sisa pembayaran dilakukan setelah agen di Bau-Bau membayar ke penampung.

Wilayah tangkap

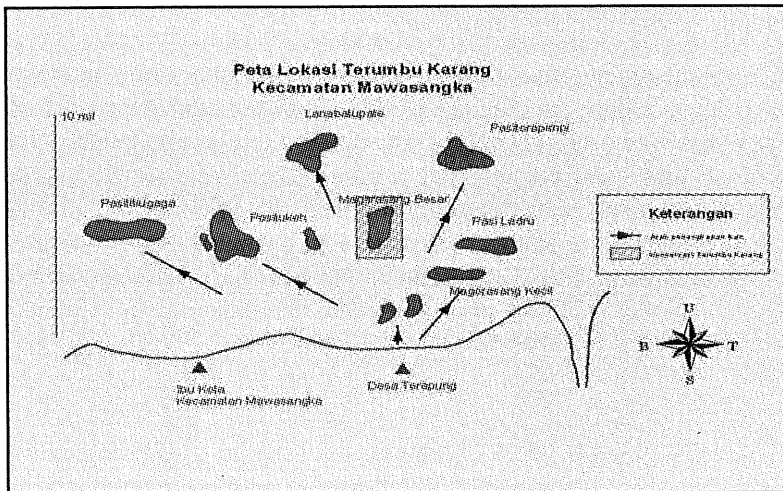
Wilayah tangkap menunjukkan wilayah laut yang dimanfaatkan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan sumber daya laut. Secara umum, jangkauan wilayah tangkap sangat

tergantung pada jenis armada dan alat tangkap. Armada tangkap kapal motor dengan kekuatan mesin cukup besar dapat menjangkau wilayah tangkap ke tengah laut. Sebaliknya kapal motor berkekuatan mesin kecil memiliki wilayah tangkap yang lebih dekat. Aturan formal wilayah tangkap nelayan ditentukan berdasarkan jarak dari garis pantai, yaitu nelayan bebas menangkap ikan pada jarak 4 mil dari garis pantai di sepanjang garis pantai meskipun melintasi batas desa. Namun di atas 4 mil dari pantai, untuk menangkap ikan melintasi batas desa, harus mendapat izin dari desa setempat. Dalam pelaksanaannya aturan ini sulit diterapkan karena adanya saling toleransi sesama nelayan dari desa lain. Setiap nelayan dianggap mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan sepanjang garis pantai. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat berusaha di bidang perikanan. Wilayah laut Desa Terapung juga dikelola oleh masyarakat setempat maupun nelayan dari luar desa dan kecamatan lain, dengan syarat hanya menggunakan alat tangkap yang sama, yaitu bagan dan tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang (seperti bom dan racun).

Lokasi penangkapan ikan masyarakat nelayan di Kecamatan Mawasangka umumnya tidak jauh dari pantai, yaitu di sekitar pantai sampai batas laut lepas keberadaan terumbu karang. Wilayah tangkap nelayan bagan berada sekitar 4 mil dari pantai. Penangkapan ikan dilakukan dengan cara berpindah-pindah ke tempat yang banyak ikan. Wilayah tangkap nelayan pancing ikan karang berada sekitar 2 -10 mil. Begitu juga wilayah penangkapan ikan laut dalam (tuna, cakalang, tongkol) sampai ke Kecamatan Siompu dan Kobaana, sekitar 2 jam perjalanan. Berdasarkan hasil diskusi terfokus diketahui bahwa nelayan Desa Terapung memancing ikan karang sampai melewati batas wilayah desa yaitu sampai Desa Guamanano. Wilayah penangkapan ikan karang paling jauh sekitar 10 mil dari garis pantai, dilakukan dengan menggunakan alat tangkap jaring. Lokasi karang yang dituju adalah karang Lanabatupateh, Pasitoropimpi dan Pasititinganga, biasanya dilakukan dengan bermalam (lihat gambar peta).

Wilayah tangkap paling dekat dilakukan oleh nelayan budi daya rumput laut, yaitu di sepanjang pantai pada jarak sekitar 30 meter dari garis pantai. Hampir semua garis pantai yang landai di Kecamatan Mawasangka sudah lama dikuasai oleh nelayan budi daya rumput laut. Aturan yang berlaku dalam masyarakat, siapa paling dulu menguasai lahan, selanjutnya lahan tersebut menjadi wilayah kekuasaannya. Pengalihan kekuasaan lahan (peminjaman) pada nelayan lain dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak.

Gambar 2.5. Peta Lokasi Penangkapan Ikan Karang Nelayan Kecamatan Mawasangka



Sumber: Survei Data Dasar Ekologi Terumbu Karang, COREMAP, 2005.

Teknologi

Teknologi penangkapan ikan dapat diketahui dari jenis-jenis alat tangkap dan armada yang digunakan oleh nelayan Desa Terapung dan Desa Wakambangura. Secara umum, teknologi penangkapan ikan oleh nelayan Desa Terapung dan Wakambangura masih sederhana. Peralatan tangkap yang digunakan masih bersifat tradisional, seperti:

bagan, pancing, jaring dan bubu dan armada tangkap yang digunakan adalah kapal motor dengan kapasitas body 5-10 GT dan mesin 22 PK. Berdasarkan data survei, armada tangkap yang digunakan oleh nelayan adalah kapal motor mesin dalam dan perahu tanpa motor. Sekitar 84 persen nelayan di Desa Terapung dan 16 persen digunakan oleh nelayan Desa Wakambangura menggunakan kapal motor mesin dalam. Sedang penggunaan armada tangkap perahu tanpa motor di gunakan oleh nelayan Desa Terapung sebesar 60 persen dan 40 persen digunakan oleh nelayan Desa Wakambangura. Armada tangkap yang berkekuatan mesin besar jumlahnya relatif sedikit digunakan oleh nelayan pancing ikan cakalang dan ikan karang dengan wilayah tangkap cukup jauh.

Pancing merupakan alat tangkap sederhana yang digunakan oleh nelayan. Jenis pancing yang digunakan beragam yaitu pancing ulur, tonda dan rawai. Pancing digunakan untuk menangkap ikan karang, cumi dan ikan laut dalam (cakalang, tuna). Untuk penangkapan ikan cakalang digunakan pancing dengan 10-17 mata pancing dan tali nomor 500 sebanyak 1 gulung. Pada musim Timur, nelayan pancing biasanya pergi melaut setiap hari dari pagi sampai sore. Sedangkan pada musim Barat penangkapan ikan dengan pancing dilakukan di sekitar pantai. Mata pancing yang digunakan dapat diganti sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap. Untuk ikan kecil digunakan mata pancing ukuran kecil, sebaliknya mata pancing besar untuk ikan ukuran besar. Pancing juga dapat digunakan untuk menangkap cumi. Mata pancing dan umpan untuk menangkap cumi harganya lebih mahal yaitu sekitar 30.000 rupiah untuk 1 set mata pancing dan umpannya.

Mayoritas nelayan di Desa Terapung menggunakan bagan sebagai alat tangkap ikan teri. Terdapat dua jenis bagan yang digunakan oleh nelayan Desa Terapung, yaitu Bagan Drom dan Bagan Sema. Mayoritas nelayan menggunakan bagan drom karena harganya relatif lebih murah, yaitu sekitar 12 juta rupiah, sedangkan harga bagan sema sekitar 70 juta rupiah. Pada umumnya nelayan memiliki bagan sendiri, dengan jalan membeli sendiri atau pinjam uang dari 'bos'. Bagan drom terdiri dari jaring dengan tiang-tiang

kayu penyangga dan di bawahnya beberapa drom diletakkan berjejer agar jaring dapat terapung di atas air. Bagan sama terdiri dari jaring dan perahu motor ukuran 16-24 PK dan di samping kiri dan kanan diberi tangan untuk menjaga keseimbangan. Penangkapan ikan dilakukan dengan menurunkan jaring pada malam hari dan menggunakan lampu untuk menarik ikan masuk ke jaring. Jaring akan diangkat nelayan setelah ikan masuk ke dalam jaring.

Bubu merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan nelayan di Desa Terapung untuk menangkap kepiting. Bubu dapat dibedakan menurut bentuk dan ukurannya yaitu bubu setengah lingkaran, bubu kotak yang berukuran lebih kecil. Bubu setengah lingkaran dibuat dari kawat dan jaring. Untuk membuat 100 buah bubu setengah lingkaran, dibutuhkan kawat sebanyak 1 kg dan 5 ons serta jaring sebanyak 6 kg. Bubu dibuat sedemikian rupa, sehingga Ikan yang sudah masuk melalui lubang dalam bubu, tidak dapat keluar lagi melalui lubang yang sama, sehingga mudah diambil oleh pemilik bubu.

Permasalahan pengelolaan sumber daya laut

Potensi sumber daya laut (SDL) di Kabupaten Buton cukup besar dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Masyarakat mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam memanfaatkan SDL tersebut, sebagai mata pencaharian utama maupun tambahan. Berbagai jenis alat tangkap digunakan nelayan untuk memperoleh beragam jenis hasil laut. Idealnya pemanfaatan hasil SDL oleh nelayan tidak mengganggu kelestarian SDL, seperti terumbu karang. Namun penggunaan beberapa alat tangkap seperti bom dan bius dapat merusak terumbu karang dan biota laut yang hidup di sekitar terumbu karang.

Penggunaan alat tangkap oleh nelayan di Desa Terapung dan Mawasangka cenderung tidak mengganggu kelangsungan sumber daya laut, seperti terumbu karang. Peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan, seperti bagan, pancing, bubu dan pemanfaatan wilayah

laut dalam pembudidayaan rumput laut tidak merusak terumbu karang, Pemanfaatan SDL juga tidak dilakukan secara berlebihan. Masyarakat pada kedua desa sampel jarang menggunakan alat tangkap bom atau bius, karena kesadaran yang meningkat dalam menjaga sumber daya laut, terutama setelah program pelestarian terumbu karang dari COREMAP dilaksanakan di wilayah binaan. Pemanfaatan sumber daya laut yang mengancam kelestarian terumbu karang, justru dilakukan oleh nelayan pendatang dari daerah lain. Nelayan setempat merasa dirugikan dengan praktek yang merusak pelestarian terumbu karang, karena makin menurunnya hasil ikan teri yang menjadi andalan nelayan Desa Terapung.

Kecamatan Kadatua

Program COREMAP di Pulau Kadatua dilaksanakan dengan pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL), yang merupakan model baru pengelolaan perikanan yang sebelumnya tidak dikenal di daerah ini. Dengan model pengelolaan ini, kini wilayah penangkapan dikuasai oleh desa atau masyarakat (*communal fishing rights*). Sebelumnya penduduk di Pulau Kadatua tidak mengenal hak atas wilayah penangkapan yang dikuasai oleh desa atau masyarakat (*communal fishing rights*). Apabila kemudian DPL mampu menjadi *fishing rights* bagi masyarakat nelayan di desa-desa lokasi COREMAP, maka masalah kelembagaan atau pranata yang terkait dengan pengelolaan DPL perlu segera dibentuk. Saat penelitian dilakukan, kelembagaan pengelolaan DPL belum terbentuk, sehingga sebagian warga belum mengerti tujuan pembentukan DPL. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, permasalahan yang dihadapi dengan program ini adalah sosialisasi DPL yang belum melibatkan semua pihak. Banyak warga yang belum memperoleh informasi tentang tujuan penetapan DPL, rendahnya partisipasi anggota masyarakat dan urutan intervensi program yang akan dilaksanakan.

Beberapa hal substansi DPL yang belum sampai ke masyarakat, antara lain soal intervensi. Gambaran pembentukan

kelompok inti, penyusunan peraturan, penentuan mekanisme pengelolaan dan pengaturan pendanaan, dan formalisasi melalui pengesahan peraturan desa belum terlihat. Selain itu, masalah partisipasi dan komitmen anggota masyarakat belum ada. Oleh sebab itu, sebagian warga masyarakat menilai DPL lebih sebagai bentuk pembatasan warga untuk melakukan aktivitas kegiatan melaut..Akibatnya, sebagian warga yang tinggal di salah satu dusun di Desa Waonu tidak menginginkan wilayah perairan di sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan DPL. Kebetulan dusun ini berencana untuk memisahkan diri menjadi desa tersendiri dalam rangka pemekaran desa.

Pemisahan dusun menjadi desa baru sangat berpengaruh terhadap penolakan penetapan DPL. Selain itu, suasana politik lokal di lokasi penelitian yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa ikut mempengaruhi persepsi terhadap DPL. Suasana perpolitikan lokal ini menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu masyarakat yang pro kandidat calon kepala desa (berasal dari kepala desa yang sedang menjabat) dengan kubu masyarakat yang berasal dari calon kandidat kepala desa baru.

Sebagai salah satu sasaran program COREMAP, desa-desa di Pulau Kadatua kini tidak dapat dikategorikan sebagai desa nelayan yang maju aktivitas perikananannya. Desa-desa yang berada di Pulau Kadatua bukan penyumbang penghasil ikan di Kabupaten Buton. Menurut informasi, di masa lalu banyak nelayan di desa-desa Kadatua yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Bahkan daerah ini merupakan penghasil bahan peledak yang terkenal di daerah Buton. Penduduk desa di Waonu misalnya, sudah terbiasa jual-beli bahan peledak untuk digunakan nelayan di sekitarnya. Bahan peledak diambil dari sisa-sisa bom PDII dari daerah Morotai, Maluku Utara. Kondisi ini menyebabkan teknologi alat tangkap tidak berkembang di daerah ini.

Jumlah dan jenis alat tangkap di desa binaan COREMAP tidak banyak, terutama apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Buton. Di Pulau Kadatua hanya terdapat 6 jenis alat

tangkap yang relatif sederhana. Salah satu alat tangkap yang paling banyak digunakan nelayan adalah pancing ulur dan sarana tangkap yang umum dipakai adalah perahu sampan dan mesin tempel. Dominasi penggunaan alat tangkap dan sarana tersebut semakin mengindikasikan bahwa nelayan Kadatua termasuk nelayan tradisional. Akibatnya ekspansi wilayah tangkap nelayan Kadatua juga tidak terlalu jauh dan hanya dilakukan di sekitar Pulau Kadatua. Tabel 2.7 menggambarkan perbandingan keragaman penggunaan alat tangkap di wilayah Pulau Kadatua dan lokasi penelitian serta Kabupaten Buton pada umumnya.

Tabel 2.7. Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Buton dan Kecamatan Kadatua

Alat tangkap	Kab. Buton	Kec. Kadatua	Lokasi Penelitian	
			Waonu	Kapoa
Pukat/Jaring				
- Payang	20	15	4	11
- Pantai	199	-	-	-
- Cincin	35	21	-	2
- Insang Hanyut	1.550	-	-	-
- Insang Lingkar	1.596	-	-	-
- Insang Lingkar	337	-	-	-
- Insang Tetap	1.596	74	22	20
Pancing				
- Huhate	5	-	-	-
- Rawai Tuna	329	-	-	-
- Rawai Dasar	168	-	-	-
- Tonda	1.594	-	-	-
- Ulur	2.936	455	158	61
- Lainnya	948	-	8	51
Perangkap				
- Sero	27	-	-	-
- Bubu	2.153	104		
Bagan				
- Perahu	424	-	-	-
- Tancap	10	-	-	-
Alat P. Kepiting	548			
Alat. P. Teripang	14	-	-	-
Alat T. Tombak	18	-	-	-
Alat Tangkap lain	350	270	15	15

Sumber: Laporan Tahunan Statistik Potensi dan Produksi Perikanan Tahun 2005.

BAB III

PROFIL SOSIAL DEMOGRAFI PENDUDUK

Bagian ini membahas profil sosial dan demografi penduduk di Kabupaten Buton, khususnya di kedua kecamatan penelitian yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua. Profil demografi meliputi jumlah dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, sedangkan profil sosial meliputi tingkat pendidikan dan pekerjaan penduduk. Pembahasan dimulai dengan jumlah dan komposisi penduduk, serta tingkat pendidikan. Selanjutnya pembahasan tentang pekerjaan penduduk di sektor kenelayanan maupun non kenelayanan. Selanjutnya pada bagian akhir profil, membahas tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.1. JUMLAH DAN KOMPOSISI PENDUDUK

Kabupaten Buton

Jumlah penduduk Kabupaten Buton tahun 2004 mencapai 265.724 jiwa (54,264 rumah tangga), dengan pertumbuhan penduduk sekitar 3,33% per tahun. Penduduk terdiri dari perempuan 133.453 jiwa, dan laki-laki sebesar 132.271 jiwa (Kabupaten Dalam Angka, 2004). Dengan demikian rata-rata rumah tangga memiliki sekitar 5 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pasarwajo (16,28%), diikuti Kecamatan Mawasangka 11,03%, Kecamatan Sampolawa 10,88% dan Kecamatan Lasalimu Selatan (10,23%),. Sedangkan persebaran penduduk di Kecamatan lainnya di bawah 10 %. Kepadatan penduduk Kabupaten Buton sekitar 107 jiwa per kilometer, wilayah terpadat adalah Kecamatan Batuatas, sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah Kecamatan Lasalimu (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2004

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Lasalimu	327,29	9.684	30
2	Lasalimu Selatan	269,11	27.187	101
4	Pasarwajo	473,00	43.257	91
7	Sampolawa	198,82	28.923	145
9	Batuatas	7,18	8.457	1234
10	Batauga	75,83	13.943	184
11	Siompu	42,50	16.147	380
13	Kadatua	23,67	10.136	428
14	Kapontori	113,00	12.748	113
15	Gu	114,00	24.940	219
17	Lakudo	225,00	23.329	104
18	Mawasangka	421,77	29.305	69
20	Mawasangka Timur	126,23	7.740	61
21	Talaga Raya	71,31	9.928	139
	K a b u p a t e n	2.488,71	265.724	107

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2004

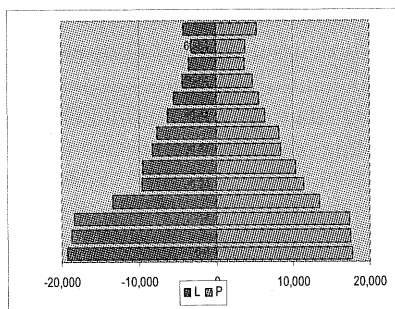
Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Buton memiliki struktur penduduk muda¹, yaitu proporsi terbesar adalah kelompok penduduk berusia 0-14 tahun (41 %). Piramida penduduk Kabupaten Buton (Gambar 3.1), menggambarkan proporsi terbesar penduduk adalah kelompok usia 0-4 tahun, sebagai indikasi relatif tingginya tingkat kelahiran di Kabupaten Buton. Semakin tinggi kelompok usia penduduk, proporsi penduduk semakin kecil. Keadaan

¹ Komposisi penduduk tergolong struktur muda (penduduk berusia dibawah 15 tahun proporsinya sebesar 40 persen atau lebih), struktur penduduk tua (proporsi penduduk dibawah 15 tahun kurang dari 30 persen), struktur penduduk sedang (proporsi penduduk dibawah 15 tahun antara 30-40 persen) dan penduduk berusia 65 tahun keatas proporsinya mencapai 10 persen atau lebih.

ini berarti jumlah penduduk Kabupaten Buton potensial untuk semakin berkembang di masa depan. Kelompok usia sekolah (5-19 tahun) cukup tinggi, yaitu sekitar 37 persen. Kondisi struktur penduduk demikian, perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah daerah, karena menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penduduk usia sekolah maupun yang akan memasuki usia sekolah. Struktur penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.

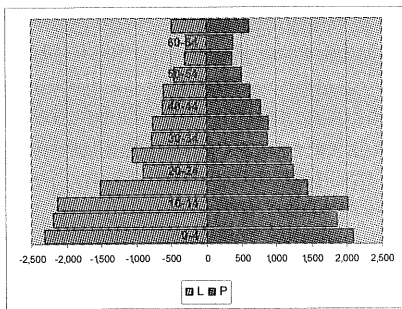
Rasio ketergantungan penduduk yaitu perbandingan penduduk usia non produktif (0-14 tahun, 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) cukup tinggi, yaitu sebesar 80 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk dewasa akan menanggung 80 orang anak-anak dan orang lanjut usia. Beban yang cukup berat ini akan semakin bertambah apabila penduduk usia produktif tersebut tidak mendapat pekerjaan yang memadai. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang potensial dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut di sekitar Kabupaten Buton.

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2004



Sumber: Kab. Buton Dalam Angka 2004

Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kecamatan Mawasangka Tahun 2004



Sumber: Kec. Mawasangka Dalam Angka 2004

Kecamatan Mawasangka

Jumlah penduduk Kecamatan Mawasangka tahun 2004 sekitar 29.305 jiwa, terdiri dari perempuan 14.883 dan laki-laki 14.422 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 97. Berdasarkan kelompok umur, struktur penduduk Kecamatan Mawasangka tergolong penduduk muda yang diindikasikan dari proporsi terbesar penduduk (sekitar 43%) berusia 0-14 tahun (lihat Gambar 3.2). Seperti halnya di tingkat kabupaten, tingkat kelahiran di Kecamatan Mawasangka relatif tinggi. Kondisi struktur penduduk muda memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) cukup besar yaitu 53 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan sebesar 87, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64) akan menanggung 87 penduduk non-produktif yaitu anak balita dan penduduk lanjut usia. Beban ketergantungan ini lebih tinggi dibandingkan kondisi di tingkat kabupaten.

Jumlah penduduk Kecamatan Mawasangka dipengaruhi oleh mobilitas penduduk ke luar, terutama ke Malaysia. Migrasi ke Malaysia maupun ke kota-kota lainnya di Indonesia, banyak dilakukan oleh penduduk Kecamatan Mawasangka. Penduduk yang keluar, pada umumnya berusia produktif dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Menjadi TKI ilegal di Malaysia dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pada musim barat atau musim angin kencang, pada umumnya mereka pergi ke Malaysia dan sebagian pulang kembali pada musim angin Timur untuk menangkap ikan di laut.

Jumlah penduduk Desa Terapung tahun 2004 sekitar 1.973 jiwa atau sekitar 6,7 persen dari jumlah penduduk seluruh kecamatan. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Terapung lebih banyak dari perempuan, yaitu 1.007 jiwa laki-laki dan 966 perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 466 rumah tangga dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sekitar 4 orang (Kecamatan Mawasangka Dalam Angka, 2004). Berdasarkan komposisi umur, penduduk Desa

Terapung tergolong sebagai penduduk muda. Proporsi terbesar (38 persen) penduduk adalah kelompok usia muda (0-14 tahun). Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun keatas) sekitar 73 orang. Angka beban ketergantungan cukup besar yaitu 87 persen yang menunjukkan setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 87 orang (anak-anak dan lanjut usia).

Penduduk Desa Terapung terdiri dari beragam suku bangsa. Mayoritas penduduk adalah Suku Bajo. Sedangkan suku suku lainnya adalah Buton, Muna, Bugis, Makasar, Minang, Jawa, dan Cina. Perkawinan campur antar penduduk dari berbeda suku bangsa sudah lama terjadi, seperti Suku Bajo dengan Muna atau Bajo dengan Buton. Masyarakat Bajo yang tinggal di desa ini, sudah banyak yang campuran yaitu hasil perkawinan dengan Suku Muna dan Buton. Bahkan keberadaan beberapa suku di desa ini terjadi karena proses perkawinan antara masyarakat setempat dengan suku lain, antara lain dengan Suku Minang.

Menurut sejarahnya, desa ini semula bernama Desa Kaudani yang menjadi tempat pemukiman masyarakat Suku Bajo. Pada tahun 1986, dilakukan *re-settlement* masyarakat Bajo dari laut ke darat. Waktu itu jumlah penduduk Suku Bajo yang masih tinggal di laut sebanyak 250 KK, kemudian dipindahkan ke darat dengan membuat pemukiman di sepanjang pinggir pantai. Dengan demikian, pada awalnya desa ini diperuntukkan sebagai desa masyarakat Bajo. Sebagian orang Bajo kembali ke tengah laut, karena tidak betah tinggal di darat dan hanya sekitar 25 persen yang masih bertahan tinggal di darat. Perkembangan penduduk Desa Terapung dipengaruhi oleh perkawinan antara masyarakat Bajo yang masih tinggal di darat dengan suku lainnya. Bahasa sehari-hari masyarakat Desa Terapung adalah Bahasa Bajo yang hampir sama dengan bahasa Bugis. Penduduk semakin bertambah karena banyak pendatang ke desa dengan tujuan berkebun. Di salah satu dusun, yaitu Dusun Air Wajo, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani kebun, seperti jambu mete, ubi, dan jagung.

Sebagai masyarakat yang sudah akrab dengan kehidupan laut, mayoritas masyarakat Bajo adalah nelayan tangkap. Masyarakat Bajo beranggapan sumber kehidupan hanya berasal dari laut, sehingga pada umumnya tidak mempunyai sumber daya darat. Hasil laut yang ditangkap adalah jenis ikan dengan alat tangkap bagan dan pancing. Sementara masyarakat berasal dari suku lain, seperti Buton, Muna, Bugis di samping melakukan pekerjaan sebagai nelayan tangkap, juga banyak yang melakukan pekerjaan lain seperti perkebunan atau pergi merantau ke Malaysia sebagai TKI. Berdasarkan informasi, pada tahun 1995 sebanyak 200 orang masyarakat Desa Terapung merantau ke Malaysia.

Desa Wakambangura mempunyai jumlah penduduk 1.488 jiwa, terdiri dari 757 perempuan dan 731 laki-laki (Kecamatan Mawasangka Dalam Angka, 2004). Berbeda dengan Desa Terapung, di desa ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, terdapat 346 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 orang setiap rumah tangga. Berdasarkan komposisi umur, penduduk Desa Wakambangura termasuk dalam struktur penduduk muda dengan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 45 persen. Penduduk yang tergolong produktif (usia 15-64) tahun sebesar 53 persen. Angka beban ketergantungan di Desa Wakambangura sebesar 87 persen.

Mayoritas penduduk di Desa Wakambangura termasuk etnis Wasilomata (99%) dan lainnya adalah suku Bajo dan Bugis. Dalam sejarahnya etnis Wasilomata adalah sekelompok masyarakat yang nenek moyangnya berasal dari tentara Kerajaan Buton. Selain di Desa Wakambangura, etnis ini juga tersebar di banyak desa lainnya di Kecamatan Mawasangka. Berbeda dengan masyarakat Bajo di Desa Terapung yang hanya mengandalkan hasil laut, masyarakat Wasilomata juga mempunyai mata pencaharian dari hasil lahan darat, yaitu 'batu tanam', berupa hasil kelapa dan kacang mete. Masyarakat desa ini banyak yang pergi merantau ke Malaysia, Kalimantan (Balikpapan), Ambon, Sulawesi (Luwu). Jumlah etnis tersebut relatif besar di Balikpapan (sekitar 8000 orang), sehingga terdapat 2 macam paguyuban yaitu Kerukunan Keluarga Wasilomata Buton (KKWB)

dan Kerukunan Keluarga Buton (KKB). Sedangkan dari sejumlah orang yang merantau ke Malaysia, lebih 100 orang berasal dari desa ini.

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden (rumah tangga) di kedua lokasi kajian terdapat anggota rumah tangga (ART) sebanyak 554 orang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Jumlah ART Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006

Kelompok Umur	Jenis Kalamín		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	14,3	14,6	14,4
5-9	10,4	12,4	11,4
10-14	8,9	11,3	10,1
15-19	11,1	11,3	11,2
20-24	13,2	10,2	11,7
25-29	10,7	9,1	9,9
30-34	6,8	5,5	6,1
35-39	6,4	6,2	6,3
40-44	3,2	6,2	4,7
45-49	4,3	4,0	4,2
50-54	2,5	1,8	2,2
55-59	2,1	1,8	2,0
60-64	3,2	2,6	2,9
65+	2,9	2,9	2,9
Jumlah	100 (280)	100 (274)	100 (554)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia, 2006

Tabel 3.2 menunjukkan struktur penduduk di lokasi penelitian adalah struktur penduduk muda, karena sekitar 40 persen ART berusia muda (0-14 tahun), dan hanya sekitar 3 persen tergolong kelompok lansia (65 tahun ke atas). Proporsi terbesar adalah kelompok Balita (0-4) tahun yang mengindikasikan relatif tingginya tingkat kelahiran di daerah ini. Penduduk usia produktif (15-64 tahun)

sebesar 57 persen, sementara penduduk dalam usia sekolah (5-14 tahun) sekitar 21 persen. Relatif tingginya penduduk usia sekolah dan minimnya fasilitas pendidikan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih sangat dibutuhkan di Kecamatan Mawasangka.

Kecamatan Kadatua

Administrasi kependudukan di Kecamatan Kadatua maupun di desa-desa sangat buruk. Hal ini dipengaruhi oleh pemekaran wilayah kecamatan, desa dan pemilihan kepala desa yang baru. Sebelum pemekaran wilayah Kecamatan Kadatua termasuk dalam wilayah Kecamatan Batuaga. Demikian pula kedua desa kajian, yakni Desa Waonu dan Desa Kapoa, sedang mengalami proses pemekaran masing-masing menjadi dua desa. Sampai penelitian usai, perangkat pemerintahan maupun sistem administrasinya belum siap. Data terakhir yang tersedia adalah Kecamatan Kadatua dalam Angka Tahun 2004.

Luas Kecamatan Kadatua sekitar 23,67 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sekitar 10.136 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.911 dan perempuan 5.225 jiwa. Desa Banabungi merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 3.318 jiwa, sedangkan desa yang terkecil jumlah penduduknya adalah Desa Lipu (892 jiwa). Jumlah penduduk di desa-desa lainnya yaitu Desa Kaofe sebanyak 1.790 jiwa, dan Desa Kapoa 1600 jiwa.

Persebaran penduduk yang tidak merata, berdampak pula pada kepadatan penduduk yang juga bervariasi. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Kaofe (pusat kecamatan), yaitu 1.228 jiwa/km², dan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Lipu (126 jiwa/km²). Kepadatan penduduk desa lainnya yaitu Desa Banabungi (760 jiwa/km²), merupakan desa terdekat dengan kota kabupaten, dan kepadatan Desa Waonu 517 jiwa/km².

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Kadatua Menurut Jenis Kelamin dan Desa Tahun 2004

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kapoa	758	842	1.600
Waonu	822	865	1.687
Kaofe	925	865	1.790
Uwemaasi	540	489	1.029
Lipu	444	448	892
Banabungi	1.422	1.716	3.138
Total	4.911	5.225	10.136

Sumber: Kadatua Dalam Angka 2004, BPS

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan di hampir pada setiap desa lebih banyak dari laki-laki. Perkecualian hanya di Desa Kaofe, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebiasaan merantau yang umumnya dilakukan oleh penduduk laki-laki. Merantau selain bertujuan mencari uang atau meningkatkan pendapatan, juga sebagai kebanggaan bagi anak laki-laki di sana. Para pendatang di suatu desa biasanya orang dari desa tetangga di Kecamatan Kadatua. Beberapa orang yang bukan penduduk asli Kadatua, pada umumnya disebabkan perkawinan perantau dari Kadatua dengan perantau dari daerah lain atau orang setempat di rantau.

3.2. PENDIDIKAN

Kabupaten Buton

Permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Karena keterbatasan data tingkat pendidikan penduduk, maka kondisi pendidikan di Kabupaten Buton dapat diketahui dari ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan. Tabel 3.4 menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Buton, yaitu setiap kecamatan umumnya mempunyai sebuah SMP dan sebuah SMA. Sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA tersebut relatif masih kurang dibandingkan dengan jumlah murid dan peminatnya. Rata-rata murid/sekolah SMP dan SMA termasuk tinggi yaitu masing-masing 332 dan 594. Ini berarti sebuah SMP menampung 332 murid dan sebuah SMA menampung 592 murid. Terbatasnya akses untuk mencapai sekolah, semakin menyulitkan siswa, terutama siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi ini tidak saja terjadi pada masyarakat nelayan tetapi juga pada masyarakat non nelayan.

Tabel 3.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Buton (Tahun 2004)

Sarana & Prasarana pendidikan	SD	SMP	SMA
Jumlah Sekolah	246	35	15
Jumlah Guru	1.518	688	308
Jumlah Murid	41.758	11.635	4121
Rata-rata Guru/Sekolah	6	20	19 (N), 7 (S)
Rata-rata Murid/Sekolah	170	332	594 (N), 115 (S)
Rata-rata Murid/Guru	28	17	17 (N), 8 (S)

Sumber: Laporan Bappeda Kabupaten Buton, 2006.

Catatan: N = Negeri. S = Swasta

Hasil survei ‘Pertanian dan Perikanan’ Kabupaten Buton (tahun 2003) menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk, terutama di kalangan nelayan. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen responden (nelayan) berusia 10 tahun ke atas berpendidikan SD ke bawah, selebihnya berpendidikan SMP dan SMA. Data ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Kabupaten Buton.

Tabel 3.5. ART (10 tahun ke atas) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton (2003)

Pendidikan	L	P	L+P
Tidak Sekolah	38,7	40,4	39,5
SD	37,9	42,8	40,2
SMP	19,3	12,5	16,1
SMA	4,0	4,3	4,2
Diploma	-	-	-
PT	-	-	-
Total	100 (11237)	100 (10118)	100 (21355)

Sumber: Survei Pertanian dan Perikanan Tahun 2003, BPS.

Kecamatan Mawasangka

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Mawasangka relatif rendah. Gambaran tersebut terefleksi dari hasil survei di kedua lokasi kajian (Desa Terapung dan Wakambangura) yang memperlihatkan gambaran pendidikan ART (umur 7 tahun ke atas) di rumah tangga responden. Mayoritas ART berpendidikan rendah, yaitu SD/kurang yaitu sebesar 86 persen. Mereka yang berpendidikan SMP sekitar 10,4 persen dan yang berpendidikan SMA hanya sepertiganya (3,1%). Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan pertama, terbatasnya fasilitas pendidikan terutama untuk tingkat SMP dan SMA. Setiap desa hanya ada satu SD, sedangkan SMP dan SMA hanya ada di kota kecamatan. Jauhnya jarak dari desa ke kota kecamatan dan terbatasnya sarana transportasi menyebabkan banyak anak kesulitan mencapai sekolah tersebut. Akibatnya banyak anak yang tamat SD, namun tidak melanjutkan ke tingkat SMP maupun SMA. Hal ini dapat diketahui dari data siswa putus sekolah di Desa Terapung maupun di Desa Wakambangura. Kedua, tersedia kesempatan kerja bagi anak-anak usia sekolah, sehingga mereka dihadapkan pada pilihan untuk bekerja, karena mencari uang relatif mudah. Hal ini dapat mengurangi motivasi untuk bersekolah, karena

memerlukan biaya yang relatif besar. Pekerjaan budi daya rumput laut di Desa Wakambangura banyak mempekerjakan perempuan dan anak-anak, begitu juga pekerjaan di *basecamp* atau industri pengolahan kepiting di Desa Terapung yang banyak menampung tenaga kerja perempuan dan remaja. Ketiga, masalah ekonomi menyebabkan kurangnya motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak. Anak usia sekolah sudah dituntut untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Biaya yang dikeluarkan untuk melanjutkan sekolah sampai ke tingkat SMP dan SMA relatif cukup besar terutama untuk biaya transportasi ke kota kecamatan. Ketiadaan alat transportasi reguler menyebabkan orang tua harus menyediakan sarana transportasi seperti motor. Sedang jika tinggal di kota kecamatan maka harus mengeluarkan biaya pemondokan dan biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua yang dapat menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SMP atau SMA, umumnya juga mampu secara ekonomi. Di samping itu, sebagian masyarakat juga masih meragukan pentingnya arti pendidikan bagi masa depan anak.

Tingkat pendidikan responden di Desa Terapung lebih baik dibandingkan Desa Wakambangura. Proporsi ART dengan pendidikan rendah (tidak sekolah dan belum tamat SD) di Desa Wakambangura lebih besar dibandingkan Desa Terapung. Sebaliknya proporsi ART tingkat SD ke atas, di Desa Terapung lebih besar dibandingkan di Desa Wakambangura. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak, karena sarana dan akses sekolah lebih mudah di Wakambangura daripada di Desa Terapung.

Tabel 3.6. ART (7 tahun ke atas), Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin , Kecamatan Mawasangka Tahun 2006

Pendidikan	Desa Terapung	Desa Wakambangura	Total
Belum/Tidak Sekolah	13,5	16,8	14,4
Tidak/ belum tamat SD	30,4	38,3	33,3
SD	39,9	36,5	38,7
SMP	12,4	7,2	10,4
SMA Ke atas	4,2	1,2	3,1
Total	100 (283)	100 (167)	100 (450)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

- **Keterampilan**

Keterampilan sangat penting bagi masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Semakin banyak keterampilan dimiliki seseorang/keluarga, semakin mudah keluarga memperoleh tambahan penghasilan. Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat masih terbatas variasinya. Berkaitan dengan kegiatan kenelayanan, masyarakat nelayan mempunyai keterampilan antara lain dalam pembuatan alat tangkap seperti bubu, jaring bahkan beberapa terampil membuat kapal/perahu. Keahlian dalam membuat peralatan kenelayanan umumnya dimiliki oleh nelayan yang umumnya laki-laki. Namun demikian keterampilan dalam pengolahan sumber daya laut sangat jarang dimiliki oleh masyarakat, terutama makanan dari bahan ikan. Pengolahan sumber daya laut masih terbatas pada pengeringan dan pengasinan, biasanya dilakukan oleh pedagang pengumpul dan/atau industri pengolahan. Keterampilan lain yang dikuasai adalah di bidang bangunan, membuat pintu, lemari, kursi dan ketrampilan dalam menenun, terutama tenun kain khas Buton. Keterampilan ini umumnya dimiliki oleh perempuan, dan kini kegiatan menenun kain hanya dilakukan oleh para ibu-ibu yang memperoleh keahliannya secara turun menurun dari para orang tua. Namun ketrampilan bertenun ini cenderung makin berkurang dan

bahkan hampir musnah, karena kurangnya minat para remaja untuk melanjutkan budaya tenun.

Kecamatan Kadatua

Seperti di daerah lainnya, tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di daerah ini relatif rendah yaitu mayoritas belum tamat Sekolah Dasar. Bagi generasi muda, kesadaran untuk bersekolah mulai meningkat, sehingga rata-rata anak usia sekolah berada dalam pendidikan sekolah dasar maupun menengah. Sementara, di kalangan penduduk berusia relatif tua, masih banyak yang belum lancar membaca huruf latin. Sebagai gambaran tentang kondisi pendidikan di Kecamatan Kadatua dapat dilihat berikut ini: (Tabel 3.7)

Tabel 3.7. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kadatua

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
Taman Kanak-Kanak	6	15	330
Sekolah Dasar	7	55	1485
SLTP	2	33	492

Sumber: Kec.Kadatua dalam Angka 2004, Kantor Statistik Kab. Buton

Sarana pendidikan yang terbatas di Kecamatan Kadatua khususnya SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) yang hanya 2 unit dan SMU yang belum ada, menyebabkan kendala bagi anak usia sekolah yang ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah (SLTP atau SMU). Namun saat penelitian berlangsung, proses pembangunan Sekolah Menengah Umum (SMU) swasta hampir selesai. Keinginan masyarakat Pulau Kadatua memiliki SMU terkait dengan problem lulusan SMP di Kadatua yang jumlahnya semakin meningkat, sementara untuk melanjutkan ke tingkat SMU, mereka harus pergi ke kota Bau-bau, sehingga membutuhkan biaya relatif besar (termasuk biaya kost). Pendirian SMU Swasta tersebut untuk mengatasi semakin meningkatnya lulusan SMP. Gambaran rendahnya

pendidikan di Pulau Kadatua, dapat dilihat dari hasil survai terhadap 100 rumah tangga responden di lokasi kajian (Desa Kapoa dan Waonu) pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ART Responden di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	N	%
1. Belum/tidak sekolah	64	13,6
2. Belum/Tidak Tamat Sekolah Dasar	164	34,9
3. Tamat Sekolah Dasar	114	24,3
4. Tamat Sekolah Menengah Pertama	98	20,9
5. Tamat Sekolah Menengah Atas	30	6,4
Jumlah	470	100,0

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

Upaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di daerah ini menghadapi kendala antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, dan kendala ekonomi. Pendapatan yang relatif rendah, mengakibatkan banyak orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Faktor lain adalah jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal siswa, sehingga siswa harus memiliki kendaraan atau kost di dekat sekolah. Keberadaan angkutan desa (angdes) tidak selalu memberi kemudahan bagi siswa untuk pergi ke sekolah. Biaya transport anak sekolah yang berbeda dengan penumpang biasa, menyebabkan siswa sering menemui kesulitan untuk diangkut oleh angdes, karena memprioritaskan penumpang lain yang mau membayar dengan biaya transport lebih mahal.

Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat adalah kebiasaan/tradisi pernikahan dini, yang menyebabkan anak-anak yang masih remaja, harus bekerja karena sudah berkeluarga. Tiga alasan yang biasa dikemukakan dalam pernikahan dini, yakni **pertama** menghindari perbuatan amoral /

zinah: **kedua** tidak banyak lagi aktivitas selain bersekolah; dan **ketiga** orang tua sudah berkeinginan mempunyai cucu.

Masalah lain yang juga sangat mengganggu kelanjutan pendidikan adalah kebiasaan laki-laki untuk merantau. Jika seseorang merantau, anak yang ditinggal seringkali kacau pendidikannya, karena kesulitan biaya dan tiadanya pengawasan. Seringkali pula pola merantau dilakukan bersama keluarga, sehingga pendidikan anak-anak menjadi kacau, terutama apabila di tempat rantau tidak ada sarana sekolah yang dibutuhkan. Kini beberapa penduduk sudah mulai melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, terutama pendidikan guru (diploma). Hal ini juga kami temukan selama penelitian, yaitu mahasiswa perguruan swasta di Bau-bau yang membantu sebagai asisten peneliti (pewawancara) maupun sarjana IPB sebagai responden di Desa Kapoa.

Di daerah ini pelatihan-pelatihan untuk masyarakat jarang dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi swasta lainnya. Beberapa pelatihan yang pernah dilakukan antara lain pelatihan menggunakan *redi* untuk nelayan di Desa Kapoa (oleh LSM Lakamali). Pelatihan menenun sarung untuk penenun wanita, pelatihan administrasi keuangan bagi kelompok ibu-ibu penenun, dan pelatihan teknik membangun rumah.

3.3. PEKERJAAN

Kabupaten Buton

Menurut data BPS (Kabupaten Buton dalam Angka 2004) jumlah penduduk usia kerja (10 tahun/lebih) di Kabupaten Buton sebanyak 192.462 jiwa, terdiri dari 94.196 laki-laki (48,9%) dan perempuan sebanyak 98.266 jiwa (51,1 %). Dari jumlah tersebut jumlah angkatan kerja sebanyak 115.800 jiwa. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berstatus bekerja dan pengangguran terbuka. Jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 102.090 jiwa atau sekitar 53 persen dari penduduk usia kerja.

Tabel 3.9. Penduduk Usia Kerja (10 tahun ke atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Kabupaten Buton, 2004

No	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	49.093	28.032	77.125
2	Pertambangan & Penggalian	287	254	541
3	Industri	2.831	2.156	4.987
4	Listrik dan Gas	17	40	57
5	Konstruksi	1.337	-	1.337
6	Perdagangan	5.108	5.295	10.403
7	Transportasi & Komunikasi	2.936	40	2.976
8	Keuangan	111	33	144
9	Jasa	3.510	1.010	4.520
10	Lainnya	-	-	-
	Jumlah	65.240	36.850	102.090

Sumber: Kabupaten Buton dalam Angka 2004, BPS

Sektor pertambangan, khususnya aspal, merupakan sumber daya alam yang cukup potensial di Kabupaten Ambon, baik karena jumlah maupun kualitasnya. Namun demikian potensi aspal belum tergarap dengan baik, meskipun mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut seorang informan (dari Bappeda Kabupaten Buton), eksploitasi tambang aspal baru mencapai sekitar 10 persen, karena kesulitan memperoleh investor.

Sektor pertanian (termasuk perikanan) merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Buton, yaitu sebanyak 77.125 jiwa (atau sekitar 75,6 % dari total penduduk usia kerja yang bekerja). Sektor lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu 10.403 jiwa (sekitar 10%) dan sektor industri sebesar 4.987 jiwa (sekitar 5%). Sektor pertanian belum bisa menjadi andalan perekonomian penduduk Kabupaten Buton, karena kondisi tanahnya yang berbatu-batu, miskin unsur hara dan terbatasnya sumber air. Hasil tanaman

pangan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Buton, sebagian lainnya dijual dalam perdagangan antar pulau. Beberapa jenis tanaman komersial perkebunan yang diperdagangkan antar pulau antara lain kopra, jeruk dan jambu mete. Usaha perikanan yang dilakukan masyarakat pantai umumnya masih bercorak tradisional dan berskala kecil. Para nelayan menggunakan sampan dengan motor atau katingting, bahkan tanpa motor sekalipun, untuk mencari ikan. Usaha penangkapan ikan dilakukan secara individual atau grup kecil (2-3 orang) dalam satu sampan. Introduksi teknologi tangkap baru seperti pukat cincin (*redi*) dengan operasi penangkapan yang memerlukan banyak awak kapal mulai diminat penduduk, karena hasilnya relatif banyak.

Perdagangan ikan antar pulau juga memberikan kontribusi cukup besar, yakni terbesar kedua setelah komoditi perkebunan. Pada tahun 2004, komoditi tertinggi yang diperdagangkan antar pulau adalah jeruk, kopra dan jambu mete. Komoditi lain yang cukup potensial adalah perikanan yang mencapai 2.303 ton dengan nilai 28.336.787 rupiah. Dari hasil perikanan tersebut, komoditi terbesar adalah agar-agar (rumput laut) dengan nilai 23.053.750 rupiah (81,35%).

Pola kerja penduduk cenderung bersifat '*pluri-activity*', yaitu mencurahkan waktu dan tenaga pada lebih dari satu bidang. Misalnya selain bidang pertanian/perikanan, juga berdagang. Di beberapa kecamatan, perdagangan antar pulau sudah lama diminati penduduk, terutama perdagangan pakaian. Sedangkan usaha pertanian dan perikanan hanyalah sebagai usaha sampingan.

Sektor perekonomian lain yang kini semakin diminati dan mampu menyerap banyak tenaga kerja adalah perkembangan kelompok pertokoan, kios/warung serta pasar umum dan pasar ikan. Tahun 2004 di Kabupaten Buton sudah terdapat 5 kelompok pertokoan dan 2.130 kios/warung serta 58 pasar umum dan 6 los pasar ikan.

Kecamatan Mawasangka

Kecamatan Mawasangka merupakan salah satu dari 7 kecamatan binaan COREMAP di Kabupaten Buton sejak tahun 2004. Wilayah ini merupakan salah satu dari 3 wilayah pesisir di kawasan darat bagian barat, sedangkan 2 wilayah pesisir lainnya berada di wilayah bagian timur dari Kabupaten Buton. Sebagai daerah pesisir, potensi yang menonjol di kawasan ini adalah sumber daya laut (SDL), yaitu beragam biota laut, seperti berbagai jenis ikan karang yang hidup di sekitar terumbu karang dan berbagai jenis ikan lainnya yang hidup dalam ekosistem mangrove dan lainnya. Potensi SDL di wilayah ini terdiri dari beragam jenis ikan baik ikan karang maupun non-karang. Potensi SDL yang beragam memungkinkan tersedianya berbagai kegiatan kenelayanan dengan berbagai alat tangkap ikan, nelayan bagan, nelayan pancing dan sebagainya. Kehidupan yang terkait dengan potensi laut, juga memungkinkan dilakukannya berbagai usaha budi daya, baik yang terkait dengan perikanan (kramba, mutiara) maupun pertanian seperti rumput laut.

Kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya darat terutama lahan yang ditanami pertanian pangan dan lahan perkebunan untuk tanaman keras. Untuk pertanian pangan meliputi tanaman ubi kayu seluas 1500 Ha (sekitar 56%), jagung seluas 1.130 Ha (sekitar 43%) dan selebihnya untuk tanaman ubi jalar yaitu seluas 25 Ha (sekitar 1%). Sedangkan tanaman perkebunan yang menonjol adalah jambu mete yang memanfaatkan lebih dari 90% lahan perkebunan yang tersedia (BPS Kab. Buton, 2005: 66). Potensi sumber daya darat yaitu pertanian pangan dan tanaman keras di perkebunan, memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan di pertanian sebagai petani, atau di perkebunan sebagai petani kebun, baik sebagai pemilik maupun buruh kupas jambu mete.

Sejalan dengan potensi yang tersedia di Kecamatan Mawasangka, maka lapangan pekerjaan utama penduduk juga berkaitan dengan potensi SDL yaitu perikanan tangkap, dengan jenis pekerjaan utama sebagai nelayan. Terkait dengan potensi SDL yang besar juga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang

berkaitan dengan budi daya baik terkait dengan perikanan maupun rumput laut. Usaha budi daya rumput laut ini hampir merata di semua desa di Kecamatan Mawasangka, baik sebagai pekerjaan utama maupun tambahan. Tenaga kerja yang terlibatpun beragam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, keluarga maupun orang lain.

Di luar sektor pertanian, lapangan pekerjaan sangat terbatas, terutama industri pengolahan, karena pada umumnya nelayan menjual hasil produksinya berupa ikan segar. Usaha pengeringan ikan sudah dilakukan, meskipun secara terbatas, terutama oleh penampung ikan. Demikian pula usaha pemisahan daging kepiting rebus di lokasi penelitian. Sedangkan pengolahan biji jambu mete terbatas pada kegiatan pengupasan dan pengeringan. Pengolahan sederhana berbagai hasil pertanian tersebut memerlukan tenaga kerja sebagai buruh. Kegiatan lainnya sebagai pedagang terbatas pada pedagang kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari (seperti penjual ikan, sayur mayur dan sembako), pengrajin (misal membuat bubu, perahu), dan beragam jasa (seperti guru, aparat desa, bidan, dukun tukang ojek dan lain-lain). Gambaran lengkap tentang jumlah penduduk usia produktif menurut kegiatan ekonomi di tingkat kecamatan, sulit diperoleh baik dari Kecamatan Dalam Angka, maupun catatan di kantor kecamatan. Hasil wawancara mendalam dengan informan (termasuk dengan tenaga lapangan COREMAP) dan pengamatan selama di lapangan, hanya memungkinkan perkiraan tentang ragam jenis pekerjaan yang ditemukan di wilayah tersebut. Sedangkan untuk mengetahui kegiatan ekonomi penduduk di lokasi penelitian, diperoleh dari tabulasi hasil survei, baik untuk kepala keluarga maupun anggota rumah tangganya.

Pekerjaan

Gambaran tentang lapangan dan jenis pekerjaan di lokasi survei meliputi pekerjaan utama dan tambahan, baik yang terkait langsung dengan terumbu karang maupun secara tidak langsung terkait dengan SDL. Jenis pekerjaan yang langsung terkait dengan terumbu karang antara lain perikanan tangkap, budi daya ikan karang,

perdagangan, jasa, industri pengolah hasil laut, dan penambangan (karang, pasir). Sedangkan kegiatan yang tidak langsung terkait biasanya merupakan kegiatan alternatif yang positif untuk mencegah kerusakan terumbu karang seperti berbagai kegiatan budi daya (rumput laut, ikan keramba, kepiting, mutiara), kegiatan di lahan pertanian dan perkebunan, jasa, pengrajin dan perdagangan. Untuk mengetahui variasi kegiatan ekonomi di lokasi kajian, dibatasi pada tabulasi tentang lapangan pekerjaan responden (KRT) dan anggota rumah tangga (ART), karena jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dari gambaran lapangan pekerjaannya (variasi jenis pekerjaan pada masing-masing lapangan pekerjaan sangat kecil atau hampir sama).

- ***Pekerjaan kepala rumah tangga (KRT)***

Secara garis besar potensi SDL dan sumber daya darat hampir sama di kedua lokasi, namun terdapat variasi yang berbeda dalam besarnya proporsi masing-masing kegiatan/lapangan pekerjaan, serta anggapan responden terhadap kegiatan tersebut (pekerjaan utama atau tambahan). Tabel 3.10, menyajikan variasi lapangan pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan responden (KRT) di kedua lokasi penelitian.

Sejalan dengan potensi SDL yang menonjol di kedua lokasi penelitian, proporsi terbesar responden mempunyai lapangan pekerjaan perikanan tangkap, atau kegiatan kenelayanan, yaitu sekitar 45 persen sebagai pekerjaan utama dan sekitar 30 persen sebagai pekerjaan tambahan. Demikian pula proporsi terbesar kedua juga sama di kedua lokasi, yaitu usaha budi daya rumput laut, baik sebagai pekerjaan utama (23%) maupun pekerjaan tambahan (sekitar 22%). Perbedaan proporsi masing-masing lapangan kerja di kedua lokasi menunjukkan adanya variasi SDL yang dimiliki wilayah tersebut, serta intensitas kegiatan nelayan sehubungan dengan perubahan musim. Di Desa Terapung proporsi kegiatan penangkapan ikan lebih menonjol sebagai lapangan pekerjaan utama (sekitar 57%), sementara di Desa Wakambangura, keterlibatan responden di usaha budi daya rumput lebih besar (sekitar 33%) daripada di Terapung (sekitar 17%).

Keadaan sebaliknya dengan lapangan pekerjaan tambahan, meskipun proporsi sebagai nelayan perikanan tangkap tetap terbesar di kedua lokasi, proporsi responden di perikanan tangkap lebih menonjol di Desa Mangumbangura (sekitar 33%) dibandingkan dengan nelayan di Terapung (sekitar 28%). Sebaliknya di Terapung proporsi responden dalam usaha budi daya rumput laut lebih besar dibandingkan di Wakumbangura, meskipun perbedaannya kecil (23 dan 20%). Keadaan ini berkaitan dengan perbedaan keragaman jenis SDL dan intensitas kegiatan kenelayanan di kedua lokasi, yaitu nelayan di Terapung tidak teralalu terpengaruh dengan perubahan musim, karena di musim teduh mereka umumnya menangkap ikan teri dan pada musim angin barat (gelombang kuat) mereka masih ke laut untuk menangkap kepiting. Kedua komoditi ini mempunyai pasaran dan nilai ekonomi tinggi. Sementara di Wakumbangura, nelayan hanya menangkap ikan pada musim teduh, dan beralih ke budi daya rumput pada musim lainnya.

Tabel 3.10. Responden Menurut Lapangan Pekerjaan (Utama dan Tambahan), menurut Desa, Kecamatan Mawasangka, 2006

Lapangan Pekerjaan	Utama			Tambahan		
	Terapung	Mangumbangura	Total	Terapung	Mangumbangura	Total
Perikanan tangkap	56,7	27.5	45	28.3	33.3	30.1
Pertanian pangan	3.3	12.5	7.0	3.8	6.7	4.8
Tanaman Keras	11.7	5.0	9.0	17.0	15.7	16.9
Industri Pengolahan	1.7	-	1.0	11.3	3.3	8.4
Perdagangan	3.3	2.5	3.0	11.3	3.3	8.4
BD Rumput laut	16.7	32.5	23.0	22.6	20.0	21.7
Jasa	3.3	7.5	5.0	-	3.3	1.2
Bangunan	-	10	4	1.9	6.7	3.6
Tidak bekerja	3.3	2.5	3.0	3.8	6.7	4.8
Total	100 (60)	100 (40)	100 (100)	100 (53)	100 (30)	100 (83)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

Pengamatan di lapangan menunjukkan kegiatan sebagai nelayan umumnya dimonopoli kaum lelaki, sementara kegiatan budi daya rumput laut merupakan kegiatan keluarga karena melibatkan semua anggota keluarga, termasuk istri dan anak-anak. Laki-laki biasanya berperan dalam membawa dan memasang tali dan bibit rumput laut ke tengah laut. Sedangkan keterlibatan perempuan terutama pada waktu panen rumput laut dan mengganti tali dengan bibit baru, yang diambil dari hasil panen. Pada tahap ini membutuhkan penyelesaian cepat untuk menjaga kualitas hasil produksi, sehingga melibatkan banyak tenaga untuk menyelesaikannya, baik anggota rumah tangga maupun orang lain. Kaum perempuan dianggap lebih tepat untuk mengikat rumput ke tali, karena lebih trampil dan teliti. Sedangkan anak laki-laki sering dilibatkan untuk mencuci tali yang sudah selesai di panen.

Tersedianya lahan pertanian (pangan dan perkebunan) di kedua lokasi, juga menyediakan lapangan pekerjaan sebagai petani pangan dan tanaman keras utamanya jambu mete, yang hasil produksinya dikenal luas di kawasan Mawasangka. Proporsi responden sebagai petani terbesar ketiga sesudah perikanan dan budi daya rumput laut, terutama sebagai pekerjaan tambahan (sekitar 22%) dan sebagai pekerjaan utama (sekitar 16%). Tampaknya sebagai pekerjaan tambahan banyak responden yang memfokuskan sebagai petani kebun, dengan proporsi yang hampir sama (17% dan 16% masing-masing di Terapung dan Wakambangura), karena mete merupakan komoditi yang lebih menguntungkan sebagai sumber pendapatan, sementara kegiatan sebagai petani pangan terbatas pada tanaman palawija terutama jagung, ubi kayu dan ubi jalar, yang pemanfaatannya terutama untuk keperluan konsum keluarga.

Selain pertanian, jumlah responden yang terlibat dalam lapangan pekerjaan lain relatif sedikit (16%), umumnya sebagai lapangan pekerjaan tambahan atau pekerjaan alternatif antara lain di luar lokasi (perantauan). Di kedua lokasi penelitian banyak penduduk yang biasa merantau ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri (umumnya ke Malaysia), dengan bekerja sebagai buruh bangunan atau sebagai tenaga penjual di perdagangan. Biasanya mereka

merantau di luar musim teduh, karena tidak mempunyai pekerjaan sambilan di luar kegiatan nelayan (terutama di Wakambangura), yang potensi SDL dan lainnya terbatas dibandingkan Desa Terapung.

- ***Pekerjaan anggota rumah tangga (ART)***

Seperti telah diuraikan di atas, banyak ART yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan, baik sebagai pekerja keluarga maupun pekerjaan berupah, baik pekerjaan kenelayanan maupun non-nelayan. Untuk mengetahui keterlibatan ART dalam kegiatan ekonomi, Jumlah ART (umur 10 taun ke atas) yang berstatus bekerja sebanyak 232 orang. Tidak berbeda dengan kegiatan utama responden, kegiatan yang menonjol untuk ART juga di sektor pertanian, terutama kegiatan sebagai nelayan dan budi daya rumput laut (Tabel 3.11).

Tabel 3.11. Distribusi ART Menurut Lapangan Pekerjaan dan Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006

Lapangan Pekerjaan	Desa (persen)		Total
	Terapung	Wakambangura	
Perikanan tangkap	49	15	36
Pertanian pangan	1	10	5
Tanaman Keras	11	8	10
Kehutanan	1	-	-
Industri Pengolahan	7	3	6
Perdagangan	9	11	9
BD Rumput laut	16	31	22
Jasa	5	4	5
Bangunan	1	18	7
Total	100 (141)	100 (91)	100 (232)

Sumber: Data Priiner, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

Tabel 3.11 menunjukkan pola kegiatan ekonomi ART yang relatif sama di kedua lokasi yaitu kegiatan yang menonjol di kedua lokasi adalah kenelayanan (36%), budi daya rumput laut (22%) dan

pertanian lain (15%). Kegiatan ART sebagai nelayan di Terapung lebih menonjol (49%) dibandingkan di Wakambangura, sementara ART di Wakambangura lebih banyak terlibat dalam usaha budi daya rumput laut (31%). Kesamaan pola ini menunjukkan keterlibatan ART di lokasi masih tergantung pada kegiatan orang tuanya, baik sebagai pekerja keluarga (tanpa upah), maupun sebagai tenaga yang dibayar (menerima bagi hasil, atau upah untuk kegiatan usaha keluarga (seperti buruh budi daya dan/atau buruh mengupas mete). Hal ini juga terungkap dari wawancara mendalam dengan informan nelayan bagan, yang selalu mengikut sertakan keluarga (anak laki-laki) setiap melaut, dengan bagi hasil yang sama (lihat kasus nelayan bagan di Bab 4). Demikian pula keterlibatan anak-anak perempuan dalam mengikat bibit rumput laut dengan tali, dengan motivasi mendapat uang sekitar Rp10.000 per hari (upah 10 tali) (lihat kasus budi daya rumput laut di Bab 4).

Perbedaan terjadi pada keterlibatan ART untuk lapangan kerja lainnya, terutama bangunan dan perdagangan, yang cukup menonjol terutama untuk ART di Desa Wakambangura (masing-masing 18% dan 11%). Seperti dijelaskan sebelumnya, keterbatasan lapangan pekerjaan di Desa Wakambangura, mendorong anak-anak muda yang tidak mau melakukan kegiatan sebagai nelayan pergi merantau ke luar daerah, antara lain ke Balikpapan, Ambon, Timika, Luwuk, bahkan ke Malaysia, terutama sebagai buruh bangunan (tenaga kasar) dan tenaga penjual di toko atau kaki lima. Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat di Desa Wakambangura, mengungkapkan banyaknya anak muda dari desa ini yang merantau ke luar daerah, khususnya ke Balikpapan. Diperkirakan lebih dari 8000 jiwa etnis Wasilamata (etnis terbesar di Kecamatan Mawasangka), bekerja di sana dan ikut dalam paguyuban Kerukunan Keluarga Buton (KKB) dan Kerukunan Keluarga Wasilamata Buton. Keterlibatan ART di industri pengolahan, terutama buruh di industri pengolahan kepiting dan pengeringan teri yang hanya terdapat di Desa Terapung. Sedangkan di Desa Wakambangura hampir tidak ditemukan industri pengolahan, sehingga 10 dari 13 orang ART yang bekerja di industri pengolahan, terdapat di Terapung.

Banyak ART yang mulai melakukan kegiatan ekonomi pada usia yang relatif muda yaitu 10 tahun ke atas, umumnya mereka tidak sekolah lagi, karena keterbatasan sarana sekolah dan transportasi. Fasilitas sekolah lanjutan pada umumnya berada di kota kecamatan, yang berjarak sekitar 8 Km dari Desa Mangumbangura dan sekitar 17 Km dari Terapung. Mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi harus ke kota kecamatan atau ke Bau-bau. Keadaan ini menyebabkan banyak anak usia sekolah yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setamat dari Sekolah Dasar. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan penduduk di lokasi kajian. Sebagian besar ART yang bekerja (sekitar 86%) hanya berpendidikan SD atau kurang, bahkan sekitar 28 persen tidak tamat SD. Selain tingkat pendidikan yang relatif rendah, ketrampilan mereka dalam pengelolaan SDL dan sumber daya darat juga terbatas, sehingga kurang menciptakan lapangan pekerjaan baru di lokasi dan tidak memberi nilai tambah dengan hasil produksi laut maupun darat (COREMAP II, 2005). Langkanya lapangan pekerjaan yang memadai di desa juga makin mengurangi animo anak muda untuk melanjutkan sekolah, sehingga mereka lebih cepat masuk pasar kerja, di lokasi maupun pergi merantau. Meskipun sekitar 14 persen ART yang berstatus bekerja berpendidikan SLTP ke atas, namun pola pekerjaan relatif sama, yaitu proporsi terbesar (24%) terlibat pekerjaan sebagai nelayan, dan sekitar 12 persen sebagai tenaga kerja di budi daya rumput laut. Hal ini berarti perbedaan tingkat pendidikan, kurang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jenis dan lapangan pekerjaannya. Hal ini juga mengindikasikan keterbatasan jenis dan lapangan pekerjaan di lokasi kajian, sehingga banyak penduduk mengandalkan mata pencahariannya dari sumber daya laut (tabel tidak disertakan).

Berdasarkan analisa tentang pekerjaan responden (dan ART) di lokasi kajian, tampaknya sebagian besar responden dan keluarganya terlibat dalam pekerjaan yang langsung berkaitan dengan pengelolaan SDL, terutama perikanan tangkap, dan pengolahan hasil tangkapan. Namun demikian eksploitasi penangkapan ikan masih dalam batas yang wajar, demikian pula alat tangkap yang digunakan

seperti bagan, bubu, jaring dan pancing, merupakan alat tangkap yang dinilai ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang. Menurut informasi dari banyak informan, nelayan setempat tidak pernah menggunakan peralatan yang merusak karang seperti bom, racun maupun trawl. Lagipula masyarakat nelayan di Desa Terapung memfokuskan penangkapan ikan lebih pada jenis non-karang, sehingga dinilai sangat positif untuk menjaga terumbu karang dari eksploitasi berlebihan. Demikian pula keterlibatan sebagian besar responden di Desa Wakambangura pada budi daya rumput laut dan pekerjaan-pekerjaan non-nelayan, juga dinilai positif untuk mengurangi ketergantungan nelayan pada ikan karang yang selama ini menjadi andalan mata pencaharian nelayan. Di Desa Wakambangura di mana kesempatan kerja di luar SDL amat terbatas, dikuatkan nelayan setempat meniru praktek-praktek penangkapan ikan karang yang merusak terumbu karang yang biasa dilakukan oleh nelayan dari luar.

Kecamatan Kadatua

Pekerjaan sebagai nelayan.

Pada umumnya penduduk yang tinggal di Desa Waonu dan Kapoa mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, meskipun umumnya sebagai nelayan tradisional yang sifatnya subsisten. Hal ini ditandai dengan penggunaan sarana dan alat penangkapan ikan yang umumnya masih sederhana, yakni pancing ulur dan perahu tanpa motor. Sedangkan penggunaan alat tangkap yang relatif lebih modern terdapat di Desa Kapoa, yakni pukat cincin yang relatif masih baru dikembangkan oleh sebuah LSM di Buton (satu tahun). Perkembangan pukat Cincin terutama di Desa Kapoa berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Namun demikian, alat tangkap ini berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan yang menggunakan jaring insang (*gillnet*), sebagai alat tangkap yang sudah berakar lama di kawasan ini.

Dilihat dari jenis sarana dan alat penangkapan yang digunakan oleh sebagian besar nelayan di kedua desa ini, nelayan di kedua desa ini dapat dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Hasil tangkapan ikan umumnya digunakan untuk konsumsi keluarga, apabila berlebih baru dipasarkan pada pembeli di sekitarnya yang kebetulan tidak melaut (tetangga). Hasil penangkapan ikan hampir tidak pernah dipasarkan ke luar desa, ke kota, serta ke lapisan pedagang pengumpul yang umumnya beroperasi di desa. Pekerjaan nelayan dengan menggunakan sampan atau perahu bermotor dan alat tangkap pancing atau jaring pada umumnya dilakukan oleh kaum lelaki. Namun demikian kaum wanita umumnya juga pergi ke tepi pantai di pagi hari untuk mencari ikan dan biota laut (duri babi, kerang-kerangan), terutama air surut. Jenis ikan seperti duri babi dan kerang-kerangan banyak ditemukan di lokasi ini dan merupakan lauk /makanan pokok penduduk desa ini.

Pekerjaan non-perikanan yang cukup menonjol adalah matapencaharian sebagai penenun tradisional yang umumnya dilakukan kaum perempuan. Sebagian besar penenun tradisional di Desa Kapoa, memproduksi sarung atau bahan pakaian, hanya untuk memenuhi kebutuhan pesanan, atau pembeli datang ke desa. Tidak jauh berbeda dengan tenun tradisional, berkebun atau bertani adalah matapencaharian sambilan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Perkebunan jambu mete misalnya, tidak intensif diusahakan. Hasil mete biasanya dikumpulkan dan dijual ke Buton apabila sudah banyak. Penanaman ubi kayu umumnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sebagai makanan tradisional dan sekaligus pengganti beras.

Warung-warung yang terdapat di desa lokasi COREMAP tidak berfungsi sebagai penunjang kebutuhan melaut nelayan, seperti yang biasanya terjadi di desa-desa nelayan umumnya. Biasanya warung di desa nelayan memiliki peran sangat besar sebagai penunjang kebutuhan logistik melaut, karena dimiliki oleh juragan darat atau punggawa yang merangkap sebagai tauke atau bos bagi nelayan. Status pekerjaan sebagai juragan darat atau punggawa tidak ada di lokasi COREMAP di Pulau Kadatua. Namun demikian, di lokasi ini kemungkinan bisa terjadi, terutama dengan

diperkenalkannya alat penangkap ikan seperti pukat cincin (redi) di Dusun Kapoa.

Pekerjaan sebagai nelayan tidak terlalu diinginkan oleh penduduk di kedua desa, atau pekerjaan sebagai nelayan, bukan merupakan sumber utama penghasilan. Pekerjaan yang lebih disukai penduduk adalah berdagang pakaian di perantauan. Beberapa responden yang di wawancarai mengatakan sebagai berikut:

“Pulang ke desa hanya untuk beristirahat. Mencari ikan di di sini hanya untuk dimakan. Penduduk disini tidak mau kerja mencari ikan, karena ikan di sini dihargai murah”

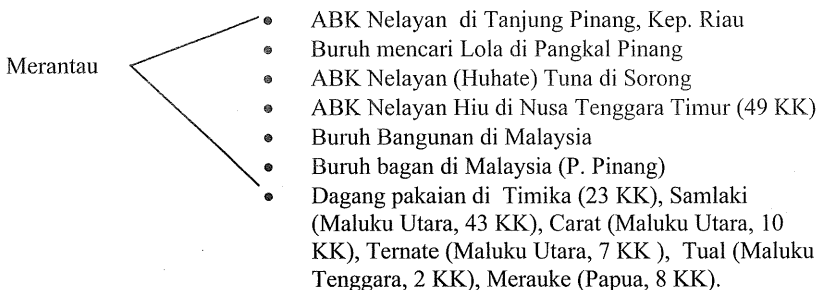
Kalaupun ada penduduk Desa Waonu dan Kapoa sebagai nelayan, mereka lebih senang mencari ikan di perantauan, seperti ikan Hiu di NTT. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan nelayan di perantauan lebih besar dibandingkan di lokasi, sehingga dapat menambah modal berdagang. Sebagai strategi pengumpulan modal, pekerjaan lain yang banyak dilakukan di perantauan adalah buruh bangunan, terutama di Malaysia. Pekerjaan sebagai nelayan cenderung dilakukan di perantauan, guna menambah penghasilan rumah tangga. Pekerjaan lainnya adalah buruh bangunan ataupun berdagang. Namun demikian, pekerjaan yang paling digemari penduduk adalah berdagang pakaian di perantauan, karena dianggap lebih menguntungkan. Pekerjaan lain (termasuk sebagai nelayan) di perantauan dipahami sebagai strategi dalam mendapatkan modal untuk berdagang di perantauan.

Keberhasilan penduduk desa yang bekerja di perantauan dapat dilihat dari bangunan rumah yang dimiliki. Pengamatan di lapangan memperlihatkan bangunan rumah yang bagus pada umumnya kosong karena penghuninya masih dirantau atau ditempati oleh familinya. Hal ini semakin mendorong warga untuk berdagang pakaian ini di perantauan, terutama sejak dioperasikan kapal PELNI dengan route antarkota di kawasan Timur Indonesia, seperti Merauke, Saumlaki, Biak, Timika, dan Ternate.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa penduduk di kedua desa pantai ini lebih menyukai bekerja sebagai pedagang bukan sebagai nelayan?. Kecenderungan ini sebenarnya merupakan kebiasaan yang berasal dari orang tua, yang sudah biasa berdagang dan juga merupakan penyelam yang handal dengan maksud mencari sisa-sisa bom PD II, yang kemudian dijual sebagai barang dagangan. Sekitar tahun 50-an, dari hasil menyelam, orang tua mereka memperoleh misiu (bahan peledak) antara lain di perairan sekitar Morotai dan Biak, kemudian dijual sebagai barang dagangan. Oleh sebab itu, Pulau Kadatua sebenarnya lebih dikenal sebagai pusat perdagangan bahan peledak, daripada sebagai daerah nelayan. Bom biasanya diangkut ke Kadatua, kemudian digergaji untuk mengambil misiunya. Harga mesiu per kg sekitar 9.000,-. rupiah Pembeli mesiu pada umumnya datang ke desa ini. Matapencaharian seperti ini tentu ada resikonya. Menurut catatan sudah 7 orang meninggal dunia saat menggergaji bom. Di Polsek Bau-bau pernah terjadi peledakan bom hasil sitaan dari penduduk Pulau Kadatua.

Kegiatan perdagangan misiu berakhir pada tahun 1970-an karena masuknya bahan peledak yang berasal dari pupuk tanaman untuk perkebunan Kelapa Sawit (pupuk Cap Matahari). Pupuk pertanian Malaysia masuk ke Indonesia lewat Nunukan terus dibawa ke Wangi Wangi.

Strategi Bekerja di Perantauan Penduduk Desa Waonu dan Kapoa Untuk Meningkatkan Penghasilan



Produksi pasca-panen

Produksi pasca-panen, seperti ikan asin, ikan asap, atau ikan fufu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok pangan pada musim paceklik, seperti produksi ikan layang atau malalugis (*descapterus spp*) di Sulawesi Utara. Produksi pasca panen juga terjadi karena ada permintaan pasar ikan asin dan/atau hasil produksi ikan tersebut melimpah. Di Buton, aktivitas untuk proses ikan asin terdapat di Bau-bau, dan pasar untuk perdagangan ikan asin tersedia di Buton. Di lokasi binaan COREMAP, di Pulau Kadatua dipastikan tidak terdapat kegiatan produksi pasca panen. Hal ini terjadi di samping karena tidak ada pasar untuk jenis ikan asap atau ikan asin, penduduk tidak memiliki pola kebiasaan mengkonsumsi ikan yang diawetkan. Penduduk juga tidak melakukan proses pengawetan hasil laut untuk mengatasi kebutuhan protein di musim angin barat. Ini berarti penduduk di desa binaan COREMAP di Pulau Kadatua, tidak mengalami kesulitan mendapatkan ikan di musim barat. Penduduk di Pulau Kadatua biasa mencari ikan atau biota laut, seperti gurita, bulu babi, kerang-kerangan (jenis kerang-kerangan mata tujuh) di sepanjang pantai.

Kegiatan produksi pasca panen di lokasi COREMAP, dilakukan penduduk untuk hasil pertanian ubi kayu. Ubi kayu (dan bulu babi) merupakan jenis makanan tradisional (Kaswami) orang Buton di Pulau Kadatua. Ubi kayu diawetkan untuk dijadikan stok pangan dan alternatif pengganti beras. Di Pulau Kadatua, ubi kayu ditanam secara tradisional, tanpa pemberian pupuk, meskipun pada umumnya lahan tidak subur. Tanah di Pulau Kadatua adalah tanah berbatu besar, sehingga penanaman ubi kayu dilakukan di sela-sela batuan besar. Ubi kayu yang ditanam di Pulau Kadatua, umumnya sebagai bahan baku untuk membuat tepung tapioka, yang rasanya agak pahit. Untuk menghilangkan rasa pahit, biasanya ubi kayu dijemur atau diproses, sebelum dibuat bahan makanan. Umur tanaman ubi kayu jenis ini sekitar 10 bulan.

3.4. KESEJAHTERAAN PENDUDUK

Bagian ini mendiskripsikan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton umumnya dan Kecamatan Mawasangka dan Kadatua khususnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kepemilikan aset produksi dan kondisi tempat tinggal. Penduduk yang memiliki aset produksi dalam jumlah besar, diasumsikan mampu memperoleh penghasilan dari pemanfaatan aset produksi yang dimiliki. Demikian pula penduduk yang memiliki tempat tinggal relatif bagus dan berkecukupan, dapat diasumsikan memiliki tingkat kesejahteraannya yang relatif lebih baik.

3.4.1. Pemilikan dan Penguasaan Aset Produksi

Kepemilikan aset produksi biasanya digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Jenis aset produksi terdiri dari aset perikanan tangkap (sarana dan alat tangkap) dan perikanan budidaya (lahan, keramba, jaring dan sebagainya).

Kabupaten Buton

Pemanfaatan sumber daya laut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat nelayan di Kabupaten Buton, khususnya di Kecamatan Mawasangka dan Kadatua. Disamping mengindikasikan besarnya pemanfaatan sumber daya laut, banyaknya 'arring' produksi yang dimiliki juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Kepemilikan dan penguasaan aset produksi merupakan salah satu 'arring' untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Aset produksi dibedakan atas aset perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kepemilikan 'arring' produksi dapat dibedakan atas status kepemilikan pribadi dan kepemilikan sewa.

Pemilikan sarana perikanan tangkap

Perahu motor adalah armada tangkap yang penting bagi masyarakat nelayan. Dengan menggunakan perahu motor diharapkan wilayah tangkap akan lebih luas, sehingga hasil laut yang diperoleh

akan semakin banyak. Namun berdasarkan data survei Pertanian dan Perikanan pada tahun 2003, jumlah perahu motor yang dimiliki oleh rumah tangga nelayan di Kabupaten Buton sekitar 2.738 unit. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6.470 unit, maka tidak semua rumah tangga memiliki perahu motor. Hal ini menunjukkan kepemilikan asset sarana produksi pada masyarakat nelayan di Kabupaten Buton, relatif rendah.

Sarana produksi yang banyak dimiliki oleh rumah tangga nelayan adalah perahu jukung (4.158 unit). Armada ini mempunyai 'arring' yang lebih sederhana dilihat dari teknologi yang digunakan. Jukung merupakan armada tangkap yang relatif murah (paling murah), sehingga banyak digunakan oleh nelayan Buton (sekitar 4.158 unit). 'Arring' merupakan armada tangkap lain yang digunakan oleh nelayan untuk memancing di sekitar pantai. Armada tangkap yang agak modern adalah kapal motor yang jumlahnya sebanyak 387 unit di Kabupaten Buton. Dibanding armada tangkap lain, harga kapal motor 'arring' lebih mahal sehingga tidak semua nelayan dapat memilikinya. Namun sebagian nelayan dapat memiliki kapal motor dengan cara menyewa pada nelayan atau bos. Jumlah kapal motor yang disewakan sebanyak 254 unit.

Kecamatan Mawasangka

Berdasarkan hasil survei di kedua lokasi survei (Desa Terapung dan Wakambangura), sekitar 32 persen rumah tangga memiliki perahu motor dalam, 28 persen memiliki perahu tanpa motor dan 14 persen memiliki perahu motor tempel. Tidak semua rumah tangga memiliki armada tangkap, baik kapal motor maupun kapal tanpa motor, karena sebagian rumah tangga responden mempunyai mata pencaharian sebagai petani atau usaha budidaya rumput laut. Sebagian nelayan yang tidak memiliki perahu motor, biasanya melaut dengan menumpang kapal motor milik orang lain dan membayar sewa. Sebagai contoh di Desa Terapung sebanyak 50 persen nelayan bagan tidak memiliki kapal motor atau perahu. Perahu motor tersebut memiliki berbagai ukuran mesin yang terdiri dari :

kelompok kurang dari 5 PK, (5-19 PK), (20-30 PK) dan di atas 30 PK. Hasil survei menunjukkan bahwa untuk perahu motor dalam, sebanyak 50 persen perahu motor berukuran mesin 5-20 PK dan 47 persen berukuran 20-30 PK. Sedangkan untuk perahu motor tempel, mayoritas (83 persen) menggunakan mesin ukuran 5-19 PK.

Berdasarkan kepemilikan alat tangkap, sebanyak 31 persen rumah tangga memiliki bagan, 30 persen memiliki pancing dan 20 persen jaring (Tabel 3.13). Mayoritas alat tangkap nelayan di Desa Terapung adalah bagan, sedangkan di Desa Wakambangura adalah pancing dan jaring. Kebanyakan jenis bagan yang dimiliki adalah bagan drom, lainnya bagan perahu dan bagan tancap. Bagan drom banyak dimiliki masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan bagan perahu dan bagan tancap. Bubu dapat digunakan untuk menangkap kepiting dan ikan karang. Bubu kepiting banyak digunakan oleh nelayan Desa Terapung sementara bubu ikan karang digunakan oleh nelayan di Wakambangura. Berdasarkan informasi dari nelayan, jumlah bubu yang dimiliki nelayan Desa Terapung adalah sebanyak 170 unit dengan bermacam bentuk, seperti bubu setengah lingkaran, bubu kotak yang ukurannya lebih kecil dan sebagainya. Sedangkan jumlah bubu yang dimiliki nelayan di Desa Wakambangura lebih sedikit, yaitu sebanyak 20 unit.

Tabel 3.13. Rumah Tangga dengan Pemilikan Alat Tangkap di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka Tahun 2006

Asset produksi	Jumlah RT (N)
Karamba	7
Bagan	31
Bubu	7
Jaring	20
Pancing	30
Tambak	2

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

Di Desa Wakambangura, alat tangkap utama yang banyak dimiliki nelayan adalah pancing. Berdasarkan Monografi Desa jumlah alat pancing sebanyak 166 unit, dimiliki oleh 350 rumah tangga. Berbagai jenis pancing yang biasa digunakan adalah pancing tonda, rawai, ronda dan pancing ikan hiu. Pancing tonda dan pancing rawai merupakan alat pancing yang banyak dimiliki oleh masyarakat nelayan, sedangkan pancing ikan tuna dan ikan hiu, dimiliki oleh sebagian kecil nelayan. Pancing ulur digunakan untuk menangkap ikan hidup, sedangkan pancing tonda atau rawai menghasilkan ikan mati. Alat tangkap lainnya yang banyak dimiliki nelayan adalah jaring atau pukat. Jumlah jaring di Desa Terapung sekitar 98 unit dan di Desa Wakambangura sekitar 33 unit.

Pemilikan sarana perikanan budidaya

Usaha budidaya perikanan dan sumber daya laut yang dikembangkan adalah budidaya rumput laut dan keramba ikan. Luas usaha budidaya rumput laut sekitar 21 Ha, di sepanjang pantai Desa Wakambangura, melibatkan sebagian besar nelayan. Sedang di Desa Terapung budidaya rumput laut hanya dilakukan oleh nelayan di Dusun Air Wajo, karena kondisi pantainya memungkinkan untuk budidaya rumput laut.

Keramba digunakan oleh nelayan untuk memelihara ikan hidup (terutama ikan karang) sebelum dijual ke pedagang pengumpul. Jumlah nelayan ikan karang hidup di Desa Wakambangura relatif sedikit, sehingga keramba hanya dimiliki oleh 7 rumah tangga.

Kecamatan Kadatua

Perbandingan kepemilikan sarana penangkapan ikan tahun 2003 dan 2005, dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika perubahan kepemilikan asset produksi berdasarkan jenis alat tangkap. Selama periode tersebut telah terjadi penambahan asset produksi yaitu kapal motor dengan “mesin dalam”, sedangkan jumlah perahu

mesin tempel mengalami penurunan. Pada umumnya kepemilikan kapal motor dianggap sebagai indikator untuk mengukur kemajuan kepemilikan asset produksi perikanan, karena memiliki nilai manfaat lebih besar dibandingkan dengan perahu mesin tempel. Bagaimana dengan penurunan kepemilikan perahu tempel yang terjadi seiring dengan kenaikan pemilikan kapal motor?. Dilihat dari perubahan yang terjadi, tampaknya jumlah kenaikan kapal motor relatif sedikit dibandingkan dengan penurunan kepemilikan perahu mesin tempel.

Tabel 3.14. Perbandingan Pemilikan Sarana Penangkapan Ikan RT Nelayan di Kecamatan Kadatua (Tahun 2005 dan 2003)

Jenis Sarana Penangkapan Ikan	2005*)	2003**)
Kapal Motor	550	387
Perahu Motor Tempel	1.984	2.739
Perahu Tanpa Motor	3.809	686

*) Laporan Tahunan Statistik Potensi dan Produksi Perikanan, 2005

**) Sensus Pertanian, BPS 2003

Indikator lain untuk melihat perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Buton adalah asset kepemilikan alat penangkapan ikan. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa selama 2 tahun terjadi peningkatan yang cukup besar "arring" insang, tetapi di lain pihak perangkap ikan (trap) mengalami penurunan jumlah yang cukup besar pula. Perubahan ini berarti telah terjadi penggantian alat tangkap yang semula untuk jenis-jenis ikan karang, menjadi alat tangkap untuk jenis-jenis ikan permukaan. Hal ini merupakan fenomena menarik, karena kemungkinan pergeseran alat tangkap ini terkait dengan semakin berkurangnya ikan karang yang disebabkan oleh rusaknya berbagai ekosistem terumbu karang.

Tabel 3.15. Perbandingan Alat Penangkapan Ikan RT Nelayan di Kecamatan Kadatua (2005 dan 2003)

Jenis Alat Penangkapan Ikan	2005*)	2003**)
Pukat Tarik	199	94
Jaring Insang	3.486	532
Jaring Angkat	434	637
Pancing	5.980	7.169
Perangkap	2.180	7.620
Alat Pengumpul Rumput Laut, Penangkap Kerang, Teripang dan Kepiting	580	464

*) Laporan Tahunan Statistik Potensi dan Produksi Perikanan, 2005

**) Sensus Pertanian, BPS 2003

Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Tahun 2003 memperlihatkan bahwa sekitar 20 persen rumah tangga nelayan mengalami perbaikan keadaan ekonomi, dan sekitar 50 persen ekonomi rumah tangga nelayan tidak mengalami perubahan. Sedangkan rumah tangga nelayan yang mengalami kemunduran keadaan ekonomi sekitar 30 persen. Perbandingan antara rumah tangga yang mengalami kemunduran keadaan ekonomi lebih banyak daripada rumah tangga yang mengalami perbaikan. Situasi ini kemungkinan berkaitan dengan kecenderungan beralihnya orientasi masyarakat nelayan dari alat perangkat ke “arring insang”.

Tabel 3.16. Perbandingan Keadaan Ekonomi RT Nelayan di Kecamatan Kadatua Tahun 2002 dan 2003

Perbandingan Keadaan Ekonomi	Jumlah RT	Persen
Sangat Meningkat	79	1,22
Meningkat	1226	18,95
Sama saja	3814	58,95
Sedikit Menurun	1018	15,73
Sangat Menurun	333	5,15
Total	6470	100,00

Sumber: Sensus Pertanian, BPS 2003

Salah satu ukuran kesejahteraan yang muncul dari masyarakat setempat adalah pemilikan alat tangkap perikanan. Menurut masyarakat ukuran kurang sejahtera apabila kekurangan modal dan tidak memiliki kentiting atau sampan dayung. Dari survai yang dilakukan terhadap 100 responden di lokasi COREMAP menunjukkan terdapat 34 persen responden yang memiliki asset produksi berupa “perahu mesin dalam”, dan sebagian besar (sekitar 82 %) menggunakan mesin dengan ukuran 5.5 PK. Sedangkan sekitar 39 persen responnen memiliki perahu tanpa motor, dan hanya 4 persen nelayan yang memiliki sarana perahu tempel. Selebihnya sekitar 23 persen adalah kelompok nelayan yang tidak memiliki perahu. Nelayan yang tidak memiliki asset alat tangkap di lokasi COREMAP tetap dapat bertahan hidup, karena mereka dapat mencari ikan dan biota laut di pinggiran pantai terutama pada saat air surut. Di samping itu, nelayan juga dapat meminjam sampan dari nelayan yang memiliki tanpa dipungut beaya.

Tabel 3.17. Pemilikan Sarana Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006

No.	Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah	Persen
1.	Perahu mesin dalam	34	34
2.	Perahu mesin tempel	4	4
3.	Perahu tanpa mesin	39	39
4.	Nelayan tanpa perahu	25	25
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

Tingkat kesejahteraan penduduk di lokasi COREMAP di Pulau Kadatua dapat dilihat pula dari kepemilikan tabungan. Survai terhadap 100 responden menunjukkan bahwa sekitar 43 persen responden mengaku memiliki tabungan, berupa perhiasan (37%) dan uang (6%). Tabungan berupa perhiasan tampaknya menjadi pilihan penduduk di kedua desa di dalam menyimpan kekayaan, terutama untuk mengatasi kesulitan keuangan. Upaya mengatasi kesulitan,

sekitar 32 persen menyatakan dengan menggadaikan barang perhiasan, dan 29 persen dengan pinjam uang kepada tetangga atau warung terdekat. Kesulitan keuangan yang menjadi problem rumah tangga di kedua desa tersebut, terutama untuk kebutuhan makanan dan pendidikan. Gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Desa Waonu dan Kapoa dilihat dari pemilikan asset rumah tangga sebagai berikut.

Tabel 3.18. Jumlah Pemilikan Asset RT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Kadatua Tahun 2006

No.	Asset RT	Jumlah (unit)	Persen
1.	Televisi	43	43
2.	VCD Player	31	31
3.	Parabola	4	4
4.	Perhiasan	4	4
5.	Kendaraan bermotor	1	1

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

3.4.2. Kondisi Tempat Tinggal

Kondisi tempat tinggal digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kondisi tempat tinggal yang akan didiskripsikan meliputi status penguasaan tempat tinggal, sumber penerangan, jenis bahan bakar yang digunakan, jenis atap rumah, dinding dan lantai, sumber air minum dan penggunaan fasilitas buang air besar serta sanitasi lingkungan.

Kabupaten Buton

Pada umumnya penduduk di Kabupaten Buton memiliki tempat tinggal sendiri. Berdasarkan data Sensus Pertanian dan Perikanan pada tahun 2003 (Tabel 3.19), sebesar 80 persen penduduk memiliki tempat tinggal sendiri dan 19 persen tinggal di rumah orang

tua atau saudara. Penduduk yang tinggal di rumah sewa hanya 1 persen, kemungkinan mereka adalah pendatang yang tinggal untuk sementara. Jenis atap yang banyak dipakai untuk rumah penduduk di Kabupaten Buton terbuat dari sirap (sekitar 75 persen) dan ijuk rumbia (sekitar 16 persen). Jenis dinding dari tembok hanya digunakan oleh 16 persen penduduk dan dinding dari bambu sekitar 13 persen. Jenis dinding yang tidak ada kategorinya cukup besar yaitu 65 persen. Berdasarkan pemilikan rumah, jenis atap dan dinding yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk mencerminkan bahwa kondisi tempat tinggal penduduk di Kabupaten Buton masih sederhana.

Tabel 3.19. Jumlah RT Nelayan Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Jenis Atap dan Dinding Rumah, Kabupaten Buton Tahun 2003

Keterangan	N	%
Status tempat tinggal		
Milik Sendiri	5.163	80
Sewa	0	0
Bebas Sewa	88	1
Rumah Dinas	0	0
Rumah orang tua/ sdr	1.219	19
Total	6.470	100
Jenis atap rumah		
Beton	34	0,5
Genteng	352	5
Sirap	0	0
Seng	4.830	75
Asbes	228	4
Ijuk/rumbia	1.026	16
Total	6.470	100
Jenis dinding rumah		
• Tembok	1.026	16
• Kayu	0	0
• Bambu	870	13
• Lainnya	4.213	65
Total	6.470	100

Sumber: Sensus Pertanian dan Perikanan Tahun 2003, BPS

Kecamatan Mawasangka

Pada umumnya status tempat tinggal masyarakat di Kecamatan Mawasangka adalah milik sendiri atau kepunyaan orang tua atau saudara. Sebagian besar tempat tinggal masyarakat berbentuk rumah panggung yang dan tiang penyangga dari kayu. Biasanya di kolong rumah digunakan untuk memasak dan melakukan kegiatan produksi seperti bertenun, mengikat rumput laut atau mengolah jambu mete. Kondisi tempat tinggal atau perumahan nelayan secara umum masih sederhana. Sebagian besar rumah nelayan berbentuk rumah panggung yang terbuat dari papan dan atap terbuat dari seng. Masih ada sebagian kecil rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, berukuran sangat kecil, dinding dan atapnya terbuat dari anyaman rumbia. Kondisi rumah seperti ini mencerminkan tingkat kemiskinan penduduk masih cukup besar di Kecamatan Mawasangkan. Berdasarkan data dari Bappeda tahun 2004, Kecamatan Mawasangka tergolong salah satu kecamatan miskin di Kabupaten Buton, karena sekitar 65 persen dari 6.774 KK, tergolong miskin. Hanya beberapa rumah yang sudah permanen dan kondisi bagus. Sebagian besar rumah masyarakat terletak di daratan, hanya sebagian kecil rumah di Desa Terapung yang terletak di sepanjang pantai, yaitu pemukiman orang Bajo.

Sebagian besar tempat tinggal masyarakat Di Desa Terapung terdiri dari rumah panggung yang terbuat dari kayu. Meskipun pola pemukiman sudah tertata namun kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kurang terjaga kebersihannya. Keadaan ini dapat dilihat dari sampah yang dibuang sembarangan dan genangan air di sekitar permukiman penduduk. Lokasi wilayah yang relatif rendah dari permukaan laut, menyebabkan pada waktu pasang, air laut sering menggenangi permukiman penduduk. Perumahan dan lingkungan masyarakat di Desa Wakambangura relatif lebih baik dibandingkan Desa Terapung. Kondisi permukiman di Desa Wakambangura relatif lebih tertata rapi dibandingkan keadaan di Desa Terapung. Sebagian besar penduduk tinggal di sepanjang pantai sampai agak menjorok ke daratan. Kondisi pantai yang lebih landai menyebabkan tidak

memungkinkan bagi nelayan untuk tinggal di atas laut. Kondisi lingkungan relatif lebih baik, karena tidak terlihat adanya sampah berserakan di sekitar tempat tinggal. Sebagian besar masyarakat sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, dan sebagian kecil masih menggunakan sumber penerangan dari minyak tanah.

Air bersih merupakan salah satu permasalahan bagi masyarakat di Kecamatan Mawasangka, terutama masyarakat di Desa Terapung dan Desa Wakambangura. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau. Sumber air sumur masyarakat nelayan tidak bisa dikonsumsi karena rasanya agak asin. Air sumur hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Untuk keperluan masak dan air minum, umumnya masyarakat membeli dari para penjual keliling dengan harga Rp. 2.500 per derijen. Di musim hujan, pada umumnya masyarakat menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari.

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk keperluan sehari-hari adalah minyak tanah. Namun sebagian masyarakat masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Kayu sangat mudah diperoleh di sekitar tempat tinggal. Hanya beberapa rumah saja yang menggunakan kompor gas.

Di Kecamatan Mawasangka terdapat sumber mata air, namun lokasinya relatif agak jauh dari lokasi permukiman dan melalui jalan yang turun seperti goa, dan licin di waktu hujan. Jumlah air cukup banyak dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk semua penduduk di Kecamatan Mawasangka. Dengan sepeda motor lokasi mata air dapat ditempuh sekitar 15 menit dari permukiman penduduk di Desa Terapung. Melalui program PPK, sekitar 2 tahun yang lalu pernah dilakukan pengaliran air dari sumber mata air ke permukiman penduduk dengan menggunakan pipa. Namun kini kondisi pipa banyak rusak, sehingga untuk mendapatkan air, penduduk harus ke mata air lagi. Di luar musim hujan, kebutuhan air untuk minum dan lain-lain dilakukan dengan membeli atau mengambil dari mata air .

Sarana MCK yang dimiliki masyarakat minim sekali, sebagian besar rumah tangga tidak memiliki fasilitas WC dan kamar mandi. Sebagian kecil rumah tangga yang memiliki kamar mandi dan WC permanen yaitu para aparat desa dan mereka yang relatif mampu secara ekonomi.

Kecamatan Kadatua

Perumahan penduduk terletak di sepanjang jalan utama Kecamatan Kadatua, atau jalan utama membelah dua permukiman penduduk. Jumlah perumahan yang berada di dekat pantai lebih sedikit dibandingkan jumlah perumahan yang mengarah ke bukit. Posisi perumahan yang berada di dekat pantai letaknya membelakangi pantai, begitu juga perumahan yang mengarah ke bukit posisinya membelakangi bukit. Rumah-rumah umumnya dibangun di dataran rendah. Sedangkan dataran yang lebih tinggi merupakan daerah peladangan dengan berbagai jenis tanaman antara lain ketela pohon, jagung, pohon jambu mete, dan pisang.

Tipe rumah juga dibagi dua, yakni rumah panggung dan rumah dinding. Rumah panggung lebih banyak dipilih orang sebagai tempat tinggal karena faktor kenyamanan, banyak angin yang masuk, biaya murah, tahan gempa dan bila banjir datang airnya hanya menggenang di kolong rumah. Bahan bangunan hanya terdiri dari kayu dan bambu yang bisa diperoleh di lokasi. Pada umumnya atap rumah berasal dari daun nyiur yang diperoleh dari desa. Keunikan rumah panggung di kecamatan ini adalah sangat minim menggunakan paku, dan umumnya hanya disambung-sambung saja. Kalau mau pindah hanya diangkat begitu saja.

Kolong rumah panggung merupakan tempat orang menaruh hewan-hewan ternaknya, seperti kambing, itik dan ayam. Selain itu ditaruh juga di kolong tersebut perabot rumah tangga yang sudah usang dan kayu-kayu bahan bangunan maupun kayu bakar. Sering terdapat pula balai-balai untuk istirahat atau sekedar duduk-duduk. Ketinggian kolong rumah panggung sekitar 1,5 meter ke atas. Rumah-rumah yang terletak berdekatan dengan laut umumnya membuat

kolong rumah yang cukup tinggi. Jika banjir datang, air laut naik menggenangi kampung. Menurut penduduk belum pernah terjadi banjir besar yang sampai menghancurkan desa-desa di Kecamatan Kadatua.

Rumah dinding hanya dimiliki oleh sedikit penduduk, kebanyakan milik orang yang sudah merantau ke Malaysia atau pedagang yang berhasil. Bentuk rumah dinding ini menunjukkan adanya pengaruh dari luar daerah. Biaya pembuatan rumah tersebut sangat besar bagi penduduk setempat karena banyak mendatangkan material dari luar pulau, seperti kayu dan semen. Dengan pemilihan rumah ini, status sosialnya dianggap meningkat, lebih modern terlebih kalau disertai perlengkapan lain seperti parabola, VCD, TV dan berbagai macam perabot yang mahal.

Sebuah rumah umumnya dimiliki keluarga luas (*extended family*) yang terdiri dari dua atau tiga keluarga batih (*nuclear family*) Suatu rumah biasanya terdiri dari beberapa kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Kamar-kamarnya hanya sedikit, biasa dihuni oleh pasangan suami-istri, perempuan yang sudah beranjak remaja atau orang tua. Anak-anak lebih sering tidur di ruang tengah. Sering dijumpai orang-orang tidur di sembarang tempat, bahkan di area dapur. Kalau siang hari orang suka tidur atau beristirahat di balai-balai yang terletak di kolong rumah atau di samping rumah.

Rata-rata pemilihan tanah dengan bangunan rumah maupun pemilihan ladang belum bersertifikat, namun hanya surat pengakuan dari desa. Luas rumah rata-rata sekitar 50-100 m². Dengan preferensi pernikahan yang endogami (*endogamy marriage*) yakni menikah antar saudara sepupu saja (sepupu kesatu, sepupu kedua dan sepupu ketiga), maka tanah-tanah dibagi dalam keluarga. Lahan yang belum dimanfaatkan masih luas, khususnya lahan yang berada di wilayah perbukitan.

Penerangan rumah utama berasal dari generator milik PLN yang hidup dari jam 18.00 sampai jam 06.00 pagi hari. Lampu sering padam di tengah malam untuk beberapa saat, bahkan kadang

padam lebih awal, misal pukul 4 pagi. Pada malam hari, orang sering bergerombol untuk bergadang atau bercakap-cakap.

Pada saat penelitian ini berlangsung banyak acara pernikahan yang umumnya dilangsungkan pagi hari. Pada saat pesta berlangsung ini seringkali listrik dihidupkan pihak PLN dan orang bisa menikmati acara televisi dan lain-lain. Malam harinya dilangsungkan acara 'joged' dengan menggunakan *sound system* dan lagu-lagu yang semarak. Dalam acara 'joged' ada dua bentuk aktivitas, yaitu: *joged dangdut* yang diiringi lagu-lagu dangdut, dan *joged lalu* yang diiringi lagu-lagu daerah, khususnya dari Buton, maupun dari daerah lain seperti lagu Teluk Bayur yang berasal dari Minangkabau.

Jenis bahan bakar yang banyak digunakan penduduk adalah kayu. Untuk memasak makanan masyarakat biasa menggunakan tungku batu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyangga dua panci atau ada dua lubang penyangga untuk memasak. Kayu bakar diambil dari ladang atau di daerah perbukitan. Sebagian kecil rumah tangga sudah menggunakan kompor minyak tanah. Kebiasaan makan dua kali sehari, yakni siang sebelum sholat dluhur dan sore hari selepas sholat ashar atau menjelang maghrib. Pagi hari umumnya orang hanya sarapan yang berupa makanan kecil non-nasi seperti pisang goreng, ubi rebus dan lain-lain.

Air minum diperoleh dari PAH (tempat penampungan air hujan) yang banyak terdapat di kecamatan ini. Persediaan air cukup banyak, bahkan di musim kemarau. Pemakaiannya diatur dalam kelompok-kelompok. Untuk memenuhi kebutuhan air, penduduk juga biasa membeli air dari penjual air keliling dalam bentuk derijen-derijen, yang berasal dari mata air di Siompu dan Pulau Liwutongkidi. Biasany air diambil dengan menggunakan sampan kecil dan ditempatkan di derijen-derijen. Di Kecamatan Kadatua sudah banyak tersedia bilik-bilik atau tempat mandi dan WC yang dibangun melalui program bantuan kecamatan atau program lain. Orang yang akan menggunakan bilik tersebut, biasanya mengambil air dari PAH dengan menggunakan ember. Saat penelitian bilik-bilik tersebut masih dalam keadaan yang cukup bagus atau terawat. Namun

demikian masih banyak yang mandi atau buang air besar di pantai, khususnya anak-anak. Itulah sebabnya, orang harus berhati-hati bila berjalan di pinggir pantai.

Sayang sekali tidak ada parit atau got yang dibangun dengan baik, sehingga sering kita jumpai air menggenang di sekitar rumah-rumah penduduk. Tempat pembuangan sampah juga menjadi masalah, karena belum terkoordinir dengan baik. Orang biasa buang sampah ke laut atau dengan membakar sampah.

BAB IV

PENDAPATAN PENDUDUK

Pendapatan seseorang atau rumah tangga merupakan hasil usaha/upah yang diperoleh seseorang/rumah tangga dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Dengan memperoleh pendapatan, seseorang merasa berharga karena dapat membiayai kehidupan atau mensejahterakan keluarganya. Dengan kata lain pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang/keluarga. Bagian ini akan mengkaji pendapatan penduduk baik di tingkat makro (Kabupaten Buton) maupun di lokasi penelitian. Untuk mengetahui gambaran tentang pendapatan penduduk di tingkat kabupaten, digunakan data PDRB per sektor, khususnya untuk sektor pertanian/perikanan. Sedangkan pendapatan di tingkat lokasi penelitian, digunakan pendapatan rumah tangga dari hasil survei yang dilakukan di kedua kawasan penelitian.

4.1. PENDAPATAN PENDUDUK DI KABUPATEN BUTON

Pendapatan suatu daerah yang merupakan akumulasi pendapatan dari berbagai sektor, biasanya dicerminkan oleh besarnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan waktu tertentu (satu tahun). Data PDRB tahunan di suatu wilayah juga dapat mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah, baik secara keseluruhan maupun sektoral. PDRB biasa didefinisikan sebagai "keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu setahun" (BPS dan Bappeda Kab. Buton, 2005: 299). Berdasarkan data PDRB terkini (tahun 2003 dan 2004), secara umum pendapatan Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 1993. Berdasarkan harga berlaku pada tahun 2004, PDRB Kabupaten Buton mencapai

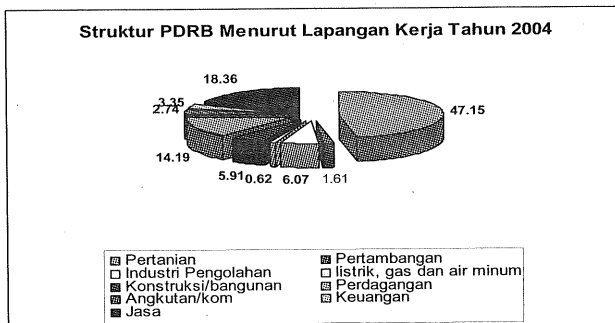
Rp 840.597,31 juta, lebih tinggi dari PDRB tahun 2003 yang tercatat sebesar Rp 693.800,16 juta. Demikian pula menurut harga konstan tahun 1993, meskipun peningkatannya jauh lebih kecil yaitu Rp170.042,87 (2003) dan Rp182.035,52 (2004), yang dipengaruhi oleh faktor inflasi. (BPS dan Bappeda Kabupaten Buton, 2005). Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di wilayah ini, mengingat pada kurun waktu tahun 2000-2004, data PDRB Kabupaten Buton masih menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama dilihat dari harga konstan tahun 2000. Dibandingkan daerah lain di wilayah Sulawesi Tenggara, tampaknya perbaikan ekonomi di Kabupaten Buton agak tersendat, karena daerah lain seperti Kabupaten Muna, Kendari (Kota dan Kabupaten), dan Kabupaten Kolaka, berdasarkan data PDRB tahun 2000-2004, telah menunjukkan kecenderungan meningkat, dilihat dari harga berlaku maupun konstan tahun 2000 (BPS, 2005). Akibat goncangan inflasi yang cukup berat sejak tahun 1997, diikuti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya, telah menyulitkan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Perbaikan ekonomi yang mulai nampak di Kabupaten Buton sejak tahun 2003, juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan dari sekitar 6 persen menjadi sekitar 7 persen selama tahun 2003-2004. Peningkatan ini merupakan kontribusi dari hampir semua sektor, terutama sektor konstruksi (12,2 %), sektor perdagangan (9,7%) dan sektor pertanian (8,5%). Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2004 adalah sektor listrik dan air minum (minus 28 persen) (BPS dan Bappeda Kabupaten Buton , 2005). Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2003-2004, juga berdampak terhadap peningkatan PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) yaitu dari Rp 2.736.323 (2003) menjadi Rp3.232.756 (2004) atau meningkat sekitar 18 persen. Namun demikian peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 relatif kecil yaitu sekitar persen. Peningkatan PDRB per kapita merupakan salah satu indikasi meningkatnya kemakmuran penduduk, meskipun pengaruh faktor inflasi tidak dapat diabaikan.

Pendapatan sektoral dan peran sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Kabupaten Buton, baik dilihat dari penyediaan lapangan usaha maupun struktur PDRB. Data Susenas tahun 2004 menunjukkan 3 dari 4 penduduk (10 tahun/lebih) yang bekerja terlibat di sektor pertanian (BPS dan Bappeda Kabupaten Buton, 2005: 73). Demikian pula struktur PDRB Kabupaten Buton menunjukkan sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang penting terhadap PDRB, dibandingkan sektor –sektor lainnya.. Pada tahun 2004 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga yang berlaku, mencapai sekitar 47 persen.. Demikian pula menurut harga konstan tahun 1993, sumbangan sektor pertanian tetap menonjol yaitu sekitar 40 persen tahun 2004. Sektor lain yang memberikan sumbangan terbesar kedua dan ketiga pada tahun 2004 (berdasarkan harga berlaku) berasal dari sektor jasa (sekitar 18%) dan perdagangan (sekitar 14%), sementara sumbangan kebanyakan sektor lain terhadap PDRB, masih di bawah 10 persen. Sumbangan terkecil berasal dari sektor Listrik dan Air Minum (kurang dari 1%) dan satu-satunya sektor dengan tingkat pertumbuhan negatif pada tahun 2003-2004 (BPS dan Bappeda Kabupaten Buton, 2005: 299) (lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1. Struktur PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2004



Sumber: Kab. Buton Dalam Angka 2004, BPS dan Bappeda Kab. Buton, 2005:305

Selama tahun 2003-2004, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) juga mengalami peningkatan dari sekitar 44 persen menjadi 47 persen, sementara kebanyakan sektor lainnya mengalami penurunan kontribusi atau relatif tetap. Peningkatan ini menunjukkan sedang terjadi proses pemulihan ekonomi sesudah krisis, terutama melalui sektor pertanian yang memang mempunyai peran menonjol di wilayah ini. Pada periode sebelumnya yaitu beberapa tahun sekitar krisis (1996-2000), sumbangan semua sektor terhadap PDRB cenderung menurun atau stagnan, termasuk sektor pertanian. Pada tahun 2000, sumbangan sektor pertanian jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2004 yaitu sekitar 37 persen (menurut harga yang berlaku).

Peningkatan pendapatan dan pendapatan per kapita secara umum di Kabupaten Buton berdasarkan data PDRB menunjukkan adanya perbaikan ekonomi secara makro dalam beberapa tahun terakhir. Analisa data PDRB sektoral semakin menegaskan peran penting sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perkembangan pendapatan regional tersebut. Meskipun sektor pertanian dalam arti luas mencakup berbagai sub sektor seperti pertanian pangan, hutan, perkebunan dan perikanan, peran sumber daya laut terutama perikanan laut dalam perkembangan ekonomi wilayah ini cukup penting. Kondisi ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (82%) terdiri dari lautan, dengan potensi utama wilayah ini adalah sumber daya laut (SDL). Data tentang sumbangan masing-masing sub sektor pertanian hanya tersedia untuk PDRB tahun-tahun sekitar krisis (1996-2000). Secara kuantitatif sumbangan perikanan terhadap PDRB sekitar 7 persen, jauh lebih rendah dari pertanian pangan (16%) (BPS, 2001). Kemungkinan sebagai akibat potensi besar SDL belum dikelola secara maksimal di wilayah ini (baru sekitar 40-60%), atau laporan data tentang perikanan yang kurang akurat. Pelelangan ikan terbuka hampir tidak pernah dilakukan, sedangkan jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang sangat terbatas di wilayah ini (hanya 2 buah), semakin menyulitkan perhitungan hasil produksi ikan yang sebenarnya di masing-masing wilayah.

Perhitungan hasil produksi SDL selama ini dilakukan melalui perkiraan sampel dari beberapa alat tangkap. Menyadari potensi SDL yang belum dikelola secara optimal, pengembangan SDL menjadi salah satu dari tiga fokus utama pembangunan ekonomi ke depan, di samping sektor pariwisata dan infrastruktur. Salah satu program yang mendukung pengembangan SDL di wilayah ini adalah diluncurkannya skeme kredit untuk masyarakat pesisir oleh Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak tahun 2002. Skeme kredit merupakan dana bergulir untuk membantu modal usaha masyarakat (terutama nelayan) dalam mengembangkan usaha budi daya terkait SDL Menurut laporan DKP, sampai tahun 2006, bekerja sama dengan BRI telah berhasil disalurkan 6 milyar rupiah kepada lebih dari 1000 nelayan, dengan mengutamakan pemanfaatannya untuk budi daya (sekitar 80%) seperti rumput laut (di semua kecamatan), kerang mabe (Kecamatan Kapuntori) dan mutiara (Kapuntori). Usaha budi daya terkait dengan SDL sangat membantu menunjang perekonomian nelayan, sekaligus berperan melindungi terumbu karang baik langsung maupun tidak dari praktek-praktek yang merusak. Namun dalam pelaksanaannya skeme kredit ini masih banyak kendala yang dihadapi, terutama lemahnya pengawasan dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan di lapangan, sehingga kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

4.2. PENDAPATAN PENDUDUK TINGKAT KECAMATAN

4.2.1. Pendapatan rumah tangga di Kecamatan Mawasangka

Pendapatan rumah tangga meliputi pendapatan semua anggota rumah tangga (10 tahun ke atas) dari rumah tangga terpilih (responden) yang bekerja pada seminggu lalu baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Sumber pendapatan rumah tangga dikelompokkan ke dalam: 1. Pendapatan yang berasal dari sektor perikanan laut yang dibedakan menurut musim; 2. pendapatan dari sektor budi daya; dan 3. Pendapatan dari sektor lainnya (di luar

perikanan dan budi daya). Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan bersih per bulan, yang diperhitungkan setelah pendapatn kotor dikurangi biaya produksinya. Survei dilakukan untuk 200 rumah tangga, masing-masing 100 rumah tangga untuk setiap lokasi penelitian (Kecamatan Mawasangka dan Kecamatan Kadatua).

Di Kecamatan Mawasangka, kedua desa merupakan desa pantai, dimana mayoritas penduduk terlibat kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hasil laut. Namun demikian banyak penduduk kedua desa juga melakukan kegiatan ekonomi lainnya, baik sebagai pekerjaan utama maupun tambahan di luar perikanan laut. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh fluktuasi musim dalam perikanan laut, potensi SDL, peralatan tangkap yang digunakan, kesempatan kerja yang tersedia serta kebutuhan untuk mencukupi ekonomi keluarga. Untuk memperoleh gambaran tentang pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian, beberapa tabulasi hasil survei dapat memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan semua rumah tangga terpilih menurut kelompok pendapatan dan lapangan pekerjaan, serta distribusi pendapatan yang berasal dari kegiatan kenelayanan terkait dengan perbedaan musim.

Tabel 4.1. menyajikan distribusi rumah tangga menurut lokasi penelitian menurut kelompok pendapatan rumah tangga. Secara keseluruhan hampir separuh dari jumlah rumah tangga terpilih (49%) mempunyai pendapatan bersih kurang dari 500 ribu rupiah per bulan dan hanya sekitar 17 persen rumah tangga berpendapatan 3.5 juta rupiah atau lebih. Namun apabila dilihat lebih rinci untuk masing-masing desa, terdapat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang mencolok pada kedua desa kajian. Mayoritas rumah tangga di Desa Wakambangura (73%) berpendapatan relatif rendah (kurang dari Rp 500 ribu), sementara untuk kelompok pendapatan yang sama di Desa Terapung jauh lebih kecil (33%). Namun demikian lebih dari separuh responden (55%) berpendapatan kurang dari 1.5 juta rupiah (untuk kelompok pendapatan yang sama di Desa Wakambangura mencapai 83%). Kondisi yang kontras terdapat pada kelompok pendapatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 27 persen rumah tangga di Desa Terapung mempunyai pendapatan sekitar 3.5 juta rupiah atau

lebih, sementara hanya satu rumah tangga di Di Desa Wakambangura dengan pendapatan yang sama atau sekitar 7 persen untuk kelompok penghasilan 3 juta rupiah/lebih.

Tabel 4.1. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan RT di Desa Terapung dan Desa Mangumbangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (Persen)

No	Kelompok Pendapatan RT (per bulan)	Desa Terapung	Desa Wakam-bangura	Total
1	<Rp 500.000	34	73	49
3	Rp 500.000 - Rp 999.000	15	5	11
4	Rp 1.000.000 - Rp 1.499.000	7	5	6
5	Rp 1.500.000 - Rp 1.999.000	3	5	4
6	Rp 2.000.000 - Rp 2.499.000	5	5	5
7	Rp 2.500.000 - Rp 2.999.000	5	0	3
8	Rp 3.000.000 - Rp 3.499.000	5	5	5
9	Rp 3.500.000 /lebih	25	3	17
	Jumlah: persen N	100.0 (59)	100.0 (40)	100.0 (99)
	Pendapatan rata-rata	1.924.404*	726.795	286.286

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, LIPI 2006.

Catatan: *) tidak termasuk 1 responden yang pendapatannya extra tinggi (data pencil)

Perbedaan ekonomi yang mencolok antara kedua desa ini juga tercermin dari rata-rata pendapatan rumah tangga. Rata-rata pendapatan rumah tangga (juga pendapatan per kapita) di Desa Terapung mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan rumah tangga di Desa Wakambangura (Tabel 4.2). Demikian pula dilihat dari sebaran pendapatan responden (angka median), kebanyakan rumah tangga responden di Desa Terapung mempunyai pendapatan yang jauh lebih tinggi (lebih dari 3 kali lipat) dari responden di Desa Wakambangura (Rp312.500). Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Desa Terapung pada umumnya relatif lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Wakambangura.

Tabel 4.2. Statistik Pendapatan RT di Desa Terapung dan Wakambangura, Kec.Mawasangka, Kab. Buton,Tahun 2006 (Rupiah)

Pendapatan RT(per bulan)	Desa Terapung	DesaWakamba- ngura	Total
Per kapita	390.687	132.295	286.286
Rata-rata Rumah Tangga	1.924.404	726.795	1.440.522
Median	1.133.125	312.500	534.167
Minimum pendapatan RT	6667	12.000	6.667
Maksimum pendapatan RT	7.100.000	4.133.333	7.100.000
Jumlah (N)	59*)	40	99

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia, 2006

Catatan: *) 1 responden (pemilik *basecamp* pengolahan kepiting) dikeluarkan dari perhitungan pendapatan rata-rata, karena pendapatan terlalu mencolok (di atas 1milyar/per bulan) (data pencil).

Salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan ini adalah perbedaan kondisi alam kedua wilayah penelitian serta potensi SDL di Kawasan Mawasangka. Desa Terapung mempunyai SDL lebih bervariasi (teri, ikan karang, kepiting dan lain-lain), dan beberapa jenis ikan mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga jaringan pasar lebih luas, baik lokal, maupun ke luar daerah. Sedangkan jenis ikan di Desa Wakambangura umumnya untuk pasaran lokal (cakalang, tuna dan ikan karang mati), Sedangkan ikan karang hidup mempunyai nilai ekonomi tinggi karena merupakan komoditi ekspor.

Kedua lokasi mempunyai keterbatasan kesuburan tanah di pantai, yaitu hanya cocok untuk tanaman kelapa, tapi Desa Terapung mempunyai lahan darat yang lebih subur (tanah perbukitan) dibandingkan Desa Wakambangura (tanah berbatuan) sehingga produktivitas hasil produksi tanaman palawija, seperti jagung dan ubi kayu jauh lebih tinggi dibandingkan hasil produksi komoditi yang sama di Desa Wakambangura. Berdasarkan data Kecamatan Mawasangka Dalam Angka Tahun 2004, luas tanaman jagung di Desa Terapung lebih kecil daripada di Wakambangura (90 dan 78 Ha), namun produktivitas jagung di Terapung jauh lebih tinggi

daripada Wakambangura (3,3 dan 13,2 Kw/Ha). Demikian pula untuk hasil produksi tanaman lainnya, seperti ubi kayu dan ubi jalar (BPS Kab. Buton, 2005: 91-93).

Meskipun lapangan pekerjaan yang menonjol di kedua desa adalah perikanan tangkap dan budi daya rumput laut, namun intensitas penangkapan berbeda di kedua desa. Nelayan di Desa Terapung pada umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi musim, karena sebagian nelayan mempunyai alat tangkap yang bervariasi yaitu bagan dan jaring untuk menangkap ikan teri di musim gelombang lemah (angin timur) dan bubu dan pancing untuk menangkap kepiting di musim barat dan pancaroba. Bahkan bubu untuk menangkap kepiting, dapat menjadi pekerjaan sambilan bersamaan dengan penggunaan bagan untuk penangkapan ikan teri. Meskipun potensi kepiting di Desa Terapung cukup besar, namun hanya sebagian kecil nelayan yang memiliki bubu untuk kepiting. Hal ini disebabkan diperlukan banyak bubu untuk memperoleh hasil tangkap yang memadai, sehingga nelayan memerlukan modal yang relatif besar. Sedangkan nelayan di Desa Wakambangura, hanya pergi menangkap ikan ke laut pada musim gelombang lemah, baik untuk menangkap ikan cakalang maupun ikan karang. Pada musim gelombang kuat (angin barat), banyak nelayan yang beralih usaha ke budi daya rumput laut, atau pergi merantau bagi nelayan yang tidak mempunyai usaha lain di desa. Usaha budi daya laut ini menjadi andalan nelayan di hampir semua wilayah Kecamatan Mawasangka, sebagai usaha alternatif terutama di musim susah menangkap ikan (musim angin barat/gelombang kuat).

Pendapatan rumah tangga dan lapangan pekerjaan

Kondisi alam dan tersedianya lapangan kerja di kedua lokasi penelitian berpengaruh terhadap besarnya pendapatan rumah tangga. Sebagai daerah pantai yang potensial menghasilkan SDL, sumber utama penghasilan masyarakat di kedua lokasi berasal dari kegiatan perikanan tangkap (44 %), dengan rata-rata pendapatan bersih rumah tangga per bulan mencapai hampir 2,5 juta rupiah dan penghasilan

maksimum tertinggi yang diperoleh dari perikanan tangkap sekitar 7 juta rupiah per bulan Responden dengan lapangan pekerjaan utama budi daya rumput laut, merupakan kelompok dengan rata-rata pendapatan rumah tangga terbesar setelah perikanan tangkap (23%). Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan sekitar Rp 920.000 dan rata-rata pendapatan maksimum mencapai Rp 4,150.000 (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Statistik Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan KRT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006

No	Lapangan Pekerjaan Utama (KRT)	Pendapatan Rumah Tangga (Rp)			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
1	Perikanan tangkap	2.479.877	23.833	7.100.000	44
2	Pertanian Tn. pangan	159.476	12.000	333.333	7
3	Pertanian Tn. Keras	521.000	6.667	1.328.333	9
4	Budi daya rumput laut	919.585	17.500	4.150.000	23
5	Industri pengolahan	212.167	212.167	212.167	1
6	Perdagangan	154.444	70.000	303.333	3
7	Jasa	352.083	151.667	615.833	5
8	Bangunan	787.000	787.000	366.333	4
9	KRT tidak bekerja	319.167	151.667	491.667	3
	Total	1.440.522	6.667	7.100.000	99

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia. 2006

Sumber pendapatan rumah tangga yang berasal dari pertanian lain (pertanian pangan dan tanaman keras) merupakan sumber pendapatan yang melibatkan sekitar 16 persen responden. Meskipun jumlah responden yang terlibat di kedua lapangan pekerjaan tersebut tidak berbeda jauh (9% dan 7%), namun rata-rata pendapatan rumah tangga petani tanaman keras jauh lebih tinggi (Rp 521.000) dibandingkan petani tanaman pangan (sekitar Rp 160.000). Sedangkan jumlah responden yang memperoleh pendapatan dari lapangan pekerjaan utama di luar sektor pertanian relatif sedikit (16%), yaitu jasa (antara lain ojek), bangunan (sebagai buruh), perdagangan dan industri pengolahan (buruh). Rata-rata pendapatan

mereka, di bawah 500 ribu rupiah, kecuali pekerja bangunan (Rp787.000) (Tabel 4.3)

Dari 44 responden yang mempunyai lapangan pekerjaan kenelayanan, sekitar 34 persen berpenghasilan 3,5 juta rupiah/lebih, dan hanya sekitar 18 persen yang berpenghasilan di bawah 500 ribu rupiah (Tabel 4.4). Kelompok responden dengan penghasilan tertinggi ini, hampir semuanya adalah nelayan tangkap. Sedangkan responden di luar nelayan tangkap mayoritas berpendapatan di bawah 500 ribu rupiah. Meskipun demikian mayoritas responden (sekitar 61%) dengan usaha budi daya rumput laut mempunyai pendapatan di bawah 500 ribu rupiah dan hanya seorang responden yang memperoleh penghasilan sebesar 3,5 juta rupiah/lebih. Hal ini berarti lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut masih dominan dan memberikan penghasilan yang cukup berarti bagi kebanyakan responden.

Semua responden yang mempunyai lapangan pekerjaan utama di sector pertanian pangan (7 orang) mempunyai pendapatan di bawah Rp500.000, bahkan 3 rumah tangga (sekitar 43%) mempunyai pendapatan di bawah 100 ribu rupiah. Sedangkan petani tanaman keras dengan pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah sekitar 67 persen, dan hanya satu rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari 100 ribu rupiah per bulan. Selebihnya adalah petani tanaman keras yang mempunyai pendapatan antara 500 ribu sampai dengan 1,5 juta rupiah (Tabel 4.4). Hal ini disebabkan pada umumnya hasil usaha tanaman pangan merupakan hasil tambahan yang lebih dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri daripada dipasarkan. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam menghitung pendapatan hasil tanaman pangan yang jenis dan masa panennya bervariasi.

Seringkali dalam perhitungan pendapatan, responden tidak memperhitungkan hasil yang dikonsumsi sendiri, sehingga laporan pendapatan cenderung di bawah hasil sebenarnya (*under reporting*). Sedangkan hasil tanaman keras seperti jambu mete, masa panennya hanya sekali dalam setahun, hasil produksinya lebih mudah dihitung karena merupakan komoditi pasar yang mempunyai harga pasar lebih

pasti. Namun demikian variasi pendapatan untuk kedua lapangan pekerjaan tersebut relatif besar, sehingga penghasilan minimum terendah terdapat pada kedua sektor tersebut, yaitu sekitar 12 ribu rupiah (tanaman pangan) dan 7 ribu rupiah (tanaman keras). Pendapatan dari hasil pertanian sangat tergantung dari luas lahan yang ditanami, jenis yang ditanam dan harga pasar pada waktu panen. Biasanya pendapatan petani dari hasil pertanian, cenderung dihitung dari hasil pertanian yang dipasarkan atau dijual.

Tabel 4.4. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan RT dan Lapangan Pekerjaan KRT di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, 2006

Pendapatan RT (Rp)	Lapangan Pekerjaan (persen)				
	Perikanan Tangkap	Pertanian Pangan	Pertanian. Tn.Keras	Budidaya Rumput laut	Lain-lain
< 500.000	18	100	67	61	88
500.000 - < 1 jt	11	-	11	17	6
1 jt - < 1,5 jt	7	-	22	4	-
1,5 jt - < 2 jt	9	-	-	-	-
2 jt - < 2,5 jt	7	-	-	4	6
2,5 jt - < 3 jt	7	-	-	-	-
3 jt - < 3,5 jt	7	-	-	9	-
3,5 jt /lebih	34	-	-	4	-
Total (%/N)	100 (44)	100 (7)	100 (9)	100 (23)	100 (16)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia. 2006

Namun demikian pekerjaan di luar perikanan tangkap pada umumnya menjadi pekerjaan sampingan bagi nelayan dan keluarganya. Beberapa kepala rumah tangga termasuk penganggur, namun memperoleh pendapatan dari kiriman uang keluarga yang sedang merantau (3%). Industri pengolahan sangat terbatas di kedua lokasi penelitian, hanya ada sebuah industri pengolahan kepiting (menjadi daging dalam packing), dan 7 orang pengusaha pengeringan teri rebus di Desa Terapung. Demikian pula hasil tanaman keras yaitu mete hanya sampai kupas dan pengeringan. Pengusaha kepiting yang

juga orang setempat, meski terpilih sebagai responden, tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata, karena pendapatannya terlalu mencolok (data pencil) dibandingkan pendapatan responden lainnya. Mayoritas responden dengan lapangan pekerjaan utama di luar pertanian tersebut (88%) mempunyai pendapatan di bawah 500 ribu rupiah. Bahkan 2 dari 3 rumah tangga di sektor perdagangan hanya mempunyai pendapatan kurang dari 100 ribu rupiah per bulan (Tabel tidak disertakan).

Pendapatan rumah tangga dan perbedaan musim

Hasil yang diperoleh dari kegiatan kenelayanan pada umumnya berfluktuasi sepanjang tahun, karena beberapa faktor antara lain perubahan musim, jenis alat tangkap dan pengalaman masing-masing nelayan. Perubahan musim terutama berkaitan dengan kuat lemahnya ombak di laut, angin laut dan bulan purnama yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari nelayan di laut. Berkaitan dengan kegiatan nelayan di laut, terdapat tiga musim utama yang berbeda yaitu musim gelombang kuat (angin barat), musim gelombang lemah (angin timur) dan musim pancaroba (musim kemarau). Di Kawasan Mawasangka, musim gelombang lemah, dikenal juga sebagai musim angin timur atau musim teduh, biasanya berlangsung sekitar 5 bulan, yaitu antara bulan Juli sampai dengan Nopember. Pada musim ini, air laut jernih, angin dan ombak tenang dan banyak ikan, sehingga dianggap oleh nelayan sebagai masa musim panen ikan, terutama pada bulan 7-9. Kondisi sebaliknya adalah musim gelombang kuat atau musim angin barat, yang berlangsung sekitar 4-5 bulan, yaitu pada sekitar bulan Desember- Maret/April. Pada musim ini, angin bertiup kencang, ombak besar, air keruh dan banyak hujan. Diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba (musim kemarau) yang berlangsung sekitar 2 bulan, yaitu bulan Mei-Juni. Perubahan kondisi alam ini mempengaruhi aktivitas nelayan ke laut. Pada musim gelombang lemah memungkinkan nelayan untuk pergi ke laut setiap hari, kecuali sekitar bulan purnama, sehingga memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Sebaliknya musim gelombang kuat,

aktivitas nelayan ke laut turun drastis, karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Akibatnya pendapatan juga menurun tajam dibandingkan musim-musim lainnya (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Distribusi RT Nelayan Menurut Pendapatan, Musim di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (N= 44)

No	Kelompok Pendapatan RT nelayan	Musim (Persen)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
1.	< 500.000	59,0	67,0	86,0
3.	500.000 - < 1 jt	1,0	4,0	7,0
4.	1 jt - < 1,5 jt	2,0	6,0	3,0
5.	1,5 jt - < 2 jt	5,0	-	1,0
6.	2 jt - < 2,5 jt	3,0	4,0	1,0
7.	2,5 jt - < 3 jt	2,0	1,0	1,0
8.	3 jt - < 3,5 jt	3,0	1,0	-
9.	3,5 jt /lebih	25,0	17,0	1,0
Total		100,0	100,0	100,0

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006.

Pada musim gelombang lemah, lebih dari separuh responden nelayan termasuk dalam kelompok yang memperoleh pendapatan sebesar 3,5 juta rupiah/lebih per bulan. Diantara nelayan yang berpenghasilan relatif besar ini, lebih dari separuhnya (12 dari 23 responden) bahkan berpenghasilan di atas 7 juta rupiah (Lampiran 1). Pada musim ini, meskipun proporsi nelayan yang berpenghasilan di bawah 500 ribu merupakan kelompok terbesar kedua (20.5%), namun proporsinya paling kecil dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang sama pada kedua musim lainnya (gelombang kuat dan pancaroba). Sebaliknya pada musim gelombang kuat, banyak nelayan yang tidak berani melaut, karena beresiko tinggi, dan tidak efisien dari segi pengeluaran biaya, sehingga lebih dari 70 persen responden hanya berpenghasilan di bawah 500 ribu rupiah. Bahkan sekitar 2 per 3 dari responden pada kelompok pendapatan terendah ini, hanya berpenghasilan di bawah 100 ribu rupiah (lihat Lampiran 2).

Dibandingkan dengan musim-musim lainnya, proporsi nelayan dengan penghasilan terendah ini (di bawah Rp 500.000) sangat mencolok pada musim gelombang kuat, dan turun dengan drastis pada musim-musim lainnya yaitu musim pancaroba (sekitar 34%) dan musim gelombang kuat (sekitar 20%). Pada musim gelombang kuat, nelayan pada umumnya istirahat dari kegiatan kenelayannya sambil memanfaatkan waktu untuk memperbaiki sarana tangkapnya. Bagan yang banyak dimiliki nelayan di Desa Terapung, pada musim gelombang kuat masuk dok untuk diservis bagian-bagian yang rusak. Sebagian nelayan yang memiliki sarana tangkap lain seperti bubu, jaring atau pancing di Desa Terapung beralih melakukan aktivitas nelayan lainnya yaitu menangkap kepiting, yang potensinya cukup besar di musim gelombang kuat. Sebagian nelayan lainnya melakukan kegiatan non nelayan, seperti budi daya rumput laut atau merantau ke luar daerah bahkan sampai ke Malaysia. Sedangkan di Desa Wakambangura, kebanyakan nelayan beralih melakukan kegiatan non nelayan yaitu budidaya rumput laut atau merantau ke luar daerah atau luar negeri, terutama ke Balikpapan, Ambon, Papua dan juga ke Malaysia.

Musim Pancaroba merupakan peralihan antara gelombang kuat dan lemah, yang umumnya berlangsung singkat sekitar 2 bulan. Angin dan gelombang laut mulai melemah, sehingga nelayan mulai berani melaut kembali meskipun belum penuh. Hal ini juga tercermin pada Tabel 4.5, yang menunjukkan proporsi nelayan dengan pendapat terendah (di bawah Rp500.000) sama dengan proporsi nelayan dengan penghasilan tertinggi (Rp3,5 juta/lebih) yaitu sekitar 34 persen. Pada kelompok nelayan dengan penghasilan terendah (di bawah Rp500.000), hanya 1 diantara 5 responden yang berpenghasilan di bawah 100 ribu rupiah (Lampiran 2), sementara pada kelompok nelayan dengan penghasilan terbesar (di atas Rp3,5 juta), sekitar 27 persen (4 dari 15 responden) berpenghasilan 7 juta rupiah atau lebih (Lampiran 1).

Perbedaan pendapatan rumah tangga nelayan karena pengaruh musim semakin jelas dan konsisten apabila dilihat dari statistik pendapatan nelayan (Tabel 4.6). Rata-rata pendapatan

nelayan tertinggi diperoleh pada musim gelombang lemah (sekitar Rp3,7 juta) dan terkecil pada musim gelombang kuat yaitu sekitar 613 ribu rupiah. Rata-rata pendapatan rumah tangga pada musim pancaroba berada diantara kedua musim (sekitar Rp2,2 juta).

Kondisi ekonomi nelayan yang jauh lebih baik di musim gelombang lemah ini, juga tercermin pada angka median pendapatan yang jauh lebih tinggi pada musim gelombang lemah (lebih dari 9 kali lipat) dari median pendapatan nelayan di musim gelombang kuat. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kebanyakan nelayan juga merasakan kemakmuran ekonomi pada musim gelombang lemah, dan sebaliknya ekonomi susah pada musim gelombang kuat. Hal ini juga menguatkan temuan bahwa kebanyakan responden masih sangat menggantungkan hidup dari hasil penangkapan ikan di laut. Lapangan pekerjaan di luar penangkapan ikan, umumnya dianggap sebagai tambahan atau alternatif di kala aktivitas ke laut berkurang.

Tabel 4.6. Statistik Pendapatan RT Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Terapung dan Wakambangura, Kec. Mawasangka, 2006 (N = 44)

Pendapatan RT (Per Bulan)	Musim (Rp)		
	Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
Rata-rata	3.746.221	2.195.086	612.578
Median	2.800.000	875.000	300.000
Minimum	18.000	8.000	18.000
Maksimum	12.500.000	9.900.000	4.950.000

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia, 2006.

Pendapatan rumah tangga dan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui investasi sumber daya manusia. Banyak teori mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendidikan dan pendapatan seseorang. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga memungkinkan seseorang untuk

memperoleh penghasilan lebih tinggi. Namun sejauh mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan seseorang, karena di kedua lokasi penelitian, tingkat pendidikan responden pada umumnya relatif rendah. Lebih dari separuh responden (KRT) tidak sekolah atau hanya berpendidikan SD tidak tamat, dan hanya sekitar 14 persen berpendidikan SLTP ke atas. Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 diharapkan menyajikan kecenderungan hubungan antara tingkat pendidikan (KRT dan ART) dengan pendapatan RT. Tabel 4.7 menunjukkan kecenderungan yang positif, yaitu kelompok responden dengan pendapatan terendah (di bawah Rp500.000), proporsi responden cenderung semakin menurun sejalan dengan peningkatan pendidikan KRT. Sebaliknya pada kelompok pendapatan yang relatif tinggi (Rp3 juta/lebih), proporsi responden meningkat sejalan dengan tingkat pendidikannya. Lebih dari separuh responden yang tidak pernah sekolah atau hanya berpendidikan SD tidak tamat, mempunyai pendapatan RT yang relatif rendah, sementara hanya sekitar 14 persen responden yang berpendidikan SLTP tamat, mempunyai pendapatan relatif rendah. Sebaliknya pada kelompok responden dengan pendapatan relatif tinggi (Rp3,5 juta/lebih) hanya dimiliki oleh 10 persen responden tanpa pendidikan formal (tidak sekolah) dan 36 persen responden dengan pendidikan tamat SLTP ke atas.

Tabel 4.7. Distribusi RT Menurut Kelompok Pendapatan dan Pendidikan KRT di Lokasi Penelitian Kecamatan Mawasangka, 2006

Pendapatan Rumah Tangga (Rp)	Pendidikan KRT (persen)				Total
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP/ lebih	
< 500.000	66	56	44	14	49
500.000 - < 1 jt	17	-	15	7	11
1 jt - < 2 jt	7	9	3	36	10
2 jt - < 3 jt	-	13	12	7	8
3 jt /lebih	10	22	26	36	22
Total (%)	100	100	100	100	100
N	(29)	(23)	(34)	(14)	(100)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia. 2006

Bahkan dua responden lulusan SLTA, berada pada kelompok pendapatan yang relatif tinggi (Rp2 juta/lebih). Kecenderungan positif ini menunjukkan meskipun pendidikan di kedua lokasi pada umumnya agak tertinggal, namun tetap menunjukkan faktor yang cukup berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan di lokasi penelitian, baik untuk memperluas pilihan pekerjaan maupun untuk meningkatkan kemampuan mengelola pekerjaannya.

Fenomena yang sama juga dapat dilihat pada hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan pendidikan anggota rumah tangga dari rumah tangga terpilih (Tabel 4.8). Pada kelompok RT dengan pendapatan relative rendah, proporsi ART cenderung menurun tajam seiring dengan meningkatnya pendidikan ART, yaitu dari sekitar 74 persen (tidak sekolah) dan 66 persen (tidak tamat SD) menjadi sekitar 29 persen pada kelompok ART dengan pendidikan SLTP tamat/lebih. Sebaliknya rumah tangga dengan pendapatan relatif tinggi, proporsi ART dengan pendidikan SLTP/lebih tinggi hampir tiga kali dari proporsi ART yang tidak sekolah (23 persen dan 7 persen). Di lingkungan kehidupan nelayan, pendidikan yang terbataspun masih ada maknanya, karena dengan kemampuan baca tulispun, mereka lebih percaya diri dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk merantau ke daerah lain.

Tabel 4.8. Distribusi Responden Menurut Kelompok Pendapatan RT dan Pendidikan ART di Lokasi Penelitian, Kecamatan Mawasangka, 2006 (Persen)

Pendapatan RT (Rp)	Pendidikan ART				Total
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP/lebih	
< 500.000	74	66	45	29	53
500.000 - < 1 jt	11	4	14	13	11
1 jt - < 2 jt	4	6	7	19	8
2 jt - < 3 jt	4	9	12	16	10
3 jt /lebih	7	15	23	23	18
Total (%)	100	100	100	100	100
N	(47)	(53)	(101)	(31)	(232)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia. 2006

Di kedua lokasi penelitian hasil penangkapan ikan merupakan komoditi yang cukup luas pemasarannya, baik di pasar regional maupun nasional, bahkan secara tidak langsung beberapa komoditi seperti kepiting, ikan karang dan rumput laut merupakan komoditi ekspor, yang pemasarannya ke luar negeri melalui exportir di Kendari, Makasar dan/atau Jakarta. Sedangkan produksi teri nasi (teri Medan) yang cukup menonjol di Desa Terapung, pemasaran utamanya adalah Kota Jakarta. Pada umumnya penampung lokal mempunyai jaringan pemasaran ke daerah lainnya, sehingga memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonominya.

Pendapatan nelayan dan alat tangkap

Bagi penduduk di wilayah pantai atau pesisir, sarana dan alat tangkap yang dimiliki nelayan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan hasil tangkapan atau pendapatan nelayan. Perahu bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat penting untuk operasi penangkapan ikan di laut, terutama ke wilayah tangkap yang relatif jauh dari pantai. Semakin besar *body* dan mesin perahu motor semakin besar hasil tangkapan ikan yang dapat ditampung dan makin efisien biayanya. Demikian pula semakin bervariasi alat tangkap yang dimiliki nelayan, semakin leluasa dalam menangkap berbagai ragam ikan, karena nelayan menjadi tidak terlalu tergantung oleh perubahan musim. Namun demikian semakin canggih sarana dan peralatan tangkap, semakin mahal pula harganya, sehingga tidak semua nelayan mampu memilikinya. Bahkan pemakaian alat tangkap ikan karang seperti racun sianida, bom dan trawl dapat merusak terumbu karang di sekitarnya bahkan biota lain. Kerusakan terumbu karang di wilayah ini terutama akibat praktek nelayan (terutama dari luar daerah) yang telah berlangsung lama, sehingga produksi ikan karang semakin merosot, terutama di Desa Terapung (Coremap II, 2005).

Berdasarkan data survei di kedua lokasi penelitian dari 100 responden terpilih, nelayan yang memiliki perahu motor hanya 46

persen, dan sekitar 2 per 3 nya di miliki nelayan Desa Terapung. Demikian pula alat tangkap seperti bagan, bubu dan jaring, lebih banyak dimiliki nelayan Desa Terapung daripada Wakambangura. Peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan tergantung pada jenis ikan yang tersedia pada musim tertentu. Ikan teri yang merupakan produksi utama perikanan tangkap di Desa Terapung membutuhkan bagan dan jaring sebagai alat tangkap. Semakin besar ukuran jaring dan perahu, makin banyak daya tangkap dan daya tampungnya. Bagan yang dimiliki nelayan Desa Terapung pada umumnya merupakan bagan drum dengan harga sekitar 12 juta rupiah per unit atau sekitar 25 juta rupiah lengkap dengan mesinnya.

Peralatan tangkap seperti bubu, jaring (dengan berbagai mata ukuran), pancing dan pukot dibutuhkan untuk menangkap kepiting, ikan karang dan jenis ikan lainnya. Compresor dibutuhkan para penyelam ikan karang untuk membantu pernafasan ketika menyelam. Makin besar ukuran jaring dan makin banyak ragam mata jaringnya, makin besar daya tangkapnya dan makin banyak hasil tangkapan ikannya. Bubu untuk menangkap kepiting dianggap efektif karena tidak perlu dijaga dan daya tangkapnya cukup banyak, seiring dengan jumlah bubu yang dipasang. Untuk memiliki berbagai peralatan tangkap ini, nelayan membutuhkan modal, terutama untuk memiliki berbagai peralatan tangkap yang harganya relatif mahal. Untuk memenuhi kebutuhan alat tangkap ini, para nelayan biasanya berhutang pada para taoke/pengumpul ikan di lokasi, sehingga para nelayan selalu terikat dan tergantung pada para taoke, terutama dengan pemasaran hasilnya. Akibatnya pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, karena terikat dengan ketentuan para taoke yang kadang merugikan nelayan.

Hasil wawancara mendalam dengan para nelayan dan hasil FGD dengan nelayan ikan karang, menunjukkan bahwa semakin banyak variasi alat tangkap yang dimiliki nelayan, semakin meningkat aktivitas nelayan di laut dan makin besar pendapatan yang diperoleh. Pendapatan nelayan di Desa Terapung umumnya lebih baik daripada nelayan di Desa Wakambangura, kemungkinan dipengaruhi juga oleh variasi pemilikan alat tangkap, sesuai dengan potensi

sumber daya lautnya. Di Desa Wakambangura sumber daya laut yang utama adalah ikan cakalang dan ikan karang, sehingga penghasilan utama berasal dari perikanan tangkap (terutama ikan karang dan cakalang), dan usaha budi daya rumput laut yang dilakukan sepanjang musim, terutama musim teduh. Di desa ini juga terdapat seorang pengumpul besar ikan karang (terutama ikan karang hidup), meskipun tempat tinggalnya di kota kecamatan (Mawasangka). Penghasilan yang berasal dari ikan karang hidup relatif besar, karena merupakan komoditi export.

Sebaliknya di Desa Terapung, penghasilan yang berasal dari alat tangkap bagan (teri) diperkirakan sekitar 60 persen, dari hasil kepiting sekitar 30 persen dan dari penangkapan ikan karang hanya sekitar 10 persen. Di samping sebagai nelayan bagan, terdapat sekitar 20 orang nelayan yang juga merangkap sebagai nelayan kepiting, namun hanya separuhnya yang menggunakan alat tangkap bubu. Sebagian lainnya menggunakan pancing, jaring atau pukat. Adanya pengumpul besar kepiting sebanyak empat orang, menunjukkan adanya potensi kepiting yang cukup besar di daerah ini, termasuk sekretaris desa yang jmerangkap sebagai pemasok kepiting ke perusahaan pengolahan kepiting di desa tersebut. Dengan menggunakan alat tangkap bubu, nelayan dapat menangkap kepiting sepanjang tahun. Dengan demikian penangkapan kepiting dapat menjadi usaha sampingan di musim gelombang tenang (di samping ikan teri dan ikan karang), dan sebagai mata pencaharian utama di musim gelombang kuat. Namun penangkapan kepiting dengan bubu membutuhkan modal besar untuk dapat memiliki sejumlah bubu, sehingga dapat memperbanyak hasil tangkapannya. Dengan memiliki sejumlah alat tangkap bubu, memungkinkan para nelayan menambah pendapatan dari hasil tangkapan kepiting, di samping usaha pokok menangkap ikan teri dan usaha sampingan lainnya.

Kebutuhan modal yang lebih besar dirasakan oleh para pengumpul ikan teri, yang jumlahnya sekitar 11 orang di Desa Terapung. Di desa ini terdapat sekitar 300 unit bagan dan pada saat penelitian sekitar 208 bagan yang dapat dioperasikan (sisanya dalam kondisi rusak). Beberapa nelayan memiliki bagan, tetapi tidak

memiliki perahu, sehingga untuk mengumpulkan hasil tangkapan dengan menumpang perahu nelayan lain. Akibatnya para nelayan tanpa perahu, biasanya memperoleh hasil yang terbatas, karena selain hasilnya dibagi untuk pengganti biaya operasional, mereka juga hanya menunggu hasil di bagan yang dipancarkan. Seorang informan yang juga pengumpul dan pengolah ikan teri (rebus dan kering) dengan daya tampung cukup besar, mengungkapkan besarnya modal yang dibutuhkan, sejalan dengan jumlah nelayan yang harus diberi modal. Dari 300 nelayan bagan yang terdapat di Desa Terapung, informan hanya mampu memberi modal terhadap 50 nelayan bagan sebagai anggota tetap. Usaha mengolah ikan rebus dan kering yang sudah digelutinya sejak tahun 2002, karena selisih harga yang cukup besar antara pemasaran teri segar dengan teri rebus dan kering. Jumlah pengumpul yang terus bertambah di lokasi, menyebabkan persaingan semakin tajam. Pemasaran ikan kering dan rebus ini umumnya ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Makasar.

Untuk memulai usaha sebagai pengumpul ikan teri, dibutuhkan modal untuk menyediakan bagan setidaknya bagi sekitar 10 nelayan, dengan harga bagan sekitar 25 juta rupiah per unit (lengkap dengan mesin). Para nelayan anggota tetap harus menjual hasil tangkapannya pada para pengumpul, dan mengolahnya menjadi ikan rebus atau teri kering. Untuk usaha pengolahan teri dibantu oleh 7 orang pekerja/buruh (umumnya laki-laki) sebagai tenaga tetap (bulanan), dan sekitar 20 orang tenaga sortir ikan (umumnya perempuan) dengan upah 1000 rupiah per jam. Usaha pengolahan teri ini beroperasi sekitar 8 bulan dalam setahun (berhenti operasi pada musim angin barat), dan pengiriman teri olahan ke penampung di kota, sekitar 8 ton teri kering/rebus per bulan. Hasil produksi teri pada tahun 2006 merupakan hasil tertinggi selama 4 tahun terakhir, sehingga meningkatkan pendapatan nelayan bagan pada umumnya. Harga teri segar dari nelayan jenis biasa (jenis A) sekitar 3500- 4000 rupiah per kg, sedangkan harga teri super (teri Medan) jenis B, sekitar 6000 rupiah per kg. Setelah direbus/dikeringkan harga teri bisa mencapai 26 ribu rupiah dan teri super mencapai 35 ribu per kg, dengan perbandingan antara teri segar dan teri kering sekitar 3:1

untuk teri rebus (dengan garam) dan sekitar 4:1 untuk teri kering. Persaingan diantara pengumpul teri cukup tajam, sehingga masing-masing pengumpul berusaha memelihara hubungan baik dengan nelayan yang menjadi anggotanya. Setiap pengumpul harus dapat mengatasi kendala seperti: tersedianya uang kas untuk nelayan anggota; sanggup memberi harga yang bersaing; pemotongan hutang yang longgar; dan menjaga hubungan baik dengan nelayan anggota.

Hasil FGD yang dilakukan bersama dengan para nelayan ikan karang di Desa Terapung, dan wawancara mendalam dengan nelayan, menunjukkan di kedua lokasi potensi ikan karang besar, karena lokasi terumbu karang relatif tidak jauh dari pantai, terutama di Wakambangura. Tetapi pemasaran ikan karang di Desa Terapung kurang menguntungkan, karena tidak ada lagi pengumpul ikan karang yang tinggal di desa. Harga penjualan ikan karang (mati), menjadi sangat murah karena dijual di pasar lokal. Di Desa Terapung, kebanyakan nelayan ikan karang juga nelayan bagan, sehingga penangkapan ikan karang dilakukan pada musim angin barat, ketika tidak menangkap ikan teri atau kepiting, sehingga hasilnya relatif sedikit. Di Desa Terapung terdapat sekitar 50 nelayan yang menangkap ikan karang dengan menggunakan pancing, bubu dan jaring. Bagi kebanyakan informan ikan karang, hasil ikan karang semakin berkurang, rata-rata hanya 5 kg per hari, terutama ikan Kerapu dan ikan Sunu. Hal ini karena umumnya nelayan beranggapan pada musim angin timur lebih menguntungkan untuk menangkap ikan teri dan kepiting, daripada ikan karang. Kondisi terumbu karang juga semakin rusak karena banyak nelayan dari luar dengan sarana kapal yang lebih canggih, masih menggunakan bahan yang merusak karang seperti bom, bus, dan trawl, meskipun kini sudah mulai berkurang. Sedangkan nelayan setempat yang umumnya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak berdaya menghadapi pengrusakan yang dilakukan nelayan luar daerah, meskipun merugikan mereka. Untuk mengurangi kerusakan karang di wilayahnya, banyak informan berpendapat perlunya dibuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pemanfaatan SDL dan sanksi bagi pelanggar baik untuk nelayan local maupun pendatang. Perdes

tersebut kini sedang dipersiapkan masyarakat dengan bantuan petugas lapangan COREMAP di kawasan tersebut. Menurut mereka keamanan laut akan semakin terjaga apabila pihak keamanan dilengkapi dengan polisi laut, alat komunikasi yang memadai dan sarana kapal yang cepat (*speed boat*)

Kebijakan dan peningkatan pendapatan

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, sejak tahun 2002 pemerintah daerah Kabupaten Buton yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mempunyai program skeme kredit, berupa bantuan modal, terutama untuk kelompok nelayan yang mempunyai usaha budi daya. Kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di lokasi penelitian yang memperoleh skeme kredit dari DKP, dengan penyaluran melalui kelompok yang dibentuk bersama penampung hasil usahanya. Penampung sebagai penanggung jawab pengembalian dana juga memperoleh bagian untuk membantu menutup kebutuhan sehari-hari nelayan sebelum usahanya menghasilkan. Sebagai dana bergulir, pengembalian dana dibatasi setelah waktu tertentu (setahun) dengan toleransi sampai panen. Di lokasi penelitian skeme kredit ini disalurkan terutama untuk budi daya rumput laut yang hampir merata di Kecamatan Mawasangka. Meskipun skeme ini dirasakan membantu masyarakat yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, antara lain kurang tepat sasaran, karena banyak nelayan fiktif yang memperoleh kredit, pengembalian dana yang tersendat, serta penyalahgunaan dana oleh pimpinan kelompok. Bantuan dana yang diberikan juga seringkali kurang mencukupi untuk modal usaha, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Di Desa Wakambangura sampai dengan bulan Nopember, tunggakan hutang mencapai sekitar 45 persen, sedangkan batas waktu terakhir adalah Desember 2006.

Kebijakan lainnya adalah dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan COREMAP untuk membantu menjaga pelestarian terumbu karang di wilayahnya, diantaranya melalui peran aktif DKP dalam setiap kegiatan COREMAP. Kecamatan Mawasangka

merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang menjadi daerah binaan COREMAP di wilayah Kabupaten Buton, dan kedua lokasi penelitian merupakan sebagian dari 4 desa binaan COREMAP di Kawasan Mawasangka. Diikutsertakannya masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara terpadu (RPTK terpadu), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta melindungi, memperbaiki, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya terumbu karang secara optimal dan berkelanjutan. Upaya para fasilitator lapangan dari COREMAP dalam mensosialisasikan ke masyarakat, dirasakan oleh pemerintah daerah sangat membantu upaya pelestarian terumbu karang di wilayahnya. Berdasarkan FGD yang dilakukan bersama beberapa nelayan ikan karang di lokasi penelitian, terungkap bahwa praktek pengeboman dan pembiusan ikan di wilayahnya mulai berkurang, terutama sejak COREMAP beroperasi di wilayahnya. Hampir semua informan menyatakan penggunaan bom-bom untuk menangkap ikan karang, dilakukan oleh nelayan dari luar yang merugikan nelayan setempat. Disertakannya nelayan yang mempunyai usaha budi daya ikan dalam kelompok Sistim Pengawasan Masyarakat (Siswasmas), dianggap menguntungkan nelayan, karena mereka berkepentingan akan keselamatan ikan-ikannya dari praktek pembiusan ikan, pengeboman dan sebagainya. Meskipun kegiatan COREMAP masih sebatas pemberdayaan kelembagaan, namun banyak informan nelayan yang menanggapi positif kegiatan COREMAP melalui sosialisasi, pemasangan poster dan proses pembentukan zone perlindungan ikan di wilayahnya. Bahkan beberapa nelayan menghubungkan peningkatan produksi ikan teri di wilayahnya pada tahun-tahun terakhir dengan berkurangnya bom di wilayahnya. Kini COREMAP bersama masyarakat desa binaan sedang menyiapkan peraturan desa (Perdes) untuk menetapkan zone perlindungan di laut dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk nelayan untuk menyelamatkan terumbu karang di wilayahnya. Bagi masyarakat Bajo yang merupakan etnis mayoritas di Desa Terapung, melindungi keselamatan ikan dari tindakan sewenang-wenang merupakan tugas yang sejalan dengan tradisi turun temurun sebagai pelaut. Mereka cenderung kurang peduli dengan keberadaan zone perlindungan,

karena bagi mereka yang penting adalah tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang.

Kasus kehidupan nelayan di lokasi penelitian

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kehidupan ekonomi nelayan di lokasi penelitian, perlu diungkapkan beberapa kasus kegiatan ekonomi yang menonjol di kedua lokasi yaitu kasus nelayan bagan dan nelayan kepiting di Desa Terapung dan kasus nelayan ikan karang dan usaha budi daya rumput laut di Desa Wakambangura.

1. Nelayan Bagan di Desa Terapung

Seorang informan (nelayan bagan) yang cukup berhasil dalam usahanya di Desa Terapung mengungkapkan kegiatan ekonomi sehari-hari yang dilakukan beserta keluarganya. Sebagai nelayan yang sudah lama menggeluti usahanya, dia memiliki sebuah perahu motor ukuran 24 GT dan sebuah bagan sema yang panjangnya 24 m. Informan merupakan satu diantara tiga pemilik bagan sema di desa tersebut. Bagan sema yang memerlukan mesin ukuran 24 PK, mempunyai kapasitas tangkap sekitar 5 ton ikan teri, atau 4 kali lipat dari bagan drum, yang banyak dimiliki nelayan di wilayah ini. Bagan ini dibeli pada tahun 1997 dengan harga 9 juta rupiah, dan kini harganya sekitar Rp70 juta. Sedangkan harga bagan drum lengkap dengan mesinnya kini mencapai 25 juta rupiah.

Sebagai nelayan bagan, dia pergi melaut setiap hari pada musim angin timur (gelombang tenang) yaitu bulan ke 5-9 dan musim kemarau (pancaroba) yaitu bulan 9-12. Sedangkan pada musim angin barat (gelombang kuat) dia mencari kepiting dengan alat tangkap bubu, pukot dan jaring. Pada bulan purnama (yaitu hari ke 14-17), dia seperti nelayan lainnya istirahat dari kegiatan melaut, demikian pula pada musim angin barat. Pada waktu istirahat ini, biasanya dimanfaatkan nelayan untuk merawat dan memperbaiki bagan yang rusak. Pada umumnya dia pergi melaut bertiga dengan anak-anaknya.

Hasil maksimum ikan teri yang pernah diperoleh mencapai 4 ton sekali tangkap. Dalam sebulan melaut, sekitar 3-4 hari tidak mendapat hasil tangkapan yang memadai, sehingga terkadang tidak dapat menutup biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 150 ribu rupiah untuk semalam melaut. Biaya operasional ini meliputi biaya solar 10 liter, dan selebihnya untuk keperluan makan dan rokok). Informan ini tidak seperti nelayan umumnya, untuk memenuhi kebutuhan sarana produksinya, dia lebih menyukai melakukannya secara bertahap yaitu dengan menabung lebih dulu, daripada harus berhutang (kredit) melalui para taoke/pengumpul. Kalaupun harus dengan berhutang ke taoke/pengumpul, biasanya hanya kekurangannya saja. Menurut informan, dengan memegang prinsip ini, dia bebas untuk menjual hasil tangkapannya pada pengumpul yang bersedia memberikan harga lebih tinggi dibandingkan harga untuk nelayan yang terikat hutang. Pembagian hasil dilakukan dengan membagi tiga bagian dari hasil bersih yang diperolehnya. Apabila dengan orang lain, pembagian hasil berbeda, yaitu pemilik mendapat separuh dari hasil bersih, dan selebihnya dibagi rata dengan jumlah yang ikut. Selain bagan, dia juga memiliki jaring besar ukuran 1000m dan sedang ukuran 300m untuk menangkap ikan lainnya. Perahu motornya hanya mampu menampung sekitar 2 ton ikan dengan tenaga angkut 5 orang. Apabila hasil tangkapan melebihi kapasitas, dia menyewa perahu dengan menyerahkan 50 persen hasil yang diperolehnya untuk mengganti biaya sewa. Meskipun dia membutuhkan tambahan perahu untuk menampung hasil tangkapan, namun dia enggan berhutang kepada taoke, karena alasannya “hutang ke bos berat dan banyak resiko”. Demikian pula dengan pemanfaatan koperasi, pada umumnya nelayan tidak cocok dengan sistem koperasi yang mewajibkan pembayaran hutang dengan sistem bulanan. Menurutnya “bos/taoke lebih toleran dalam sistem pembayaran hutang, karena pada musim angin barat tidak ada keharusan untuk bayar hutang”.

Harga penjualan teri basah ke penampung lokal pada umumnya lebih rendah dari penampung luar, yaitu untuk teri basah jenis A 2000 rupiah per kg dan teri jenis B 5000 rupiah per kg. Sedangkan harga teri kering jenis A adalah 15 ribu rupiah dan jenis B

25 ribu rupiah per kg. Apabila penjualan teri dilakukan pada penampung dari luar desa, biasanya harga teri lebih tinggi dari harga dari penampung lokal (selisih harga mencapai 2000 rupiah/kg). Biasanya penampung dari luar desa datang ke lokasi sebulan sekali untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang tidak terikat oleh taoke atau pengumpul lokal.

Usaha lainnya yang dilakukan informan bersama keluarga adalah usaha budi daya rumput laut, dengan hasil bersih 100 kg setiap panen. Semula dia memiliki 100 tali dengan hasil 200 kg, kemudian berkurang kini menjadi 40 tali, karena rusak ditabrak perahu orang. Usaha menangkap kepiting banyak dilakukan pada musim gelombang kuat (musim sulit menangkap ikan). Biasanya dengan menggunakan bubu, jaring dan pancing hasilnya cukup untuk menutup kebutuhan selama musim susah. Penjualan kepiting juga dilakukan pada pengumpul lokal, karena harganya cukup bersaing.

2. Nelayan Kepiting di Desa Terapung

Di lokasi penelitian, nelayan yang mempunyai lapangan pekerjaan utama sebagai nelayan kepiting relatif sedikit. Pada umumnya nelayan bagan merangkap sebagai nelayan kepiting pada musim angin timur atau merupakan alternatif pekerjaan nelayan di musim sulit ikan (musim angin barat). Salah satu nelayan kepiting sebagai informan menuturkan bahwa penangkapan kepiting, relatif menguntungkan karena selain potensinya besar, pasaran juga masih luas dan harganya cukup bersaing. Sebagai nelayan kepiting dia memilih menggunakan bubu sebagai alat tangkapnya, dan kini semakin banyak jumlahnya (75 unit bubu). Bubu yang digunakan merupakan hasil buatannya sendiri, untuk meningkatkan hasil tangkapan kepiting. Selain bubu, dibutuhkan tali pengikat bubu (jarak antar 2 bubu sekitar 9 depa), sehingga untuk keperluan 75 bubu dibutuhkan 5 rol tali.

Sebagai nelayan kepiting, setiap hari (jam 5 sore sampai pagi) dia ke laut untuk melihat hasil tangkapannya, sehingga dalam sebulan

(sekitar 25 hari) dia pergi ke laut (5 hari untuk istirahat). Biaya operasional yang dikeluarkan untuk setiap kali melaut biasanya untuk membeli umpan (ikan kecil seharga Rp1500), minyak tanah setengah gelas (sekitar Rp1500) untuk penerangan, dan 2 L solar (sekitar Rp10.000) dan untuk keperluan konsumsi. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk sekali melaut sebesar Rp30.000. Sedangkan hasil tangkapan rata-rata per hari 8 kg (per kg berisi 10-12 ekor) dengan harga jual 17 ribu per kg. Lokasi pemasangan bubu juga tidak jauh dari pantai, sehingga biaya transport relatif murah (2 liter solar) untuk sekali melaut. Keuntungan yang diperoleh juga cukup besar, karena biaya operasional relatif murah.

Bubu buatannya terbukti banyak diminati nelayan, baik di lokasi maupun dari luar, sehingga dalam setahun terakhir informan juga menerima pesanan untuk membuat bubu. Ketrampilan membuat bubu diperoleh dari kakak iparnya di Pulau Balu. Modal yang diperlukan untuk membuat 100 unit bubu sekitar 780 ribu rupiah (terdiri dari kawat 1 bal dan jaring 6 kg). Harga penjualan per bubu sekitar 35 ribu rupiah atau 3,5 juta rupiah per 100 bubu. Selama setahun terakhir dia sudah membuat 200 unit bubu pesanan, dan kini sedang dibuat 500 unit lagi untuk memenuhi pesanan dari Desa Tapi. Dengan kedua usahanya ini, informan tersebut menerima penghasilan bersih lebih dari 2 juta rupiah per bulan, setelah dipotong cicilan hutang untuk rumah oleh pengumpul sebesar 1.115 ribu rupiah (hutang sebesar Rp1 juta). Informan tidak pernah menggunakan pancing untuk menangkap kepiting, karena umpan (dari ikan pari) mudah bau.

Hasil wawancara mendalam dengan salah seorang dari 4 pengumpul kepiting di lokasi, yang sudah sekitar setahun menjadi pengumpul, setiap dua hari sekali dia mampu mengumpulkan sekitar 50 -60 kg kepiting dari 10 nelayan yang dimodalnya. Setiap nelayan membutuhkan sedikitnya 100 bubu dengan harga per bubu sekitar 35 ribu rupiah. Setiap bubu dapat menghasilkan sekitar 10 kg untuk sekali tarik, sehingga semakin banyak bubu yang dimiliki, makin besar hasil tangkapannya. Kebutuhan modal untuk setiap nelayan dengan 100 unit bubu adalah 3.5 juta rupiah. Sedangkan modal yang

diperlukan untuk membeli jaring (ukuran 100 m) lebih dari 100 ribu rupiah. Nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing dan jaring, juga harus menjaganya sepanjang malam dengan hasil yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan memiliki banyak bubu. Hal ini menjadi kendala utama bagi para pengumpul, karena harus menyediakan modal yang cukup besar untuk memperbanyak hasil tangkapan. Pengumpul kepiting juga harus bersaing dengan pengumpul lain yang lebih mapan dalam menentukan harga bagi nelayan anggotanya. Kendala lainnya adalah kesetiaan nelayan untuk menyetorkan hasil tangkapan ke pengumpul yang telah memberi modal, karena persaingan harga diantara pengumpul. Sebagai pengumpul selain memperoleh keuntungan dari selisih harga antara nelayan dan harga dari taoke, mereka juga mendapat bonus sebesar 1 juta rupiah dari taoke, apabila berhasil mengumpulkan sekitar 1 ton kepiting dalam jangka waktu 2 minggu. Pasaran kepiting masih cukup luas di wilayah Buton, hal ini terbukti dengan bonus yang disediakan para taoke dan tidak ada batasan jumlah bagi para pengumpul. Untuk mencapai target yang dibutuhkan, para pengumpul kadang hanya mengandalkan bonus dari para taoke yang besarnya sekitar 2 juta rupiah per bulan.

3. Nelayan Ikan Karang di Desa Wakambangura

Seperti daerah pantai lainnya, kebanyakan penduduk di Desa Wakambangura menggantungkan hidupnya dari hasil sumber daya laut. Kondisi Desa Wakambangura yang kurang subur untuk mengembangkan pertanian pangan atau tanaman keras, menyebabkan sumber daya laut menjadi andalan utama bagi penduduk di daerah tersebut. Seperti dijelaskan dimuka, terdapat dua lapangan pekerjaan yang menonjol di daerah ini yaitu kegiatan kenelayanan, terutama penangkapan ikan karang dan cakalang, serta budi daya rumput laut. Terumbu karang tersedia memanjang di laut dan letaknya sekitar 300 m dari garis pantai. Di lokasi ini hasil ikan karang masih menonjol, terutama berbagai jenis ikan karang hidup seperti Kerapu dan Sunu yang harganya relatif mahal. Secara umum hasil ikan karang

mengalami penurunan akibat kerusakan karang yang telah berlangsung lama. Seorang informan yang merupakan satu-satunya pengumpul ikan karang, mengungkapkan pengalamannya sebagai penampung hasil dari 5 orang nelayan ikan karang di daerah tersebut.

Sebagai pengumpul hasil ikan karang, dia harus menyediakan semua peralatan tangkap yang diperlukan seperti kapal motor, compresor, dan bubu untuk 5 orang nelayan ikan karang di lokasi tersebut. Konsekuensinya nelayan harus menjual ikan karang hidup ke penampung. Sedangkan penjualan ikan karang yang sudah mati sulit dikontrol karena banyak tengkulak yang datang ke lokasi untuk membelinya. Hasil rata-rata ikan karang hidup yang diperoleh dari setiap nelayan ikan karang sekitar setengah ton dalam waktu 1-2 bulan. Apabila persediaan ikan karang hidup sudah mencapai sekitar 100 kg di lokasi, kapal export dari Bau-bau akan datang untuk mengambil hasilnya, sementara urusan dengan nelayan ikan karang di selesaikan oleh pengumpul yang tinggal di Kecamatan Mawasangka. Jenis ikan karang yang banyak diperoleh adalah ikan Sunu dan Kerapu terutama jenis lumpur, tiger dan tikus. Jenis ikan Kerapu yang paling mahal adalah Kerapu Tikus jenis super (berat di atas 6 ons) yang mencapai 28 -30 dollar US per kg (sekitar Rp300.0000 per kg). Sedangkan jenis ikan Kerapu paling murah adalah kerapu lumpur yang harganya sekitar 4 dollar US per kg (Rp30.000). Harga-harga ini ditentukan oleh penampung yang biasanya lebih rendah dari harga pasaran ikan karang.

Seorang nelayan ikan karang yang mendapat modal dari pengumpul (seharga Rp 10 juta), biasanya menggunakan alat tangkap bubu dan alat pernafasan compresor. Pengalaman menyelam dengan compresor diperoleh ketika merantau ke Pulau Tujuh (Sumatera) dan bekerja di perusahaan ikan. Di samping compresor dia memiliki 5 unit bubu dan pukat. Pada musim gelombang tenang (bulan 7-12) dia pergi ke laut setiap hari untuk beberapa jam/setengah hari. Biaya operasional yang dikeluarkan terutama untuk membeli 5L solar (untuk kapal) dan 4 L premium (untuk compresor). Wilayah tangkap di lokasi karang Desa Wakambangura sampai ke Gumanano. Hasil tangkapan berbagai jenis ikan karang seperti ikan Kerapu (tiger,

lumpur dan tikus), ikan Sunu, udang, tripang dan ikan Napoleon. Nelayan dari luar daerah juga mengambil ikan karang dari desa ini. Sarana dan peralatan alat tangkap yang dipakai berasal dari penampung dengan sistim bagi hasil, yaitu penampung memperoleh bagian yang sama yaitu sepertiga dari hasil bersih. Penjualan hasil tangkapan juga harus ke penampung, terutama ikan karang hidup. Pemilik dan anak buah memperoleh bagian masing-masing yaitu sepertiga hasil bersih. Hasil bersih yang diperoleh pemilik rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Apabila banyak ikan karang yang dihasilkan, biasanya tengkulak dari luar datang dan berani membeli dengan harga lebih mahal dari penampung lokal. Biasanya ikan hidup yang diperoleh disimpan lebih dulu di keramba, sampai mencapai jumlah tertentu, kemudian diambil oleh kapal dari Bau-bau. Biasanya panen dilakukan setiap 3 bulan, dengan pendapatan bersih sekitar 5 juta rupiah. Resiko yang dihadapi oleh nelayan ikan karang adalah menderita kram anggota badan, terutama merasakan sakit ditangan, akibat menyelam terlalu dalam. Untuk mengurangi resiko ini nelayan karang biasanya didampingi nelayan lain untuk menjaga keselamatan penyelam. Meskipun hasil ikan karang tidak terlalu banyak, namun pendapatan dari ikan karang cukup besar, terutama apabila memperoleh jenis ikan karang yang relatif mahal, seperti kerapu tikus, teripang dan udang mutiara.

4. Budi Daya Rumput Laut di Desa Wakambangura

Budi daya rumput laut merupakan kegiatan masyarakat yang dikenal luas di kawasan ini, sehingga dapat ditemukan pada hampir semua desa (11 dari 14 desa) di Kecamatan Mawasangka. Usaha ini merupakan mata pencaharian pokok kedua penduduk atau bahkan pekerjaan utama di musim angin barat. Kegiatan budi daya rumput laut di lokasi ini melibatkan sekitar 75 persen nelayan dengan rentang usaha sepanjang 800 m di tepi laut, atau hampir sepanjang lokasi desa. Setiap panen, hasil rumput laut dari Kecamatan Mawasangka mencapai sekitar 200 ton, dan hasil terbesar diperkirakan dari Desa Wakambangura (lokasi penelitian). Hal yang penting lainnya adalah

kegiatan yang melibatkan semua anggota keluarga termasuk anak-anak, karena sebagian tahapan kegiatan di lakukan di darat dan sebagian lainnya di laut, sehingga pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan lebih jelas, yaitu perempuan melakukan kegiatan di darat dan laki-laki yang melakukan kegiatan di laut.

Seorang informan yaitu istri dari nelayan ikan cakalang yang berhasil, aktif dalam mengelola usaha budi daya rumput yang dimiliki keluarganya. Waktu diwawancarai sedang dalam masa panen rumput laut (100 tali) selama 3 hari. Panen dilakukan pada pagi hari, siang harinya dilanjutkan dengan menyiapkan penanaman kembali bibit rumput laut, yang diambil dari sebagian hasil panen. Oleh karena penanaman bibit harus selesai dalam hari yang sama, biasanya dia dibantu sekitar 10 tenaga kerja (keluarga dan tetangga) yang umumnya perempuan, untuk mengikatkan bibit rumput laut ke 50 tali dari sekitar 100 tali yang dimilikinya. Pekerjaan tali temali biasanya selesai dalam 3 jam (jam 3-6). Setiap orang dapat menyelesaikan maximum 4 tali dalam satu jam dengan upah per tali Rp1000 atau Rp 4000 per jam. Pekerjaan semacam ini selalu tersedia di desa tersebut, karena setiap hari ada orang yang panen, sehingga mereka yang rajin bekerja, bisa dapat sekitar Rp10.000 per hari. Kegiatan tersebut bersifat fleksibel, siapa saja dapat bekerja atau berhenti kapan mereka mau. Untuk anak laki-laki biasanya membantu mencuci tali yang akan digunakan dari sisa-sisa rumput laut sebelumnya, dengan upah 100 rupiah per tali. Dalam satu jam mereka dapat menyelesaikan sekitar 30-50 tali atau antara 3000- 5000 rupiah. Panen dilakukan dalam 6 bulan setiap tahun, kemudian selama 3 bulan (musim angin kencang), tali akan diangkat semua, untuk menghindarkan kerusakan atau hilang akibat terbawa arus. Pada musim angin barat, terutama ketika air laut surut, biasanya banyak orang mencari rumput laut yang tersangkut di karang.

Sewaktu memulai usaha budi daya rumput laut, bibit dibeli informan sekitar 100 ribu rupiah untuk diikat dalam 7 buah tali, yang kemudian berkembang menjadi 20 tali dalam sebulan. Setelah panen, bibit diperoleh dari sebagian hasil panen dan selebihnya dijemur selama 2 hari untuk dijual. Biaya operasional yang diperlukan untuk

mengikat bibit di tali dan lain-lain selama 3 hari sekitar 300 ribu rupiah. Pemasangan tali yang sudah terisi bibit rumput laut di laut, dilakukan oleh tenaga laki-laki, biasanya pemilik dengan keluarga, dan apabila dilakukan orang lain upahnya 20 ribu rupiah. Untuk memasang tali-tali tersebut di laut, diperlukan 3 buah jangkar dengan harga per kg sekitar 5 ribu rupiah. Setiap jangkar memerlukan 15-25 kg, sehingga untuk pembelian 3 buah jangkar diperlukan biaya sekitar 500 ribu rupiah.

Hasil panen yang diperoleh sekitar 5 pikul (per pikul 100 kg) rumput laut kering atau sekitar setengah ton. Hasil penjualan yang diterima dari penampung sekitar 2 juta rupiah (dengan harga jual sekitar 4 ribu rupiah per Kg). Hasil panen yang diperoleh juga dipengaruhi banyak faktor antara lain kualitas bibit, adanya hama, kondisi alam/cuaca, dan masih adanya kasus pencurian (sekali dalam setahun). Biasanya panen yang paling bagus terjadi pada bulan 7-9 (musim angin timur) dengan ciri angin bertiup kencang di siang hari, namun teduh di malam hari, dan airnya jernih. Pada musim angin barat, kalau dipaksakan menanam, banyak yang hancur terkena angin kencang, atau hilang terangkut ombak, dan kualitas hasil rumput laut jelek, karena pengaruh air keruh dan ombak yang kencang. Biasanya informan menjual hasil rumput laut kepada salah satu penampung di lokasi.

Seorang informan (salah satu penampung rumput laut) menuturkan untuk menampung hasil dari 10 petani budi daya rumput laut, diperlukan modal minimal 500 ribu rupiah per petani. Bantuan ini untuk menyiapkan bibit perdana dan biaya-biaya lainnya. Informan tersebut mampu menampung sekitar 30 persen hasil rumput laut di lokasi. Sesuai dengan kesepakatan, biasanya pembayaran kepada petani dilakukan setelah penampung memperoleh pembayaran dari taoke di Bau-bau. Baru-baru ini melalui skeme kredit dari DKP, para penampung memperoleh bantuan modal sebesar 40 juta rupiah dengan pembagian 25 juta rupiah untuk bantuan modal bagi 27 petani dan selebihnya untuk modal bagi penampung. Setiap petani budi daya rumput laut mendapat bantuan modal antara 500 ribu sampai 2 juta rupiah, dengan mencicil sekitar 280 ribu rupiah dan harus dilunasi

dalam setahun. Skeme kredit ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan petani, terutama ketika hasil panen terbatas (6 bulan). Namun demikian skeme tersebut kini diberhentikan, karena dalam pelaksanaannya banyak kendala, antara lain adanya petani fiktif, banyak tunggakan dan lemahnya sistim pengawasan.

Pemasaran rumput laut miliknya berasal langsung **dari petani → penampung di lokasi → tengkulak dari Bau-bau → tengkulak di Surabaya**. Informan dapat mengirim hasil rumput laut kering ke tengkulak di Surabaya, apabila berhasil memperoleh lebih dari 100 Kg sekali kirim, karena biaya transport ke Surabaya jauh lebih mahal (Rp250.000 per Kg) dibandingkan pemasaran ke Bau-bau (Rp100.000/Kg), dengan datang ke lokasi. Jumlah penampung rumput laut di lokasi tiga orang, yang bersaing dalam harga untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Informan mengakui prospek budi daya rumput laut cukup bagus di daerahnya, pasaran masih luas. Kendala yang dihadapi adalah bantuan modal untuk petani yang tidak mampu, masalah hama, dan cuaca, sehingga dapat mempengaruhi hasil (jumlah dan kualitas). Informan tidak mau pinjam bank, selain bunganya besar, tidak mau ambil resiko, apabila karena sesuatu hal tidak dapat membayar kembali. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membantu petani dengan modal terbatas, dan menunda pembayaran kepada petani sesudah mendapat bayaran dari tengkulak yang lebih besar.

4.2.2. Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Kadatua

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 rumah tangga di lokasi penelitian, rata-rata pendapatan per kapita cukup rendah yaitu sekitar 47.372 rupiah (Tabel 4.9). Hal ini dimungkinkan karena corak perekonomian penduduk di lokasi ini cenderung subsisten. Pada saat musim gelombang kuat, kondisi subsisten ini semakin terlihat nyata, terutama untuk desa-desa yang relatif jauh dari kota kabupaten. Perputaran uang di desa-desa ini sangat terbatas, perekonomian komersial baru mulai terlihat ketika musim gelombang tenang.

Perdagangan hasil laut cukup intensif yang ditandai dengan datangnya pedagang-pedagang pengumpul ke wilayah ini.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan di lokasi penelitian Kecamatan Kadatua sekitar 209.329 rupiah (Tabel 4.9). Pendapatan sebesar itu terutama diperoleh dari penghasilan kepala rumah tangga. Kontribusi istri dan anak biasanya membantu kegiatan bertani dengan menanam ubi kayu, jagung dan pisang ; beternak kambing, ayam dan itik. Akan tetapi jumlah ini belum termasuk uang kiriman dari anggota keluarga yang bekerja di rantau, seperti ke Malaysia, Maluku dan Papua. Tidak ada data yang memadai tentang besarnya kiriman dari rantau. Pendapatan yang relatif besar biasanya diperoleh dari para perantau dari Malaysia atau mereka yang bekerja sebagai nelayan *redi* (pukat cincin). Hasil yang diperoleh dari rantau biasanya relatif besar bagi orang Kadatua, dan dapat digunakan sebagai modal usaha sepulang dari rantau.

Tabel 4.9. Statistik Pendapatan di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Tahun 2006 (Rupiah)

Pendapatan per bulan	Rupiah
Per kapita	47.372.39
Rata-rata Rumah Tangga (RT)	209.329.04
Minimum pendapatan RT	4.166.67
Maksimum pendapatan RT	2.235.833,33

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, LIPI, 2006

Apabila pendapatan rumah tangga rata-rata per bulan dibandingkan menurut jenis pekerjaan, maka hasil survei menunjukkan kecenderungan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan relatif tinggi dibandingkan rumah tangga non nelayan, meskipun ada satu rumah tangga petani lainnya (non nelayan) mempunyai rata-rata pendapatan RT yang menonjol (Rp500.000) (Tabel 4.10). Perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan cukup timpang antara nelayan berpenghasilan minimum dengan

nelayan berpenghasilan maksimum. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan jenis alat tangkap yang dimiliki nelayan (*redi*, pancing atau jenis alat tangkap lainnya) dan sarana kenelayanan (perahu bermotor atau tidak, ukuran perahu), serta usia nelayan (tua atau muda).

Rata-rata hasil yang diperoleh nelayan relatif besar apabila dibandingkan dengan responden non nelayan dalam arti ekonomi komersial. Ketika musim gelombang kuat, corak ekonomi subsisten terlihat sekali di desa-desa di Kecamatan Kadatua. Ketergantungan penduduk terhadap hasil laut sangat besar. Hanya sayangnya harga ikan sangat rendah dan sangat dikendalikan oleh pihak pedagang pengumpul.

Tabel 4.10. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Jenis Pekerjaan KRT, Kecamatan Kadatua, Tahun 2007

No	Jenis pekerjaan KRT	Pendapatan			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
1	Nelayan	258.527	6.250	2.235.833	71
2	Petani lainnya	500.000	500.000	500.000	1
3	Tenaga Penjualan	45.476	4.167	168.333	14
4	Tenaga Kasar	81.458	4.167	280.000	4
5	Tenaga jasa	95.944	66.667	112.833	3
6	Menganggur	49.792	12.500	139.583	4
Total		209.329	4.167	2.235.833	97

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, LIPI, 2006

Apabila melihat rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan di sektor perikanan tangkap yang relatif besar (sekitar Rp. 258.000,- per bulan), dan pendapatan maksimum sekitar Rp 2.235 ribu, atau 10 kali lipat, menunjukkan keragaman pendapatan yang tajam pada rumah tangga nelayan satu dengan nelayan lain di lokasi COREMAP. Perbedaan yang tajam ini terutama dari nelayan perikanan tangkap yang menggunakan alat tangkap *redi* (pukat cincin). Alat ini diperkenalkan oleh sebuah LSM yang dibantu pemerintah AUSaid.

Proyek ini merupakan bagian strategi untuk membantu penduduk mencari ikan hiu di perairan Australia.

Dibandingkan dengan pendapatan RT nelayan, pendapatan RT dengan jenis pekerjaan lain (non perikanan) jauh lebih kecil (di bawah Rp100.000), bahkan untuk tenaga penjualan (sektor perdagangan) dan jasa, pendapatan rata-rata RT kurang dari Rp 50.000 (Tabel 4.10).

Pendapatan rata-rata rumah tangga menurut lapangan pekerjaan di lokasi penelitian (Kecamatan Kadatua) secara keseluruhan masih di bawah rata-rata pendapatan kabupaten (Rp3.289.810) (Sensus Pertanian, 2003). Kondisi perekonomian inilah yang mendorong penduduk di daerah ini banyak yang pergi merantau ke daerah lain untuk mencari tambahan penghasilan. Hal ini juga terlihat dari hasil survei di kedua lokasi binaan COREMAP yaitu Desa Waonu dan Kapoa yang menunjukkan rata-rata penghasilan RT dengan lapangan pekerjaan nelayan tangkap jauh lebih tinggi (sekitar Rp258.000 per bulan) dibandingkan dengan RT dengan lapangan pekerjaan di sektor lainnya (seperti perdagangan, industri rumah tangga dan jasa) yang pendapatan rata-ratanya kurang dari 100 ribu rupiah per bulan (Tabel 4.11). Ketimpangan penghasilan juga nampak antar rumah tangga dengan melihat perbedaan yang tajam antar penghasilan minimum dan maksimum pada semua sektor.

Tabel 4.11. Statistik Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan RT di Lokasi Penelitian Kec. Kadatua, Kab. Buton 2006

No	Lapangan pekerjaan KRT	Pendapatan			N
		Rata-rata	Minimum	Maksimum	
1	Perikanan Tangkap	258.825	6.250	2.235.833	73
2	Jasa	55.611	4.167	112.833	6
3	Perdagangan	45.476	4.167	168.333	14
4	Lainnya	49.792	12.500	139.583	7
Total					100

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, LIPI, 2006

Nelayan di Kecamatan Kadatua melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun. Hanya saja pada musim gelombang kuat HOK (hari orang kerja) berkurang dibandingkan musim gelombang lemah, nelayan jarang turun melaut dan walaupun melakukan penangkapan ikan hanya di dekat-dekat pantai saja. Seringkali para nelayan dan keluarga hanya sekedar mengumpulkan kerang-kerangan, siput, bulu babi, gurita serta ikan yang terperangkap pada waktu air laut surut. Kaum perempuan dan anak-anak banyak terlibat dalam aktivitas pengumpulan hasil laut ini, minimal untuk keperluan konsumsi keluarga.

Penelitian kali ini mencoba mengamati pendapatan nelayan pada tiga periode, yakni saat gelombang kuat, pancaroba (peralihan) dan gelombang lemah untuk melihat intensitas pemanfaatan sumber daya ikan. Selain perbedaan hasil yang diperoleh menurut musim, kelengkapan data lain juga dicari seperti jarak melaut, lamanya melaut, frekuensi (berapa kali dalam sehari melaut), jenis alat tangkap yang digunakan dan variasi pemanfaatan SDL pada ketiga musim tersebut.

- a. *Jarak melaut. Fishing ground* (tempat mencari ikan) terbatas sekali jaraknya, tidak jauh dari pulau tempat tinggal nelayan berkisar antara 400-500 meter-an dari bibir pantai pada musim gelombang lemah, tidak lebih dari 300 meter pada musim pancaroba dan kurang dari 200 meter pada musim gelombang kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi daerah paparan pulau, khususnya perairan tiap desa, yang relatif sempit dan sarana penangkapan ikan yang masih sangat sederhana serta masih bersifat tradisional. Faktor lain yang dominan mempengaruhi adalah corak kehidupan masyarakatnya yang masih subsisten, nelayan menangkap ikan sebagian besar hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja.
- b. *Lama melaut.* Pada musim gelombang lemah, umumnya nelayan melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 7 jam, dihitung mulai saat berangkat meninggalkan pantai sampai dengan kembali lagi. Pada saat pancaroba lama di laut

berkurang hanya sekitar 5 jam saja dan menjadi sangat terbatas pada musim gelombang kuat tidak lebih dari 2 jam saja. Faktor utamanya adalah sarananya yang sebagian besar berupa sampan tidak bermotor. Saat penelitian ini berlangsung, penduduk merasakan bahwa musim melaut sekarang ini tidak menentu. Secara tradisional musim gelombang kuat 5 bulan, musim gelombang lemah 6 bulan dan pancaroba 1 bulan. Namun kini periode musim cenderung tidak pasti, bisa lebih panjang atau lebih pendek.

- c. *Frekuensi melaut.* Umumnya nelayan di Kecamatan Kadatua dalam melakukan penangkapan ikan sangat tergantung pada cuaca. Pada musim gelombang lemah penangkapan ikan dilakukan hampir tiap hari. Pada musim gelombang kuat, nelayan melakukan usaha penangkapan ikan lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jumlah hari melaut pada musim itu sangat sedikit, rata-rata terdapat 5 - 6 hari orang kerja (HOK) melaut dalam sebulan. Pada musim pancaroba tidak menentu jumlah hari melautnya, tetapi biasanya tidak setiap hari nelayan turun ke laut.
- d. *Jenis alat tangkap.* Alat tangkap yang dominan dimiliki oleh hampir setiap nelayan adalah pancing ulur, sebagian besar berupa pancing berukuran kecil. Sebagian nelayan memiliki pancing yang berukuran besar untuk digunakan di perairan dalam. Pada musim gelombang kuat dan pancaroba, rata-rata nelayan hanya menggunakan satu jenis alat tangkap, yaitu pancing ulur. Sebaliknya pada musim gelombang lemah, nelayan biasa menggunakan alat tangkap bubu, pancing ulur, panah yang dikombinasi dengan penggunaan *gillnet*. Sebagian nelayan lainnya khususnya di Desa Banabungi dan Desa Kapoa, biasa menggunakan pukot cincin (dikenal dengan nama lokal: *redi*) untuk menangkap ikan terbang, ikan cakalang, tongkol dan lain-lain. Penggunaan alat tangkap menurut musim ini tidak sepenuhnya kaku seperti diuraikan di atas, karena pada musim gelombang kuat, nelayan juga biasa menggunakan alat tangkap yang digunakan pada saat musim gelombang lemah. Namun alat

tangkap utama yang digunakan pada saat gelombang kuat adalah pancing ulur.

- e. *Jenis ikan tangkapan.* Pada saat gelombang kuat, jenis ikan yang biasa diperoleh nelayan adalah jenis biota laut seperti gurita, bulu babi, kerang-kerangan, mata tujuh, jenis ikan-ikan pelagis tertentu. Pada saat gelombang kuat, populasi ikan Tongkol menurun dan nelayan lebih banyak memperoleh ikan Layang. Pada musim ini hasil tangkapan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daripada untuk keperluan komersial. Pada musim gelombang tenang nelayan lebih banyak memperoleh ikan Layang, ikan Tude dan ikan Tongkol, yang umumnya diperoleh di luar Rumpon. Pada musim ini ikan-ikan pelagis non-karang banyak diperoleh. Jenis-jenis ikan karang yang sering diperoleh oleh nelayan adalah ikan Merah (Kiwale), ikan Lompa-lompa dan ikan Kerapu (meskipun sejak tahun 1980-an semakin sulit diperoleh).
- f. *Pendapatan Nelayan.* Penghasilan keluarga nelayan merupakan sentral isu dari penelitian kali ini. Penghitungan penghasilan yang tidak menentu ini seringkali menyulitkan para peneliti maupun pembuat kebijakan, yang implikasi berikutnya tentu menyulitkan dalam menyusun agenda maupun berbagai program untuk komunitas nelayan tersebut. Setidaknya ada tiga kesulitan besar dalam menghitung penghasilan mereka. Pertama, kelebihan penelitian ini adalah memasukkan juga musim pancaroba sebagai bagian yang harus dihitung tersendiri. Masalahnya, periode musim pancaroba tidak pernah menentu sejak dulu. Bahkan kini pola musim makin tidak menentu, musim gelombang kuat atau musim gelombang tenang bisa lama sekali. Hal ini berdampak semakin rumit menghitung penghasilan per periode musim. Bagi masyarakat nelayan di Kadatua, musim pancaroba lebih sering dikategorikan sebagai periode musim gelombang kuat, karena penghasilan relatif mulai menurun dan kondisi di laut sudah mulai tidak stabil lagi. Kedua, fluktuasi harga ikan juga cukup tinggi, sehingga untuk memperoleh perbandingan penghasilan antara satu tahun dengan

tahun lainnya tidak cukup hanya sekedar melihat hasil produksi pada kedua tahun tersebut.

Apabila dikaitkan dengan penghasilan agak rumit, karena: (1) pada saat gelombang kuat jenis tangkapan agak berbeda dengan saat gelombang lemah; (2) Pada saat gelombang kuat, orang mencari jenis biota laut seperti gurita, bulu babi, kerang-kerangan, mata tujuh, jenis ikan-ikan pelagis tertentu; (3) Hasil tangkapan lebih dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dibandingkan untuk tujuan komersial; (4) Pola kerja masyarakat adalah '*pluri-activity*', yaitu menjadi nelayan hanya ketika berada di desa, sedangkan sebagian besar waktunya sebenarnya tercurah untuk berdagang dengan hasil yang jauh lebih besar daripada hasil nelayan. Masyarakat Kadatua pada dasarnya bukanlah nelayan murni, mereka lebih mencurahkan waktu untuk berdagang. Penghasilan keluarga nelayan secara sederhana merupakan perkalian antara hasil produksi yang diperoleh dengan harga jual, kemudian dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi (Soekartawi, 1995) atau dengan rumus berikut :

$$n$$
$$TPB = \sum_{i=1} (Y_i P_i - C_i)$$

dimana :

TPB = total penerimaan bersih

Y_i = produksi yang diperoleh dalam suatu usaha perikanan

P_i = Harga Y

C_i = biaya atau ongkos produksi

Rantai pemasaran

Nelayan di kedua lokasi survei biasa menjual hasil tangkapan ikan kepada pedagang pengumpul yang datang ke Kecamatan Kadatua. Jadi mata rantai pemasaran ikan di Kecamatan Kadatua:

Nelayan → pedagang pengumpul di lokasi → pedagang

**pengumpul besar di Kota Bau-bau → Pedagang Besar Kendari
→ pedagang di Makassar dan Surabaya**

Catatan: Pedagang pengumpul sering juga datang ke lokasi untuk membeli hasil-hasil tangkapan ikan dan mengirim langsung ke Kendari.

4.2.3. Pendapatan Nelayan menurut Musim

Sebenarnya penghasilan nelayan di Kecamatan Kadatua lebih banyak diupayakan pada musim gelombang tenang. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan untuk usaha kenelayanan. Pengeluaran utama untuk pangan adalah untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras. Sedangkan untuk lauk pauk diperoleh dari hasil kegiatan kenelayanan. Masyarakat Kadatua umumnya tidak begitu suka untuk mengkonsumsi daging, selain harganya mahal juga karena anggapan bahwa ikan lebih enak rasanya dibandingkan daging. Selain itu, konsep ikan segar sangat mempengaruhi konsumsi penduduk, sehingga penduduk enggan untuk makan ikan yang diasap atau diasinkan. Bahkan ikan dibakar merupakan proses pemasakan yang dihindari. Kalau tidak diperoleh ikan, mereka bahkan mau membeli ikan ke Kota Bau-bau. Hal ini dapat disaksikan pada saat penelitian ini berlangsung, untuk keperluan hajatan pernikahan, ikan dibeli dari Kota Bau-bau, karena hasil laut cenderung sangat kurang. Sedangkan nelayan harus membeli bahan bakar yang semakin mahal untuk kegiatan kenelayanan.

Gelombang kuat berlangsung selama 5 bulan, dari bulan Desember sampai dengan bulan April. Seringkali bulan November sudah terjadi gelombang kuat di laut dan berakhir bulan Maret. Pada musim ini angin kencang dan ombak keras serta tinggi yang menyebabkan penduduk mencari ikan di sekitar perairan desa saja. Pada musim ini alat tangkap yang banyak dipakai adalah *redi* dan pancing ulur. Untuk kegiatan kenelayanan di area rumpon digunakan pancing sampai dengan 50 macam. Akibatnya penghasilan nelayan

cenderung rendah. Faktor utama yang berpengaruh adalah sebagian besar sampan yang dimiliki nelayan merupakan sampan tanpa motor, sehingga tidak bisa pergi jauh dari pantai dan tidak bisa bertahan lama di laut. Selain itu, pada musim ini kaum perempuan ikut terlibat dalam aktivitas pengumpulan hasil laut seperti siput, kerang-kerangan, bulu babi bahkan gurita.

Berdasarkan survei di kedua lokasi binaan COREMAP, rata-rata penghasilan yang diperoleh pada musim gelombang kuat relatif kecil yaitu sekitar 120 ribu rupiah dan penghasilan maksimal yang diperoleh pada musim ini sekitar 750 ribu rupiah (Tabel 4.12). Pada musim ini kegiatan ekonomi penduduk lebih variatif dibandingkan pada musim-musim lain. Kegiatan yang menonjol adalah berdagang, merantau ke Malaysia, mencari sirip hiu, dan budi daya rumput. Rumah-rumah penduduk banyak kosong, karena sebagian pergi merantau ke luar daerah, untuk melakukan pekerjaan di luar kegiatan kenelayanan.

Tabel 4.12. Statistik Pendapatan RT Nelayan Menurut Musim di Lokasi Penelitian Kec. Kadatua, Kab. Buton, 2006 (Rupiah)

Pendapatan	Musim		
	Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
Rata-rata	375.563	281.197	120.216
Minimum	5.000	15.000	4.000
Maksimum	3.800.000	2.280.000	750.000

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu KarangIndonesia, LIPI, 2006

Bila kegiatan pengumpulan hasil laut di tepi pantai yang banyak dilakukan oleh kaum perempuan bisa dikonversikan dengan baik, hasilnya akan sangat berbeda. Misalnya jenis Bulu Babi harganya relatif rendah yaitu sekitar 2000 rupiah per buah. Namun apabila berhasil mengumpulkan dalam jumlah banyak, maka hasil sebulan relatif besar. Hasil ini tidak terhitung sebagai penghasilan

rumah tangga, karena umumnya hasil Bulu Babi pada musim gelombang kuat, pada umumnya untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dibakar dan dimakan bersama nasi atau kasoami (makanan tradisional dari ubi kayu).

Musim pancaroba berlangsung sekitar 1 bulan lebih dan kurang dari 2 bulan. Bagi penduduk desa Kapoa, sekitar bulan April dan bulan Mei merupakan musim pancaroba, yang orang biasanya mengategorikan kondisi di laut tidak stabil, kadang tenang kadang muncul situasi yang berupa angin kencang dan ombak keras. Agak berbeda, di desa Waonu justru orang menganggap musim pancaroba terjadi pada sekitar bulan Oktober – November, karena memang posisi letak desanya yang berbeda dengan Desa Kapoa. Beberapa tahun terakhir ini periode pancaroba menguntungkan bagi mereka, kondisi dan situasi di laut tenang dan memudahkan mencari ikan. Sekarang orang mulai kesulitan untuk menyusun perbedaan waktu musim, karena hujan dan kemarau juga tidak menentu lamanya, kadang musim hujan lebih lama dan tidak jarang juga musim kemarau jauh lebih panjang dari biasanya. Hasil kegiatan kenelayanan pada musim pancaroba ini umumnya lebih baik dibandingkan musim gelombang kuat. Penggunaan alat tangkap lebih bervariasi dan lama melaut juga rata-rata lebih panjang tetapi frekuensi melaut biasanya hanya 1 kali saja. Jenis tangkapan ikan sama dengan musim gelombang kuat, yakni ikan-ikan karang dan ikan pelagis kecil. Pada musim pancaroba rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayanan memperoleh hasil perikanan 281.197 rupiah dan penghasilan maksimal sekitar 2.280.000 rupiah per bulannya.

Pada musim gelombang tenang, banyak penduduk melakukan kegiatan kenelayanan, karena merupakan waktu yang tepat untuk mengumpulkan hasil tangkapan ikan dibandingkan kedua musim lainnya. Pada musim ini hasil tangkapan ikan banyak dikomersialkan, karena hasilnya relatif banyak. Secara umum pada musim gelombang tenang jumlah orang yang melakukan kegiatan kenelayanan, lama melaut (HOK), frekuensi orang melaut, variasi jenis alat tangkap dan kuantitas hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan pada musim lainnya (pancaroba dan gelombang kuat). Pada musim ini sampan

tidak bermotor tidak menjadi halangan bagi orang untuk mencari ikan agak jauh dari pantai dan dalam waktu yang cukup lama.

Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang lemah yaitu sekitar 375.563 rupiah atau lebih dari tiga kali lipat rata-rata penghasilan nelayan pada gelombang kuat. Hal ini disebabkan kegiatan kenelayanan dapat dilakukan setiap hari dan nelayan berani melaut agak jauh dari pantai. Pendapatan rata-rata RT dari kegiatan kenelayanan mencapai 375.563 rupiah dan penghasilan maksimal mencapai 3.800.000 rupiah.

Hasil survei rumah tangga di lokasi binaan COREMAP, menunjukkan bahwa sekitar 87 persen responden mempunyai penghasilan kurang dari 250 ribu rupiah pada musim gelombang kuat. Hanya 2 persen responden yang mempunyai penghasilan antara 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah (Tabel 4.13).

Tabel 4.13. Distribusi RT Menurut Pendapatan RT (Kegiatan Kenelayanan) dan Musim di Lokasi Penelitian Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, 2006 (persen)

No	Kategori Pendapatan	Musim		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
1.	<Rp 250.000	64	72	87
2.	Rp 250.000 - Rp 499.000	22	19	11
3.	Rp 500.000 - Rp 999.000	9	5	2
4.	Rp 1.000.000 - Rp 1.499.000	5	4	0
Total		100	100	100

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, LIPI, 2006.

Pada musim pancaroba, sekitar 72 persen responden menyatakan memperoleh penghasilan rata-rata kurang dari 250 ribu rupiah per bulan. Sedangkan sekitar 19 persen berpenghasilan rata-rata antara 250 ribu sampai 500 ribu rupiah. Hanya sekitar 5 responden yang menyatakan bahwa rata-rata penghasilan mereka antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah, dan hanya empat responden yang menyatakan memperoleh penghasilan di atas 1 juta rupiah per

bulan pada musim itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada musim pancaroba, nelayan mulai intensif melakukan kegiatan kenelayan dibandingkan pada saat musim gelombang kuat. Kecenderungan intensifikasi alat tangkap juga terjadi pada musim ini.

Pada gelombang tenang, persentase responden yang menyebutkan memperoleh penghasilan kurang dari 250 ribu rupiah per bulan relatif lebih sedikit dibandingkan pada musim lainnya (64%). Jumlah responden dengan penghasilan antara 250 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah sebesar 22 persen dan sekitar 9 persen responden memperoleh penghasilan di atas 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Seperti pada musim lainnya jumlah responden yang menyebutkan memperoleh penghasilan di atas 1 juta rupiah relatif kecil (5 responden). Mereka umumnya adalah nelayan dengan menggunakan alat tangkap *redi* dan perahu bermotor sebagai saran tangkapnya.

Ilustrasi kasus

Perbedaan musim sangat berpengaruh terhadap pola aktivitas nelayan. Kondisi dan situasi di laut sangat menentukan bentuk operasi penangkapan ikan. Penduduk di desa-desa kecamatan Kadatua, khususnya di daerah survei, melakukan penangkapan ikan secara intensif pada musim gelombang tenang, yakni antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan antara bulan November – Desember sudah memasuki musim gelombang kuat, dimana angin kencang dan ombak kuat, sehingga menyulitkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Bagi penduduk Desa Kapoa, sekitar bulan April dan Mei merupakan musim pancaroba, yang biasa didefinisikan sebagai kondisi laut yang tidak stabil, kadang tenang kadang muncul situasi yang berupa angin kencang dan ombak kuat. Agak berbeda keadaan di Desa Waonu, karena musim pancaroba dianggap nelayan terjadi pada sekitar bulan Oktober – November, karena posisi lokasi yang berbeda dengan Desa Kapoa. Namun beberapa tahun terakhir ini periode musim pancaroba lebih menguntungkan bagi nelayan, karena kondisi dan situasi laut yang

tenang, sehingga memudahkan nelayan mencari ikan. Namun kondisi sekarang berbeda, karena pembedaan waktu per musim mulai sulit dilakukan, karena musim hujan dan kemarau juga tidak menentu lamanya, kadang musim hujan lebih lama dan tidak jarang juga musim kemarau jauh lebih panjang dari biasanya.

Selain masalah musim yang semakin tidak menentu, intensitas pemanfaatan sumber daya laut sebenarnya juga berkaitan dengan pola pemenuhan kebutuhan pangan. Pada musim gelombang tenang, biasanya dilakukan penangkapan ikan sebanyak-banyaknya, untuk keperluan komersial (dijual) dan sebagian lain untuk konsumsi sendiri. Sebagian hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat musim gelombang kuat. Korelasi yang jelas antara ketiga periode musim itu adalah: i) jarak melaut, b) penggunaan alat tangkap, dan iii) jenis ikan tangkapan. Faktor-faktor ini agak rumit apabila dikaitkan dengan penghasilan nelayan, karena jenis tangkapan agak berbeda antara musim gelombang kuat dengan musim gelombang tenang. Pada musim gelombang kuat, nelayan juga mencari jenis biota laut seperti gurita, bulu babi, kerang-kerangan, mata tujuh, dan jenis ikan-ikan pelagis tertentu. Pada saat gelombang kuat, populasi ikan tongkol berkurang dan lebih banyak terdapat jenis ikan Layang. Hasil tangkapan pada musim ini lebih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dibandingkan untuk kebutuhan komersial.

Pada musim gelombang tenang di perairan Kadatua lebih banyak diperoleh ikan Layang, ikan Tude dan ikan Tongkol yang umumnya berada di luar Rumpon. Pada musim ini ikan-ikan pelagis non-karang lebih banyak diperoleh. Jenis-jenis ikan karang yang sering diperoleh nelayan adalah ikan Merah (Kiawale), ikan Lompalumpa dan ikan Kerapu (namun sejak tahun 1980-an semakin sulit diperoleh).

Tenaga kerja untuk kegiatan kenelayanan juga menunjukkan hal yang menarik. Apabila di banyak daerah lain nelayan mulai pensiun dari kegiatan kenelayanan sekitar umur 40 tahun atau lebih sedikit, di Kadatua cukup banyak nelayan yang usianya lebih tua

yaitu sekitar 50 - 60 tahun-an. Anak-anak muda lebih suka merantau ke daerah lain untuk memperoleh penghasilan yang lebih menjanjikan. Nampaknya mereka bekerja mencari ikan hanyalah karena tempat tinggalnya di tepi laut, bukan karena sebagai nelayan murni. Rata-rata penduduk di Kadatua, khususnya di kedua lokasi desa survei, lebih suka berdagang daripada mencari ikan. Menurut sejarahnya, jiwa berdagang sudah semenjak lama dimiliki oleh masyarakat Kadatua, diduga karena kondisi sumber daya yang terbatas dan sifat 'pelaut', sehingga cenderung suka merantau dan didukung oleh kultur mereka. Perkembangan yang agak berbeda terjadi di Desa Banabungi dengan diperkenalkannya *redi* sebagai alat tangkap baru yang lebih menjanjikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih banyak. Dalam dua tahun terakhir ini sebagian penduduk setempat aktif untuk menggeluti pekerjaan kenelayanan. Bersamaan dengan diperkenalkannya alat tangkap ini pengadaan rumpon juga semakin menjamur. Hal ini berkaitan dengan penghitungan bagi hasil.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan alat tangkap tertentu yang dikaitkan dengan perbedaan musim. Artinya, semua alat tangkap digunakan nelayan pada semua musim yaitu gelombang kuat, gelombang tenang maupun pancaroba. Hanya saja pada saat gelombang kuat orang lebih intensif menggunakan pancing ulur dibanding alat tangkap lainnya. Pancing yang digunakan untuk menangkap ikan di rumpon adalah pancing sampai dengan 50 mata kail. Alat tangkap seperti panah sepanjang 2 meter, jaring dan pancing digunakan untuk menangkap ikan-ikan karang. Ikan-ikan pelagis non karang ditangkap dengan menggunakan jaring *gillnet*. Peralatan yang dimiliki nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan pada umumnya masih dalam skala kecil dan tradisional. Sebagian besar nelayan memiliki dan menggunakan sampan tidak bermotor dan pancing ulur sebagai sarana dan alat tangkap yang intensif untuk memperoleh hasil tangkapan. Alat tangkap lain yang digunakan adalah bubu, panah, jaring dan juga rumpon.

Jenis ikan yang relatif mahal dan banyak dicari penduduk adalah ikan Tuna yang dijual nelayan dengan harga sekitar 75 ribu

rupiah per kg dan ikan Cakalang dengan harga 50 ribu rupiah per kg. Biasanya nelayan menjual hasil pada Pedagang Penampung atau dijual ke kota Bau-bau. Sedangkan ikan tangkapan yang relatif murah adalah ikan Terbang (harga Rp 5000 per lima ekor dan ikan Pogo dengan harga 2000 rupiah sepiring. Adapun jenis ikan karang yang sering ditangkap dan dijual nelayan adalah i) ikan Sunu (Rp50 ribu sampai Rp70 ribu per ekor); ii) ikan Katamba (Rp20.000,- per ekor); iii) Ikan Baronang (Rp10.000,- per ekor); dan iv) ikan Deborah (Rp10.000,- per ekor).

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ilustrasi (kasus) tentang usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di Pulau Kadatua, lebih khusus lagi di dua desa survei, yakni Desa Waonu dan Desa Kapoa.

Kasus 1: Keluarga La Aizi (Desa Kapoa)

Keluarga ini mempunyai 11 orang anggota rumah tangga, terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, menantu dan cucu. Rata-rata rumah tangga di Kecamatan Kadatua cenderung sebagai keluarga luas (*extended family*) yang terdiri dari 2 – 3 keluarga batih (*nuclear family*). Seperti kebiasaan penduduk di Pulau Kadatua pada umumnya, tiga orang anggota keluarga ini juga merantau, karena umumnya laki-laki pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kebiasaan merantau ini sangat dipujikan dalam kultur masyarakat Kadatua. Orang yang berani merantau dianggap sebagai tanda kedewasaan, kejantanan dan mungkin bisa dianggap sebagai suatu inisiasi dalam konsepsi Van Gennep (*rites d'passage*).

Dua orang anggota keluarga, yakni Asis (25 tahun), tamatan SMP, dan Ali (22 tahun), tamatan SD, merantau ke Bangka untuk bekerja di pertambangan timah. Sementara Aluwi yang baru berusia 17 tahun, tidak tamat SD, merantau ke Samlaki, Provinsi Maluku. Selama merantau, keluarga mereka sering mendapat kiriman surat maupun uang yang kabarnya cukup besar jumlahnya. Namun demikian belum ada informasi yang jelas tentang hal ini. Biasanya

mereka tidak pulang selama bertahun-tahun, dan istri-istri mereka dikabarkan selalu menunggu dengan setia.

La Aizi (52 tahun), sebagai kepala rumah tangga, tidak pernah sekolah, biasanya selepas subuh sudah berangkat sendirian ke laut dengan menggunakan sampan berukuran 4 meter dan tidak bermotor. Alat tangkap yang dimilikinya adalah pancing ulur. *Fishing ground* (tempat mencari ikan) tidak jauh, hanya sekitar 2-3 mil dari pantai di perairan Desa Kapoa. Pada musim gelombang kuat dan kadang pada musim pancaroba, dia hanya sebentar pergi ke laut dan sekitar jam 7 atau 8 sudah kembali pulang. Pada musim gelombang tenang dan sebagian musim pancaroba (ketika gelombang tenang) dia agak lama melaut dan pulang sekitar jam 10 pagi. Pada sore hari dia berangkat ke laut lagi untuk mencari ikan, dari jam 3 sore sampai menjelang maghrib.

Pada musim gelombang kuat, dia bisa memperoleh penghasilan sekitar 25 ribu rupiah sekali melaut, karena menurutnya pada saat musim gelombang kuat justru lebih banyak ikan di laut dibandingkan musim-musim lainnya. Kendala yang dihadapi hanya kondisi laut yang relatif berbahaya. Itulah sebabnya, hanya sekitar 10 HOK (hari orang kerja) dalam sebulan dia mampu melaut, karena kondisi laut yang resiko akibat angin kencang dan ombak keras. Diperkirakan hasil tangkapan yang lumayan maksimal 6 kali saja dari semua operasi yang dilakukannya, dengan hasil sekitar 150 ribu per bulan. Usaha penangkapan ikan biasanya dilakukan di dua tempat, yaitu i) di tepi-tepi pantai untuk mengumpulkan bulu babi, kerang-kerangan, gurita, dan lain-lain, ii) menangkap ikan di tempat yang agak jauh dari pantai.

Pada musim pancaroba, rata-rata penghasilannya lebih baik, apalagi bila gelombang sedang tenang, dia bisa melaut selama 20 HOK (hari orang kerja) dalam sebulan, dengan rata-rata penghasilan mencapai 20 ribu rupiah untuk sekali melaut kalau berhasil. Menurut pengakuannya, dalam sebulan operasi penangkapan ikan, sebanyak 14 kali dia berhasil dengan penghasilan sekitar 280 ribu rupiah per bulan.

Selama bulan Mei sampai dengan November merupakan musim gelombang tenang yang memudahkan nelayan menangkap ikan. Dalam sebulan dia melaut paling sedikit 20 HOK (hari orang kerja) dan sedikitnya 14 kali berhasil. Dalam sehari La Aizi bisa melaut dua kali, pagi dan sore.

Kasus 2 : Keluarga Naim (Desa Kapoa)

Rumahnya di Desa Kapoa relatif kecil dan hanya dihuni satu keluarga batih, yaitu Naim (31 tahun, tidak tamat SD), tinggal bersama istrinya Masia (25 tahun, tamatan SMP), dan anaknya Masta (15 tahun, tamatan SMP). Sebagaimana tradisi di Pulau Kadatua umumnya, pasangan ini menikah pada usia dini yaitu remaja belasan tahun. Istri dan anaknya hanya mengurus rumah tangga dan hanya KRT yang bekerja sebagai nelayan. Terbatasnya tingkat pendidikan dan modal yang dimiliki keluarga ini, menyebabkan dia kesulitan untuk bekerja di luar usaha perikanan. Namun demikian dia masih beruntung karena mempunyai ketrampilan dalam menangkap ikan di laut yang diperolehnya dari pengalaman sebagai nelayan bersama ayah dan kerabat lainnya.

Untuk kegiatan kenelayanan dia memiliki sebuah perahu motor (*inboard*) dengan ukuran mesin 6 PK dan ukuran bodi perahu 6,5 meter. Alat tangkap yang biasa dipakai untuk menangkap ikan adalah jaring. Dengan perahu motor dia mampu mencari ikan agak jauh dari tepi pantai. Biasanya pagi-pagi selepas subuh dia melaut, dan sampai di tempat mencari ikan (*fishing ground*) sekitar pukul 7 pagi, dan sekitar jam 10.00 pagi sudah kembali. Apabila musim gelombang tenang, kadang-kadang ke laut bisa dua kali dalam sehari, berangkat pukul 3 sore dan kembali di pantai menjelang maghrib.

Pada musim gelombang kuat dia biasa melaut rata-rata 7 HOK (hari orang kerja) dan rata-rata 4 kali berhasil, dengan rata-rata penghasilan sekitar 70 ribu rupiah atau dalam sebulan sekitar 280 ribu rupiah (penghasilan kotor). Biaya yang dikeluarkan untuk setiap melaut adalah bahan bakar, rokok dan bekal makanan dengan nilai

sekitar 30 ribu rupiah. Setelah dikurangi biaya selama sebulan, maka total penerimaan bersih sekitar 70 ribu rupiah sebulan. Selain mencari ikan, dia juga mengumpulkan bulu babi dan kerang-kerangan yang dikonsumsi oleh keluarganya.

Ketika musim pancaroba tiba dia bisa melaut rata-rata 10 HOK (hari orang kerja) dengan 6 kali usaha mencari ikannya berhasil dan setiap kali penghasilan rata-rata 70 ribu rupiah. Apabila biaya sekali melaut sekitar 30 ribu rupiah, maka penghasilan bersih yang diterima sekitar 120 ribu rupiah sebulan. Hasil yang cukup besar diperoleh pada musim gelombang tenang, karena rata-rata bisa melaut sebanyak 16 HOK (hari orang kerja) dengan 10 kali berhasil dan penghasilan rata-rata setiap kali seesar 70 ribu rupiah. Setelah dikurangi biaya operasional yaitu sekitar 30 ribu rupiah setiap melaut, maka total penghasilan bersih mencapai sekitar 220 ribu rupiah sebulan.

Kasus 3 : Keluarga Saadi (Desa Waonu)

Keluarga ini terdiri dari dua keluarga batih dengan 7 orang anggota rumah tangga, namun hanya seorang yaitu KRT (Saadi, 60 tahun) yang bekerja sebagai nelayan. Imran (27 tahun, tamatan SMP) enggan bekerja sebagai nelayan, meskipun saat penelitian ini berlangsung dia sedang menganggur. Hanya sekali-kali saja dia menemani ayahnya ke laut. Kemungkinan dia akan pergi merantau atau berdagang lagi dalam beberapa bulan ke depan. Pendidikan Saadi terbatas (tidak tamat SD), dan masih ke laut untuk mencari ikan, meskipun dalam usia yang sudah relatif tua. Dua orang anaknya masih bersekolah, seorang melanjutkan ke SMA (lulusan SMP), dan seorang lagi masih di tingkat sekolah dasar.

Karena usianya yang sudah tua, dia hanya melaut sebentar dan mencari ikan di dekat-dekat pantai saja. Untuk kegiatan mencari ikan, dia memiliki sarana penangkapan ikan berupa sebuah perahu dengan motor dalam (*inboard*), dengan ukuran mesin 5,5 PK dan ukuran bodi kapal 6 meter. Alat tangkap yang biasa digunakan adalah

pancing biasa dan 6 unit jaring. Pada saat musim gelombang kuat dia pergi melaut rata-rata sebulan 15 HOK (hari orang kerja) dengan tingkat keberhasilan 10 kali, dan setiap kali memperoleh penghasilan kotor sekitar 10 ribu rupiah. Dengan biaya operasional (bahan bakar) hanya 6 ribu rupiah sekali melaut, maka penghasilan bersih selama sebulan paling sedikit 40 ribu rupiah. Menurut pengakuannya pada musim gelombang kuat ini dia lebih sering mengumpulkan bulu babi, kerang-kerangan, mata tujuh dan gurita di tepi-tepi pantai, terutama untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Keadaan fisiknya yang sudah tua, menjadi kendala untuk mencari ikan jauh dari pantai.

Pada musim pancaroba, kondisi laut dirasakan lebih nyaman untuk mencari ikan. Selama sebulan rata-rata melaut sebanyak 25 HOK (hari orang kerja) dengan tingkat keberhasilan sekitar 20 kali, dan rata-rata penghasilan kotor sekitar 20 ribu rupiah. Setelah dikurangi biaya operasional (rata-rata sekitar Rp6.000,- sekali melaut), maka total penerimaan bersih 250 ribu rupiah sebulan. Total penerimaan terbesar yang diperolehnya adalah pada musim gelombang tenang yaitu sekitar 850 ribu rupiah per bulan. Rata-rata melaut pada musim ini adalah 25 HOK (hari orang kerja) sebulan dengan keberhasilan sekitar 20 kali dan penghasilan kotor setiap kali sekitar 25 ribu rupiah dan rata-rata biaya operasional 6 ribu rupiah sekali melaut

Kasus 4 : Keluarga La Saba (Desa Waonu)

Keluarga ini terdiri dari 9 orang anggota rumah tangga (ART), hanya kepala rumah tangga (KRT) yakni La Saba (55 tahun, tidak tamat SD) yang menjadi nelayan di usia tua. Tiga orang anggota keluarganya merantau yaitu Tasmin (22 tahun, tamat SD) merantau ke Malaysia, Hakim (21 tahun, tamat SD) merantau ke Irian dan Yamin (19 tahun, tamat SD) merantau ke Ambon. Sementara itu 4 ART lainnya masih bersekolah. Anak-anaknya yang pergi merantau sampai kini masih mengirimkan kabar dan kirim uang, dengan jumlah yang tidak menentu .

Untuk keperluan mencari ikan, KRT didukung oleh sarana penangkapan ikan yaitu sebuah perahu bermotor ukuran bodi 6 meter dan mesin dalam 5,5 PK. Alat tangkap yang intensif digunakannya adalah pancing ulur. Hasil dari kegiatan sebagai nelayan merupakan tambahan uang kiriman yang diterimanya dari ketiga anaknya yang merantau. Sebagian hasil ikannya dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga.

Pada waktu dia berusia muda, untuk kegiatan nelayan di Kadatua banyak menggunakan bom ikan dan obat bius sebagai alat tangkap ikan. Hal ini menjadi penyebab terumbu karang di wilayah ini dalam keadaan rusak dan ikan semakin sulit diperoleh. Dia tidak berharap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, tetapi baginya apabila dapat memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan dan konsumsi sehari-hari sudah patut disyukuri.

Pada musim gelombang kuat, meskipun berbahaya dia tetap melaut dengan rata-rata hanya 7 HOK (hari orang kerja) dan biasanya hanya berhasil 5 kali, dengan penghasilan rata-rata sekitar 40 ribu rupiah setiap kali. Dengan biaya operasional sekali melaut sekitar 12 ribu rupiah, maka total penerimaan bersih 116 ribu rupiah sebulan.

Pada musim pancaroba yang berlangsung sekitar bulan Oktober – November, dalam sebulan rata-rata melaut 10 HOK (hari orang kerja) dengan keberhasilan sebanyak 8 kali, dan rata-rata penghasilan kotor sekitar 40 ribu rupiah. Setelah dikurangi rata-rata biaya operasional sekali melaut sekitar 12 ribu rupiah, maka total penerimaan bersih dalam sebulan sekitar 224 ribu rupiah.

Pada musim gelombang tenang (sekitar bulan Mei sampai dengan bulan September) kondisi dan situasi di laut dirasakan sama dengan kondisi musim pancaroba. Dalam sebulan rata-rata pergi melaut sekitar 10 kali dan rata-rata berhasil sebanyak 8 kali, dan penghasilan rata-rata 40 ribu rupiah. Dengan biaya operasional rata-rata sekali melaut sekitar 12 ribu rupiah, maka total penerimaan bersih sekitar 224 ribu rupiah sebulan.

4.3. SINTESA PENDAPATAN

Berdasarkan analisa pendapatan di kedua kawasan penelitian, ketergantungan penduduk di lokasi penelitian sangat tergantung pada hasil SDL, baik dalam arti sebagai mata pencaharian utama maupun sumber penghasilan utama rumah tangga. Ketergantungan penduduk pada hasil SDL terdapat pada kedua daerah sampel baik daerah yang lebih subsisten (Kadatua), maupun yang lebih komersial (Mawasangka). Berdasarkan perkiraan rata-rata pendapatan rumah tangga responden, kondisi ekonomi masyarakat di kawasan darat jauh lebih baik dari pada kawasan pesisir pada umumnya. Hal ini juga berlaku pada setiap musim, perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga sangat mencolok, terutama pada musim teduh (gelombang tenang), rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan darat sekitar 17 kali lipat dari kawasan pesisir. Faktor utama dari perbedaan yang mencolok ini adalah perbedaan kondisi alam dan akses untuk kegiatan sosial ekonomi yang relatif lebih baik di kawasan darat (pesisir) daripada daerah kepulauan pada umumnya, khususnya akses pemasaran hasil produksi. Masyarakat nelayan di Kadatua (pulau) cenderung memanfaatkan hasil yang diperoleh, untuk lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsisten), daripada untuk dijual. Selain perbedaan akses pasar, hal ini juga dipengaruhi oleh keragaman hasil laut yang diperoleh baik jumlah maupun nilai ekonominya. Hasil SDL utama di Kecamatan Mawasangka umumnya mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti Teri, Kepiting dan Ikan Karang, sementara hasil di Kadatua jenis ikan, jumlah dan nilainya kurang menarik pasar. Perhitungan penghasilan untuk masyarakat subsisten juga lebih sulit dari pada masyarakat komersial, sehingga perhitungan pendapatan masyarakat yang relatif subsisten, kemungkinan dipengaruhi oleh *under reporting* pendapatan.

Perubahan musim terutama dari musim gelombang lemah (angin timur) ke gelombang kuat (angin barat) sangat mempengaruhi rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan. Pola ini sama untuk kedua kawasan yaitu rata-rata pendapatan musim angin timur tertinggi, menurun pada musim pancaroba, dan menurun drastis pada

musim angin barat. Perbedaan rata-rata pendapatan per musim di kedua kawasan dipengaruhi oleh tersedianya kesempatan kerja alternatif, baik sebagai pekerjaan utama maupun tambahan. Di kawasan darat, pada umumnya nelayan mempunyai pekerjaan alternatif baik pekerjaan kenelayanan maupun non-nelayan, seperti menangkap kepiting, dan/ atau pekerjaan non-nelayan seperti budi daya rumput laut, perkebunan jambu mete, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomi relatif tinggi di pasar. Sedangkan di kawasan kepulauan, banyak penduduk meninggalkan lokasi untuk merantau terutama untuk berdagang di luar daerah. Kiriman uang dari rantau merupakan penopang utama perekonomian keluarga, sementara hasil dari kenelayanan hanya sebagai tambahan, terutama untuk memenuhi konsumsi keluarga.

Dampaknya, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan sangat tergantung pada kegiatan kenelayanan di musim tertentu. Sementara di kawasan darat kegiatan kenelayanan umumnya masih tetap berlangsung, meskipun dengan hasil yang lebih sedikit.

Akses pemasaran yang lebih baik di kawasan darat, juga berpengaruh terhadap motivasi nelayan untuk meningkatkan produksi, melalui peningkatan sarana produksi (kapal dan alat tangkap), serta memperluas jaringan pemasaran ke luar daerah. Sementara di kawasan kepulauan, motivasi peningkatan produksi kurang karena resiko busuk, dan dampaknya kegiatan kenelayanan cenderung menggunakan peralatan sederhana dengan nilai produksi yang relatif rendah. Dilema ini terus berlangsung, sehingga kemiskinan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat di kawasan kepulauan. Untuk meningkatkan kehidupan rumah tangganya, keluarga nelayan (terutama anak muda) tidak mungkin mengandalkan kegiatan nelayan, namun harus meninggalkan daerah untuk merantau, dan bekerja di bidang lain. Nelayan yang tinggal relatif semakin udhur karena berumur tua, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan berlanjut dari generasi ke generasi tanpa upaya nyata untuk mengatasinya. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat memotong mata rantai kemiskinan di daerah nelayan, khususnya daerah kepulauan

terpencil dengan membantu memperluas akses pemasaran, pemberdayaan nelayan (alat tangkap, teknologi, ketrampilan dan modal) serta menciptakan alternatif lapangan pekerjaan. Beberapa hasil SDL yang cukup melimpah (seperti ikan pari, bulu babi, kepiting kenari), sulit dipasarkan karena berbagai keterbatasan akses pemasaran..

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kawasan Darat/Pesisir (Kecamatan Mawasangka)

1. Sebagai besar wilayah Kabupaten Buton adalah lautan, sehingga potensi SDL cukup besar, terutama perikanan dan budi daya laut. Potensi ini semakin besar, terutama di wilayah perairan sekitar gugusan terumbu karang sepanjang kawasan pesisir dan kepulauan. Kecamatan Mawasangka, salah satu wilayah kawasan darat (pesisir) di Kabupaten Buton yang kaya SDL seperti ikan karang (kerapu dan sunu), ikan laut dalam (tongkol, cakalang, tuna) dan ikan laut dangkal (ikan teri, kepiting, cumi), dan memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian penduduk. Kondisi terumbu karang yang semakin rusak (menurut hasil survei LIPI dalam kondisi sedang), akibat over eksploitasi sebelumnya, telah berdampak semakin menurunnya potensi ikan karang di wilayah tersebut. Namun sebagai wilayah yang memiliki beragam jenis SDL, daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan Teri terbesar di Kabupaten Buton. Keberadaan terumbu karang di sepanjang pantai dengan struktur pantai yang landai, juga sangat cocok untuk usaha budi daya rumput laut. Hampir semua wilayah di Kecamatan Mawasangka merupakan daerah penghasil rumput laut, sehingga menjadikan wilayah ini penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Buton. Salah satu lokasi survei di Kecamatan Mawasangka, yaitu Desa Wakambangura merupakan penghasil rumput laut terbesar di kawasan ini, dan keterlibatan nelayan dan keluarganya untuk usaha budi daya rumput laut cukup menonjol.

2. Sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Mawasangka masih terbatas, terutama transportasi antar desa, sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hal ini menyulitkan mobilitas penduduk antardesa dan antarkecamatan. Jumlah sarana pendidikan terutama SLTP dan SLTA yang sangat terbatas (hanya satu di kota kecamatan), dan minimnya akses untuk mencapai sekolah (transportasi terbatas), menyebabkan pendidikan SDM di kedua lokasi sampel relatif tertinggal. Mayoritas anak usia sekolah (7-15 tahun) hanya berpendidikan SD atau kurang. Demikian pula keterbatasan fasilitas dan akses untuk kesehatan (tenaga medis) menyebabkan masih banyak penduduk yang memanfaatkan keberadaan dukun untuk berobat dan untuk pertolongan persalinan. Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi, serta aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas di luar daerah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia relatif rendah, sehingga masih banyak keluarga yang termasuk keluarga miskin.
3. Terbatasnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil sumber daya laut, menyebabkan usaha pengolahan SDL yang umumnya dilakukan oleh pedagang pengumpul setempat, masih sangat tradisional dan hanya terbatas pada usaha pengeringan dan pengasinan. Hampir tidak ada usaha pengolahan SDL lebih lanjut yang dilakukan oleh masyarakat, misal usaha pembuatan makanan dari bahan SDL yang dihasilkan. Keterampilan yang dimiliki masyarakat nelayan berkaitan dengan kegiatan kenelayanan, antara lain adalah pembuatan alat tangkap seperti bubu, kapal/perahu dan jaring. Keterampilan dalam membuat peralatan tangkap umumnya dimiliki nelayan (laki-laki).
4. Penduduk Kabupaten Buton sebesar 265.724 jiwa tersebar di 21 wilayah kecamatan, dengan wilayah terpadat adalah Kecamatan Batu Atas dan terjarang adalah Kecamatan Lasalimu. Jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki dengan sex ratio sekitar 97. Kedua lokasi penelitian yaitu Desa Terapung dan Wakambangura mempunyai rata-rata penduduk sekitar 4 jiwa per rumah tangga. Dilihat dari komposisinya, penduduk di

wilayah Kabupaten Buton cenderung merupakan penduduk muda, karena proporsi terbesar penduduk berusia 0-14 tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial (pendidikan dan kesehatan) dan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Sektor yang berkaitan dengan SDL terutama adalah perikanan merupakan sektor yang sangat potensial untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Pemanfaatan SDL oleh masyarakat setempat masih kurang optimal, karena kalah bersaing dengan nelayan dari luar, yang lebih komersial dibandingkan nelayan setempat, sehingga cenderung kurang peduli dengan keselamatan karang. Hal ini merupakan potensi konflik antarnelayan (setempat dan indon/pendatang), apabila tidak dicarikan solusinya.

5. Berdasarkan data PDRB terkini (tahun 2003 dan 2004), secara umum pendapatan Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 1993. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di wilayah ini, mengingat pada kurun waktu tahun 2000-2004, data PDRB Kabupaten Buton masih menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama dilihat dari harga konstan tahun 2000. Hal ini dipengaruhi oleh guncangan inflasi yang cukup berat sejak tahun 1997, diikuti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga telah menyulitkan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Kabupaten Buton, dilihat dari penyediaan lapangan usaha maupun struktur PDRB. Meskipun potensi SDL cukup besar, namun pengelolaannya belum optimal, sehingga kontribusi sektor perikanan relatif kecil dibandingkan sektor pertanian pangan. Data terkini tentang sumbangan subsektor perikanan yang terpisah dari pertanian umumnya, sulit diperoleh, sehingga perkembangan kontribusi perikanan terhadap PDRB Buton sulit diketahui saat ini.
6. Sejalan dengan potensi besar SDL di lokasi penelitian, sumber mata pencaharian utama penduduk adalah perikanan tangkap,

dilihat dari proporsi penduduk yang terlibat maupun dari rata-rata pendapatan yang menonjol pada kegiatan kenelayanan. Namun demikian rata-rata pendapatan nelayan dari perikanan tangkap sangat berfluktuasi karena perubahan musim, yaitu relatif tinggi pada musim gelombang tenang dan turun drastis pada musim gelombang kuat. Demikian pula rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Terapung lebih tinggi dari Desa Wakambangura, karena perbedaan SDL yang dimiliki dan akses pasar SDL yang dihasilkan.

7. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Desa Terapung pada umumnya relatif lebih baik dibandingkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Wakambangura. Perbedaan pendapatan antara kedua lokasi di wilayah kecamatan yang sama, dipengaruhi oleh antara lain kondisi alam, potensi sumber daya laut, dan alternatif pekerjaan kenelayanan. Meskipun lapangan pekerjaan yang menonjol di kedua desa adalah perikanan tangkap dan budi daya rumput laut, namun intensitas penangkapan berbeda di kedua desa. Nelayan di Desa Terapung pada umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi musim, karena sebagian nelayan mempunyai alat tangkap yang bervariasi yaitu bagan dan jaring untuk menangkap ikan Teri di musim gelombang lemah (angin timur) dan bubu dan pancing untuk menangkap Kepiting di musim barat dan pancaroba. Bahkan bubu untuk menangkap kepiting, dapat menjadi pekerjaan sambilan bersamaan dengan penggunaan bagan untuk penangkapan ikan Teri. Sedangkan nelayan di Desa Wakambangura hanya melakukan kegiatan sebagai nelayan di musim teduh. Meskipun ikan karang hidup bernilai ekonomi tinggi, namun kini semakin menurun populasinya, akibat kerusakan karang yang semakin luas.

Kawasan Kepulauan (Kecamatan Kadatua)

1. Kondisi sumber daya alam yang terbatas. Kondisi daratan yang berbatu-batu, miskin unsur hara dan kurang sumber air, mengakibatkan pertanian susah berkembang dengan baik. Sumber

daya laut juga menunjukkan hal yang sama akibat kegiatan kenelayanan yang tidak ramah lingkungan di masa lalu, misal dengan alat tangkap bom dan potassium sianida, mengakibatkan terumbu karang rusak dan ikan berkurang. Kini, intensitas pemanfaatan sumber daya laut rendah di Kadatua dan penduduk sudah mampu mencari solusi sendiri masalah ekonominya dengan cara mengembangkan institusi merantau yang dimanfaatkan untuk berdagang. Mereka tinggal di pulau tetapi bukan nelayan murni.

2. Pada musim gelombang tenang variasi jenis alat tangkap, lama melaut dan hasil tangkapan lebih dibandingkan musim pancaroba maupun gelombang kuat. Intensitas penangkapan dan komersialisasi hasil kegiatan kenelayanan intensif pada musim tersebut. Ikan-ikan karang masih menjadi target utama. Usaha kenelayanan ini bisa dikatakan kenelayanan skala kecil dan tradisional dengan alat tangkap yang terbatas. Pada dua musim lainnya, kegiatan kenelayanan lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi. Tidak ada kearifan lokal untuk kelautan dan tradisi yang ada melihat laut sebagai *open access*. Input program baru seperti COREMAP membutuhkan aparat pemerintah dengan modal politik (*political capital*) yang besar.
3. Pendapatan penduduk dalam bentuk uang sulit diperkirakan, karena banyak desa di lokasi survei yang cenderung bercorak subsisten dan dikategorikan sebagai desa miskin dan penerima subsidi pemerintah. Penduduk yang sering merantau ke luar desa biasanya mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik, yang digambarkan dengan kepemilikan properti seperti rumah batu, barang-barang elektronik seperti TV, video, dan kulkas, serta perhiasan. Nelayan yang mempunyai alat tangkap *redi* (pukat cincin) rata-rata lebih sejahtera, karena memperoleh bagi hasil yang cukup tinggi.
4. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk adalah tidak tamat SD, sehingga terbatas untuk mencari pekerjaan. Perekonomian penduduk tidak dapat diukur hanya dari komersialisasi sumber

daya alam yang tersedia, tetapi harus diperhitungkan juga nilai yang dikonsumsi keluarga sehari-hari, karena banyak hasil produksi yang dimanfaatkan untuk konsumsi. Makanan yang dibuat dari ubi kayu dan jagung, sayur kelor, mata tujuh, siput, kerang-kerangan, ikan-ikan yang terjebak ketika air laut surut, bulu babi dan lain-lain cukup besar jumlahnya dan menjadi bahan makanan sehari-hari yang dapat diperoleh tanpa melalui jual beli.

5. Pengembangan alat tangkap perlu mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin terjadi, seperti misalnya introduksi *redi* (pukat cincin) di Desa Kapoa. Penggunaan alat tangkap ini telah beberapa kali menimbulkan konflik dengan nelayan dari pulau lain, karena alat tangkap mereka tersangkut dan rusak karena *redi* (FAO, 1995).
6. Lokasi desa di Pulau Kadatua mempunyai akses yang relatif rendah terhadap pasar, sehingga harga mudah dipermainkan pedagang sebagaimana yang dialami penduduk ketika *booming ikan Kerapu*. Populasi ikan cenderung makin habis dan kesejahteraan nelayan tidak meningkat. Peningkatan peran dan kekuatan lembaga ekonomi lokal akan sangat membantu dalam menjangkau pemasaran hasil laut dan hasil pertanian.

5.2. REKOMENDASI

1. Program COREMAP untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan maupun teknis untuk lembaga-lembaga ekonomi yang sudah ada seperti koperasi, kelompok simpan pinjam ibu-ibu, kelompok nelayan, dan pasar tradisional. Pemberdayaan bisa melalui lembaga-lembaga ekonomi tersebut.
2. Hubungan antara masyarakat dengan aparat pemerintah semenjak reformasi di Indonesia cukup rentan, dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Bila modal politik (*political capital*) aparat pemerintah rendah, maka banyak program yang ada cenderung gagal dilaksanakan, karena

masyarakat dengan cepat akan menolaknya, betapa pun program tersebut bagus dan bermanfaat. Masa-masa pemilihan Kepala Desa merupakan saat rentan untuk suatu program, karena cenderung dimanipulasi dalam konflik antarcalon. Itulah sebabnya perlu revitalisasi lembaga adat yang kini terdiri dari tujuh orang (*parabella*) dan hanya berfungsi pada saat pernikahan dan konflik dalam masyarakat. Lembaga adat ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang lebih efektif untuk melaksanakan program COREMAP, dibandingkan aparat pemerintah lokal. Sebaiknya tidak perlu mendapat honor/gaji per bulan sebagaimana rencana untuk *reef watcher*, akan tetapi perlu merevitalisasi institusi '*uang passili*' untuk honor lembaga adat pada setiap aktivitas. Sebaiknya batasan wilayah tidak perlu desa, tetapi kesatuan adat (*communal law*) yang mungkin terdiri dari beberapa desa dan secara tradisi sebenarnya berada dalam satu kepengurusan adat. Pembentukan desa-desa selama ini telah menghancurkan kesatuan wilayah adat, dan untuk pelaksanaan program COREMAP perlu direvitalisasi kembali.

3. Peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas sosial ekonomi dan akses untuk memanfaatkannya sangat penting, karena otonomi daerah memberikan wewenang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Faktor kemiskinan dan tekanan permintaan dari luar dapat mendorong nelayan (termasuk nelayan luar) melakukan segala cara untuk mengeksploitasi SDL tanpa peduli keberlanjutannya. Sebaliknya tersedianya alternatif mata pencaharian dan akses pasar untuk hasil produksi, akan mengurangi *over fishing* dan mendorong pemanfaatan SDL yang ramah lingkungan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyediakan akses untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik dalam hal menyediakan kesempatan kerja alternatif maupun fasilitas pemasaran. Di samping itu, diperlukan kemauan politik dan aksi yang serius dan konsisten dalam membantu masyarakat untuk mengelola SDL, sekaligus menjaga dan melindungi wilayahnya dari praktek yang merugikan semua pihak terkait. Kebijakan dan

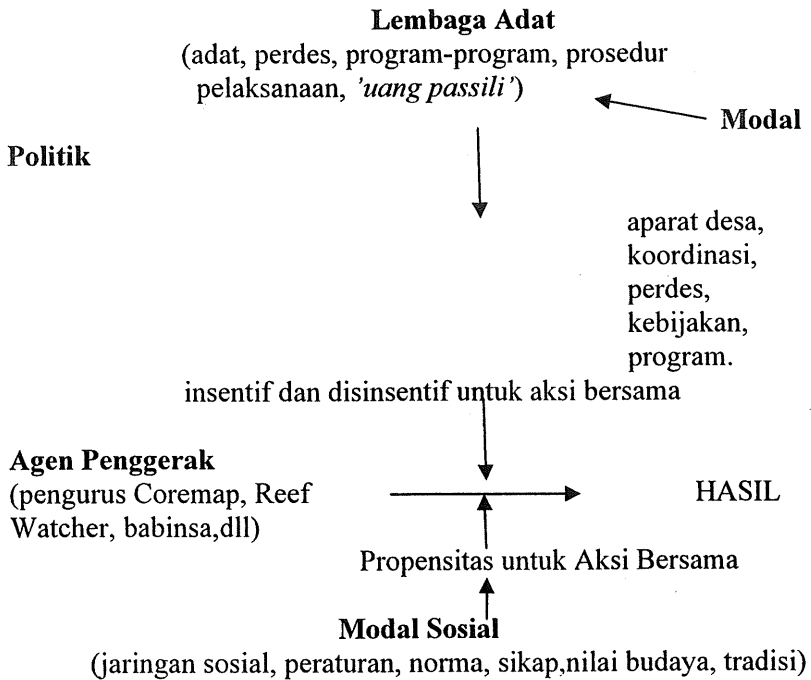
pelaksanaan yang tepat sasaran, juga akan mengurangi potensi konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar (indon).

4. Akses pemasaran hasil produksi, terutama untuk wilayah yang mempunyai akses terbatas, sangat penting untuk memotong rantai kemiskinan di wilayah yang kaya SDL. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat membantu memperluas akses pemasaran, pemberdayaan nelayan (alat tangkap, teknologi, ketrampilan) serta menciptakan alternatif lapangan pekerjaan. Keberadaan pedagang pengumpul di lokasi dibutuhkan, namun perlu ada aturan main yang melindungi nelayan dari kesewenang-wenangan pedagang dalam menentukan harga, misalnya akses informasi harga pasar komoditi SDL. Komunitas nelayan juga membutuhkan lembaga ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pedagang pengumpul, sehingga mempunyai posisi tawar yang sebanding.

5.3. AGENDA

- a. Bantuan kredit untuk berdagang (*micro-credit*), bermanfaat untuk mengurangi intensitas pemanfaatan SDL, sehingga ikan-ikan di laut sempat besar dulu sebelum dipanen.
- b. Penyusunan dan sosialisasi kelembagaan tingkat lokal untuk rehabilitasi terumbu karang dengan melakukan revitalisasi dan perluasan lembaga adat yang lama (*parabella*) dan '*uang passili*' sebagai honor yang kini masih digunakan untuk keperluan pernikahan serta penyelesaian konflik, bisa diperluas untuk keperluan program COREMAP.

Bagan 5.1. Struktur Prosedur Pelaksanaan Program COREMAP



Sumber: modifikasi dari Krishna (2002)

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 2004. *Sensus Pertanian Tahun 2003*.
- Biro Pusat Statistik, 2005. *Produk domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2000-2004*
- Biro Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Buton, 2005. *Kabupaten Buton Dalam Angka 2004*
- Biro Pusat Statistik, 2001. *Pendapatan Regional Kabupaten Buton (1996-2000)*
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2005. *Kecamatan Mawasangka Dalam Angka, 2004*
- Brandt, Andres Von. 1984. *Fishing Catching Methods of the World*. Fishing news books Ltd, England.
- Bunce, L., P. Townsley, R. Pomoroy, R. Pollnac., 2000. *Socio-Economic Manual for Coral Reef Management*. Townsville: Australian Institute of Marine Science.
- Cesar, H.S.J 2000. *Collected Essays on the Economics of Coral Reefs*. Published by Cordio, Depart for Biology and Environmental Sciences, Kalmar University. Sweden. 244.
- Cesar, H.S.J.1996. *Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs*. Working Paper Series 'Work in Progress'. Washington, DC : The World Bank.
- COREMAP II, Kabupaten Buton, 2005. *Profil Desa Program dan Rehabilitasi Terumbu Karang*.
- Crawford, Brian et al.2000. *Community Based Marine Sanctuaries in the Philippines: A Report on Focus Group Discussion*. PCAMRD Book Series No.30. University of Rhodes Island: Coastal Resources Centre.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton. 2006. *Pedoman Umum Pengelolaan Masyarakat Berbasis Masyarakat*.
- _____. 2006. *Laporan Tahunan Statistik: Potensi dan Produksi Perikanan Kabupaten Buton, Tahun 2005*
- Dirjen Pengembangan Masyarakat Desa Depdagri, 2004. *Daftar isian Potensi Desa, Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton*
- FAO. 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Rome, Italy
- Hidayati, Deny, D. Asiati, D. Harvina, 2005. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Kawasan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna*
- Hidayati, D., 2002. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: COREMAP-LIPI.
- _____. 2000. *Coastal Management in ASEAN Countries*. The United Nations University, Tokyo.
- Kay, Robert and J. Aldier, 1999. *Coastal Planning and Management*. New York: Routledge.
- Krishna, A. 2002. *Active Social Capital : Tracing the Roots of Development and Democracy*. New York : Columbia University Press.
- Lakamali., 2003. *Laporan Penjajagan Claap Di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*. Bau-Bau, Kerjasama Lakamali-Access AusAID.
- Laurette Burke et al.2002. *Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara*. Terjemahan. Jakarta : World Resources Institute LIPI, 2006. *Survei Ekologi Terumbu Karang Indonesia*

- LSM Prima, 2005. *Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Berbasis Masyarakat, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton*. Boton, Coremap II Buton-Wakatobi
- _____. 2005. *Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Berbasis Masyarakat, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton*. Boton, Coremap II Buton-Wakatobi
- Martasuganda, Sulaeman 2002. *Jaring Insang. Serial Teknologi Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Monintja, Daniel,. 2000. Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Perikanan Tangkap. Dalam *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Monintja, Daniel et al., 2001. *Ciri Kegiatan Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan*. Bahan Kuliah Teknologi Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan oleh Dr Fedi Sondita, 2004.
- Muchtar, Zulfikar, dkk., 2002. *Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Sinjau*. Jakarta: COREMAP LIPI.
- Oliver, ed. 2002. *Sustainable Fishery Management in Asia*. Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Pet-Soede, Lida dan Mark V.Erdmann,.1998.
- Blast Fishing in Southwest Sulawesi, Indonesia. Naga, *The ICLARM Quarterly* 21 (2) : 4 – 9
- Soekartawi, 1995. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- World Bank, 2004. *Project Appraisal Document, Appendix 3*
- Zaelany, Andy Ahmad, dkk. 2007. Perspektif Tiga Stakeholder terhadap praktek *Destructive Fishing* di Pulau Barrang Lompo, Provinsi Sulawesi Selatan, akan terbit dalam *Jurnal Pesisir dan Kelautan*. Bogor : IPB Press.

LAMPIRAN 1.

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan RT (Rp 3,5 juta/lebih) dan Musim, Kawasan Darat (Desa Terapung dan Mangubangura), Kec. Mawasangka, Kab. Buton, 2006 (N= 44)

No	Kategori Pendapatan RT (Kegiatan Kenelayanan)	Musim (N)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
1.	Rp3,5 jt - < Rp 4jt	3	-	1
3.	Rp 4 jt - < Rp 5 jt	1	4	-
4.	Rp 5 jt - < Rp 6 jt	2	5	-
5.	Rp 6 jt – < Rp 7 jt	5	2	-
6.	Rp 7 jt /lebih	12	4	-
Total		23 (52%)	15 (34%)	1 (2%)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

LAMPIRAN 2

Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan RT (kurang dari Rp500.000), Menurut Musim, Kawasan Darat (Desa Terapung dan Mangubangura), Kec. Mawasangka, Kabupaten Buton, 2006 (N = 44)

No	Kategori Pendapatan RT (Kegiatan Kenelayanan)	Musim (N)		
		Gelombang Lemah	Pancaroba	Gelombang Kuat
1.	< Rp 100.000	2	3	21
3.	Rp 100.000- < Rp 200.000	2	2	2
4.	Rp 200.000 – < Rp 300.000	1	7	3
5.	Rp 300.000 – < Rp 400.000	4	1	6
6.	Rp 400.000 – < Rp 5.00.000	-	2	-
Total		9 (21%)	15 (34%)	32 (73%)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, Indonesia 2006

LAMPIRAN 3

KONSEP DAN DEFINISI

Bekerja adalah seseorang yang dalam satu minggu terakhir melakukan pekerjaan/kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa, atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan atau balas jasa berupa uang atau barang. Termasuk dalam kategori bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja, seperti, sakit dan cuti.

Menganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan juga tidak mencari kerja

Mencari pekerjaan adalah mereka yang selama satu minggu yang lalu berusaha mencari pekerjaan, sedangkan usaha untuk mendapatkan pekerjaan misalnya dapat dilakukan dengan cara: mendatangi majikan untuk mendapatkan pekerjaan, mendatangi kantor pabrik, dsb.

Sekolah adalah mereka yang selama satu minggu yang lalu mempunyai kegiatan sekolah/kuliah. Anak sekolah yang selama seminggu yang lalu sedang libur dan tidak melakukan kegiatan atau lainnya dimasukkan ke dalam kategori sekolah.

Mengurus rumah tangga adalah mereka yang satu minggu terakhir mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga.

Pekerjaan Utama yang biasanya dilakukan selama satu minggu terakhir adalah pekerjaan yang menurut pengakuan responden paling banyak menyita waktu selama satu minggu terakhir, misalnya: nelayan pancing dengan kapal sendiri, nelayan bagan/bubu/keramba milik sendiri, nelayan bagan yang bekerja pada orang lain, nelayan yang bekerja dengan cara bagi hasil (sebagai pemilik atau sebagai

pembawa kapal), pegawai negeri di kantor kecamatan, staf administrasi di kantor desa, perawat Puskesmas, pedagang makanan keliling, pedagang ikan di pasar, pemilik warung sembako. Informasi mengenai pekerjaan utama tersebut dapat dirinci berdasarkan:

- a. Jenis pekerjaan yang dilakukan misalnya nelayan punggawa, nelayan keluarga, petambak, petani, buruh tani
- b. Status pekerjaan yang dilakukan (bekerja sendiri, membantu keluarga-pekerja tak dibayar, memperkerjakan orang lain, karyawan, PNS dsbnya)
- c. Lapangan kerja adalah sektor dimana ia bekerja (pertanian, industri, jasa)

Pekerjaan tambahan yang biasanya dilakukan selama satu minggu terakhir adalah pekerjaan tambahan diluar pekerjaan utama. Pekerjaan tambahan tersebut diuraikan seperti pada pekerjaan utama

Pendapatan rumah tangga (pendapatan bersih rumah tangga) dalam satu bulan terakhir adalah pendapatan setelah dikurangi biaya produksi yang diterima oleh rumah tangga dalam satu bulan terakhir. Pendapatan rumah tangga mencakup penghasilan dari pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Pendapatan keluarga tersebut dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu :

- a. **Pendapatan dari kegiatan usaha perikanan tangkap di laut**, dihitung dari pendapatan bersih yang diterima oleh nelayan setiap kali melaut. Pendapatan bersih ini merupakan penjualan hasil tangkapan dikurangi biaya produksi untuk melaut yang umumnya meliputi biaya BBM, ransum dan rokok. Pendapatan bersih sekali melaut ini kemudian dikonversikan ke dalam pendapatan satu bulan dengan mengalikan pendapatan bersih dengan jumlah melaut dalam satu bulan. Pendapatan dari kegiatan usaha perikanan laut ini dibagi ke dalam 3 musim yaitu:

- (i) Musim banyak ikan atau musim panen di daerah yang bersangkutan.
- (ii) Musim pancaroba adalah musim peralihan antara musim banyak ikan dan tidak banyak ikan dan sebaliknya dari musim kurang ikan ke musim banyak ikan.
- (iii) Musim kurang/sulit ikan (musim paceklik) di daerah yang bersangkutan.

Pendapatan sebulan dari kegiatan perikanan tangkap merupakan penjumlahan dari pendapatan rata-rata per bulan per musim dibagi dengan banyaknya musim, dengan rumus :

$$I_p = \frac{(I_1 \times n_1) + (I_2 \times n_2) + (I_3 \times n_3)}{12}$$

dimana :

- I_p adalah pendapatan sebulan dari perikanan tangkap;
- I_1 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-1;
- I_2 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-2;
- I_3 adalah pendapatan rata-rata per bulan per musim ke-3;
- n_1 adalah banyaknya musim bulan 1 (gelombang kuat)
- n_2 adalah banyaknya musim bulan 2 (masa pancaroba)
- n_3 adalah banyaknya musim bulan 2 (gelombang lemah)

- b. Pendapatan dari budidaya perikanan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang mengusahakan budidaya biota laut/hasil laut seperti tambak bandeng, udang, pembesaran ikan kerapu, tanaman rumput laut dll. Pendapatan bersih per sekali panen dihitung dari harga penjualan produksi biota/hasil laut yang dibudidayakan (tambak bandeng, udang, pembesaran kerapu dan rumput laut) dikurangi dengan biaya produksi seperti benih, pakan dan ongkos tenaga kerja. Pendapatan sebulan dari budidaya perikanan dihitung dari penjumlahan pendapatan bersih yang diterima setiap panen dibagi dengan banyaknya panen dalam satu tahun terakhir, maka formulanya adalah :

$$I_b = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n}$$

dimana :

I_b adalah pendapatan sebulan dari budidaya perikanan

P_1 adalah pendapatan bersih dari panen ke -1

P_2 adalah pendapatan bersih dari panen ke-2

P_n adalah pendapatan bersih dari panen ke-n

n adalah banyaknya panen dalam satu tahun terakhir

- c. **Pendapatan dari usaha pertanian di luar perikanan** adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang mengusahakan tanaman padi, palawija, kelapa, dll. Pendapatan bersih per sekali panen dihitung dari harga penjualan produksi (padi, palawija, kelapa dll) dikurangi dengan biaya produksi seperti benih, pupuk, obat-obatan dan upah tenaga kerja. Produksi yang ditanyakan pada bagian ini adalah produksi yang dijual. Pendapatan sebulan dari usaha pertanian di luar perikanan merupakan perkalian dari pendapatan bersih rata-rata yang diterima setiap panen dengan banyaknya panen dalam satu tahun terakhir terakhir yang kemudian dibagi dengan 12.

$$I_t = \frac{P \times j}{12}$$

dimana :

I_t adalah pendapatan sebulan dari usaha pertanian

P adalah pendapatan rata-rata setiap panen

j adalah banyak panen dalam satu tahun terakhir

- d. **Pendapatan dari usaha perdagangan** adalah pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang yang berusaha di bidang jasa perdagangan. Pendapatan bersih merupakan keuntungan yang diperoleh (tidak termasuk modal).

- e. Pendapatan lainnya yang diterima baik secara rutin maupun eksidental setiap bulan seperti PNS/Guru, ABK yang diupah, kiriman/pemberian orang tua/saudara, dll.

Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan merupakan penjumlahan pendapatan dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di berbagai sektor: perikanan tangkap, budidaya, perdagangan, pertanian dan pendapatan lainnya.

Pendapatan per-kapita per bulan dihitung dari jumlah pendapatan rumah tangga dibagi dengan seluruh jumlah anggota rumah tangga.

